IMPLEMENTASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR

(Studi Di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DANYATI TRIBUNDA NAIBAHO

NIM. 135030100111098

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

"Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa"

(Roma 12:12)

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Dalam Penanggulangan Banjir (Studi Di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)
Disusun oleh	: Danyati Tribunda N
NIM	: 135030100111098
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Administrasi Publik

Malang, 10 Maret 2017

Komisi Pembimbing
Ketua,

Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota,

M. Chazienul Ulum S.SOS, MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 25 April 2017
Pukul	: 09.00 WIB
Skripsi atas nama	: Danyati Tribunda Naibaho
Judul	: Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Dalam Penangguangan Banjir (Studi Di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)

Dan telah dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,	Anggota,
Dr. Sarwono, M.Si	**M. Chazienul Ulum S.Sos, MPA**
NIP. 19570909 198403 1 002	**NIP. 19740614 200501 1 001**
Anggota,	Anggota,
Dr. Bambang Santoso. H, MS	**Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**
NIP. 19610204 198601 1 001	**NIP. 19730713 200604 1 001**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan sayadidalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis daam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternayata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Maret 2017

Danyati Tribunda N

NIM : 135030100111098

Kupersembahkan Karyaku Kepada Ibunda
dan Ayahanda Tercinta Atas Tetesan
Keringat, Tangis, dan Doanya

RINGKASAN

Danyati Tribunda Naibaho, 2017, **Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Dalam Penanngulangan Banjir (Studi Di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)**, Dosen Pembimbing : Dr. Sarwono, M.Si dan M. Chazienul Ulum S.Sos, MPA. 181 Hal +xvii

Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu program pemerintah di tingkat desa/kelurahan sebagai suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai bagian dalam upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012. Desa/Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Program Desa Tangguh Bencana di implementasi di Desa Kedawungkulon. Terpilihnya Desa Kedawungkulon sebagai desa tangguh bencana dikarenakan seringnya terjadi banjir di wilayah tersebut. Pihak BPBD Kabupaten Pasuruan melihat program pemerintah dalam menghadapi resiko bencana ini cocok untuk diterapkan di desa tersebut. Dimana pihak BPBD Kabupaten Pasuruan memberi pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara melihat tanda-tanda bencana banjir sebelum terjadi dengan membangun koordinasi bersama masyarakat maupun antar desa yang nantinya kondisi keadaan dilapangan langsung di informasikan kepada pihak BPBD Kabupaten Pasuruan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pembatasan fokus yang diambil dari teori Jones. Dari hasil penelitian Implementasi Desa Tangguh Bencana Dalam Penanggulangan Banjir (Studi Di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan), dilihat dari implementasi program tersebut telah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa indikator-indikator tidak terimplementasikan dengan baik. Terkait pelaksanaan mitigasi struktural (fisik), pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, dan perlindungan aset utama masyarakat. Ketiga indikator tersebut secara umum tidak berjalan baik dalam penanggulangan bencana. Seperti masih ada tanggul-tanggul belum diperbaiki serta normalisasi yang kurang rutin dilaksanakan sehingga sungai kurang terawat, jalan yang rusak terendam banjir menghangmbat mata pencaharian masyarakat. Dalam melakukan implementasi program desa tangguh bencana terdapat faktor-fakor yang menjadi tantangan Desa Tangguh Bencanadan Upaya alternatif penanggulangan banjir. Dengan adanya faktor tantangan yang dihadapi program desa tangguh bencana, peneliti memberikan rekomendasi berupa upaya alternatif dalam penanggulangan banjir.

.

Kata Kunci : *Desa Tangguh Bencana, program, implementasi, penanggulangan banjir*

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Danyati Tribunda Naibaho, 2017, **An Implementation of Disaster Resilient Village Program in Flood Mitigation (Study at Kedawungkulon Village, Grati Pasuruan)**, Supervisor: Dr. Sarwono, M.Si and M. Chazienul Ulum S.Sos, MPA. 181 pages + xviii

The Disaster Resilient Village is one of the government programs at the village level as a program that is implemented by the government and / or local government as part of efforts to implement disaster risk reduction based on the community in accordance with the Regulation of the Head of National Disaster Management Agency Number 1 of the Year of 2012. The Disaster Resilient Village is a village that has the ability to adapt in adapting the potential of disaster threats, and recover from adverse disaster impacts immediately.

The Disaster Resilient Village Program was implemented in Kedawungkulon village. The election of Kedawungkulon Village as a resilient village due to frequent flooding in the region. BPBD Pasuruan has seen government programs in dealing the disaster risk, it was suitable to be applied in the village. The BPBD Pasuruan has provided training to the public of how to see the signs of flood disaster before occurring the flood, namely by doing coordination with the communities and between villages that will be informed the condition in field directly to the BPBD Pasuruan.

In this research, researcher used a descriptive research type with using a qualitative approach and also with a focus limitation that was taken from Jones's theory. From the research results, the Implementation of the Disaster Resilient village in Flood Mitigation (Study at Kedawungkulon Village, Grati, Pasuruan District), the implementation of the program has been running well, although there were some indicators that were not implemented properly. Related to the implementation of structural (physical) mitigation, the form of the economic resilience to reduce the vulnerability of the community, and the protection of the main assets of the community. The three indicators generally did not work well in disaster management. There were many unrepaired dikes as well as the less routine normalization that had been carried out so there were less groomed rivers, damaged roads that were inundated by floods could damage people's livelihoods. In conducting the implementation of disaster resilient village programs, there were factors that had challenged the the disaster resilient Village and alternative efforts to solve the flood. By the challenging factors that were faced by disaster resilient village programs, the researcher recommended alternatives in flood mitigation.

.

Keywords: disaster resilient village, programs, implementation, the flood mitigation

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta perlindunganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Dalam Penanggulangan Banjir (Studi Di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan).** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Sarwono, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. M. Chazienul Ulum S.Sos, MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Sugeng selaku Kepala Bidang Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, Bapak HM. Sugyarto selaku Kepala Desa Kedawungkulon, Bapak Badaru Shamsih selaku Koordinator Lapangan Bencana (Trantip) Ketentraman Keamanan dana Ketertiban Desa, Bapak Charick Adi Amsah selaku Sekertaris Desa, Bapak Suparman selaku Kepala Dusun Adi Rogo, Bapak Sonny selaku Tim Relawan, dan Bapak Frenky selaku tim relawan yang terlah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
8. Bapak Ir. Arifin Naibaho dan Ibu Berlian Silitonga selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa baik secara moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dina Naibaho, Dian Naibaho, Eda Monica Panggabean selaku abang dan kakak yang selalu memberi dukungan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Joshua Tenggo Laksono Panjaitan selaku orang terkasih yang selalu setia memberikan dukungan, doa, perhatian, dan tidak pernah bosan-bosannya setiap saat menagih wisuda penulis.

11. Bou Daspa selaku orang tua yang dikasihi bagi penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa bagi penulis.
12. Sahabat-sahabat SMAku Bela Ayuni Hutauruk, dan Rena Elviana Purba yang sudah memberikan dukungan bagi penulis.
13. Teman seperjuangan magang Leli, Cendana, Yulia Saragih "*Bebsky*" yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi
14. Ira Situmorang, Yeni Saragih, Fira, Ifa, Lintang teman seperjuangan skripsi yang selalu membantu penulis dalam melakukan penelitian dan selalu ada dalam memberikan semangat, dan tidak lelah mengajak penulis ke perpustakaan Universitas Brawijaya serta Mika Sianturi adikku yang mau membantu penulis untuk ikut menemani penelitian dan selalu memberikan dukungan.
15. Keluarga Besar PMK IMMANUEL yang telah menjadi rumah keluarga yang luar biasa.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
MOTTO ..... **ii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
TANDA PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **v**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vi**
RINGKASAN ..... **vii**
SUMMARY ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kontribusi Penelitian 11
E. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kebijakan Publik 14
   1. Definisi Kebijakan Publik 14
   2. Proses Kebijakan Publik 15
B. Implementasi Program 20
   1. Definisi Implementasi Program 20
   2. Unsur-unsur Implementasi Program 22
   3. Tahap-tahap Implementasi Program 24
   4. Penilaian Program 27
   5. Fungsi Penilaian Program 28
   6. Faktor penghambat dan pendukung program 29
C. Desa Tangguh Bencana 37
   1. Definisi Desa Tangguh Bencana 37
   2. Tujuan Desa Tangguh Bencana 39
   3. Komponen-komponen Desa Tangguh Bencana 40
D. Penanggulangan Bencana Banjir 41
   1. Definisi Bencana Banjir 41
   2. Karakteristik Banjir 43
   3. Tahap-tahap Penanggulangan Bencana Banjir 45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 47
B. Fokus Penelitian 48
C. Lokasi dan Situs Penelitian 49
D. Jenis dan Sumber Penelitian 50
E. Teknik Pengumpulan Data 51
F. Instrument Penelitian 53
G. Metode Analisis Data 54
H. Keabsahan Data 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum 58
   1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 58
      a. Letak Administrasi dan Geografis 58
      b. Kondisi Topografi 60
      c. Kondisi Hidrologi 61
      d. Karakteristik Sungai Rejoso 62
      e. Sejarah Kejadian Banjir Luapan Sungai Rejoso 62
      f. Penduduk tepapar banjir luapan DAS Rejoso 63
   2. Gambaran Umum Desa Kedawungkulon 65
      a. Letak Administrasi dan Geografis 65
      b. Keadaan Iklim 66
      c. Kondisi Fisik Desa 67
      d. Sejarah Desa Kedawungkulon 68
   3. Gambaran Umum Pelaku Kegiatan Desa Tangguh Bencana 71
      a. Gambaran Umum BPBD 71
      b. Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) 72
B. Penyajian Data Fokus Penelitian 75
   1. Implementasi Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir Desa Kedawungkulon 75
      a. Interpretasi 75
      b. Pengorganisasian 82
         1) Sumberdaya Manusia 83
         2) Sumberdaya Peralatan, Sarana dan Prasarana 87
         3) Sumberdaya Anggarn 92
         4) Perangkat Hukum 95
      c. Penerapan/Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir 99
   2. Faktor-fakor yang menjadi tantangan Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon 106
      a. Pelaksanaan Mitigasi Struktural (Fisik) 106
      b. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentan masyarakat.....
      c. Perlindungan aset produktif utama masyarakat..... 108

d. Membangun koordinasi dengan dinas-dinas pemerintahan dan masyarakat 110
3. Upaya Alternatif yang diambil dalam penanggulangan banjir 111
a. Perbaikan tanggul-tanggul sungai dan normalisasi saluran air 111
b. Melestarikan Hutan 112
c. Pengurangan pengerukan batu diatas gunung yang menyebabkan rawan bencana 113
d. Kegiatan Pengetahuan dalam pembuangan sampah dan perawatan lingkuangan sekitar 114
C. Pembahasan 115
1. Implementasi Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir Desa Kedawungkulon 115
a. Interprestasi 115
b. Pengorganisasian 121
1) Sumberdaya Manusia 122
2) Sumberdaya Peralatan, Sarana dan Prasarana 124
3) Sumberdaya Anggaran 126
4) Perangkat Hukum 128
c. Penerapan/Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir 131
2. Faktor-fakor yang menjadi tantangan Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon 134
a. Pelaksanaan Mitigasi Struktural (Fisik) 135
b. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentan masyarakat .....
c. Perlindungan aset produktif utama masyarakat 137
d. Membangun koordinasi dengan dinas-dinas pemerintahan dan masyarakat 139
3. Upaya Alternatif yang diambil dalam penanggulangan banjir 141
a. Perbaikan tanggul-tanggul sungai dan normalisasi saluran air 142
b. Melestarikan Hutan 143
c. Pengurangan pengerukan batu diatas gunung yang menyebabkan rawan bencana 144
d. Kegiatan Pengetahuan dalam pembuangan sampah dan perawatan lingkuangan sekitar 145

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 148
B. Saran 152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.1	Kerusakan Infrastruktur	8
4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Pasuruan	59
4.2	Penduduk Terpapar Banjir Luapan DAS Rejoso	64
4.3	Nama-nama Kepala Desa Kedawungkulon dan periodenya	70
4.4	Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana	85
4.5	Kegiatan dalam Prabencana (sebelum) Desa Kedawungkulon	102
4.6	Kegiatan Pasca Bencana (sesudah) Desa Kedawungkulon	105
4.7	Ancaman Banjir pada Lahan Pertanian, Perkebunan	108

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
3.1	Component of Data Analysis (*Interactive Model*)	56
4.1	Kabupaten Pasuruan	59
4.2	Seminar Pemantapan dan Penetapan Desa Tangguh Bencana di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan	77
4.3	Penandatangan Peresmian Desa Tangguh Bencana oleh Tim Relawan KMPB Desa Kedawungkulon	79
4.4	Posko Pemantauan Banjir di Desa Kedawungkulon	92
4.5	Diklat Simulasi Pelatihan Water Rescue Kertosari	93
4.6	Pembuatan Selbeck di Jembatan Oranye dalam mengantisipasi tanggul yang bocor ketika banjir Januari 2017	107
5.6	Rumah dan kendaraan yang terkena banjir 14/01/20017	109
4.7	Jembatan Oranye terendam banjir januari 2017	138
4.8	Jalan berlubang disepanjang Desa Kedawungkulon	140
4.9	Skema Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir Desa Kedawungkulon	147

LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Keputusan Bupati Kab.Pasuruan No: 189/728/HK/424.013/2014 tentang Penetapan Desa Kedawungkulon Kec.Grati Sebagai Desa Tangguh Bencana	157
2.	Indikator Desa Tangguh Bencana Desa.Kelurahan Tangguh Bencana Perka BNPB No 1 Tahun 2014	161
3.	Sumberdaya peralatan yang digunakan	162
4.	Surat Keterangan Bangkesbangpol Kabupaten Pasuruan	173
5.	Pedoman Wawancara	174
6.	Dokumentasi Peneliti Selama Penelitian	176
7.	Curricullum Vitae	180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam akan tetapi bila dilihat dari letak geografis termasuk salah satu negara yang rawan akan bencana. Bencana yang terjadi terbagi dua faktor yaitu faktor alam maupun faktor aktivitas manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, puting beliung dan tsunami sedangkan bencana yang di sebabkan oleh faktor manusia yaitu tanah longsor, banjir, abrasi, kebakaran hutan. Dari kejadian bencana yang ada di Indonesia, kejadian yang sering rutin terjadi setiap tahunnya ialah bencana banjir.

Banjir disebabkan bisa dikarenakan alami maupun akibat dari aktivitas manusia. Banjir alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sendimentasi, kapasitas sungai, kapasitas *drainase* dan pengaruh air pasang sedangkan banjir akibat manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan, seperti perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan permukiman di sekitar bantaran, rusaknya *drainase* lahan, kerusakan bangunan pengendalian banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistem kontrol banjir yang tidak tepat. (Ulum, 2014:56)

Pada tahun 2014 Indonesia mengalami bencana banjir bandang yang menimpa daerah Manado yang menyebabkan puluhan ribu orang menjadi korban

banjir bandang dan mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan. "Menurut paparan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarunda yang pada saat itu, total kerugian yang terjadi akibat banjir tersebut mencapai Rp1,871 Triliun Rupiah" (Sindo News 2014, 17 Oktober 2016 Pukul 20.07 WIB). Di tahun 2016 banjir terjadi lagi "menewaskan 16 dan sejumlah orang hilang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan dikhawatirkan bertambah karena masih dalam pendataan" diungkapkan Kepala BPBD Jawa Barat Haryadi Wargadikarta (BBC Indonesia 2016, 17 Oktober 2016 Pukul 20.50 WIB)

Dampak bencana banjir yang dirasakan masyarakat secara langsung seperti terendam-nya sarana transportasi, kerusakan pemukiman penduduk karena tergenang air maupun terkikis akibat lembab, fasilitas umum yang rusak seperti tempat ibadah, sekolah-sekolah, hilangnya sumber air, terjadinya longsor, kerugian sumber mata pencarian masyarakat seperti lahan, ternak dan sebagainya. Dampak lain dari banjir dilihat dari kesehatan masyarakat timbulnya penyakit pada saat banjir berlangsung maupun setelah banjir redah seperti adanya trauma berkepanjangan yang diderita masyarakat dalam menghadapi bulan musim hujan yang menyebabkan banjir.

Keresahan masyarakat akan dampak-dampak bencana banjir membuat masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah. Maka tugas dari negara adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya dari segala bentuk bencana seperti salah satu tujuan negara yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi "untuk membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum".

Meningkatnya dampak-dampak banjir harus menjadi perhatian para pembuat keputusan dalam bertindak (Bank Dunia dalam Ulum, 2014:57). Keputusan tersebut harus berkaitan dalam program penanggulangan banjir baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Tindakan pemerintah dalam keputusannya dengan membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang terdapat dalam implementasi program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu wilayah.

Tindakan-tindakan pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir terbagi menjadi tiga yaitu pertama, prabencana yang terdapat pada kesiapsiagaan, peringatan dini dan tahap mitigasi (mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana). Kedua, tanggap darurat penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana yang sedang berlangsung. Ketiga, pasca bencana yaitu rehabilitasi (perbaikan lingkungan daerah bencana) dan rekonstruksi (pembangunan kembali sarana sosial masyarakat).

Berdasarkan tindakan-tindakan pemerintah sesuai "pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah" (Triutomo, 2011:1). Pemerintah dalam menanggulangi bencana membentuk lembaga yang berwenang dalam

penanggulangan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BNPB memiliki fungsi sebagai perumus, penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan mengkordinasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sedangkan untuk tingkat daerah seperti BPBD yang memiliki fungsi kepengurusan kebencanaan agar mengurangi risiko bencana dalam penanggulangan bencana yang terjadi secara langsung di masing-masing daerahnya. Keputusan pemerintah sebagai tindakan lainnya dalam penanggulangan bencana dengan membuat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Keputusan pemerintah sebagai bentuk tindakan penanggulangan banjir terus berupaya hingga tahap desa dengan membuat program Desa Tangguh Bencana. Adapun program tersebut masuk ke dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana yang bertujuan melatih daya kritis masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam ketika alam mulai menunjukkan perubahan negatif. Program ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat sebagai sasaran program.

Program Desa Tangguh yang telah dibentuk pemerintah menjadi pengaharapan masyarakat tanggap terhadap apa yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana yang terjadi dengan memberikan pelatihan sehingga

masyarakat memahami tentang mitigasi bencana. Masyarakat dituntut terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka. Desa Tangguh Bencana ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya dalam mengatasi bencana yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini memudahkan pemerintah dalam menanggulangi bencana serta lebih tanggap terhadap bencana karena adanya keterbatasan akses dan sumber daya manusia dari instansi pemerintah, menjadikan pemerintah tidak dapat selalu mengawasi dan beraksi cepat ke daerah lokasi ketika bencana terjadi. Salah satu desa yang menerapkan program desa tangguh ialah daerah Desa Kedawungkulon.

Kondisi wilayah Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Dari sisi geografis berada di aliran sungai (DAS) Rejoso, maka dari itu Desa Kedawungkulon termasuk daerah rawan bencana banjir dan dilihat dari kondisi curah hujan yang tinggi sulit untuk diprediksi, membuat volume air meningkat sehingga tidak tertampung lagi oleh sungai yang ada dan meluap ke areal pertanian masyarakat bahkan sampai menggenangi pemukiman penduduk dan fasilitas umum seperti jalan pantura sebagai jalur pengiriman pasokan kebutuhan. Hal ini dikarenakan lokasi Desa Kedawungkulon berada pada dataran rendah dan saluran air yang tidak bisa menampung debit yang lebih. Akibat dari meningkatnya volume air ini membuat tanggul penahan air menjadi jebol. Berdasarkan RPB Desa Kedawungkulon menyebutkan bahwa keadaan alam secara umum mencakup:

> "lahan pertanian persawahan (sekitar 171,945 hektar) dan tegalan (sekitar 18,27 hektar) dan hanya sebagian kecil kawasan industri, sebagian besar lahan pertanian beririgasi teknis sehingga desa Kedawungkulon merupakan kawasan yang memiliki produktifitas atau hasil pertanian yang cukup tinggi. Adapun jumlah penduduk Desa Kedawungkulon 5.7556 jiwa terdiri dari laki-laki : 2.945 jiwa dan perempuan 2.811, dengan mata pencaharian sebagian besar petani, wiraswasta, karyawan swasta, TNI/Polri/PNS, jasa dan lain-lain" **(RPB Desa Kedawungkulon)**

Semenjak tahun 1975 banjir di daerah Desa Kedawungkulon sudah sering terjadi setiap tahunnya. "Kejadian banjir yang terbesar pada 2 Februari 2008 yang menyebabkan kerugian 10 Rumah rusak total, 28 rumah rusak berat, 92 rumah rusak ringan, 1 ibadah rusak berat dan area persawahan juga rusak" (RPB Desa Kedawungkulon). Kejadian bencana banjir hingga sekarang masih sering di alami masyarakat Desa Kedawungkulon "Bahkan dalam setiap tahun, terjangan banjir di desa tersebut bisa mencapai lebih dari 10 kali, setiap kali musim penghujan." (Warta Bromo, 2016).

Pada Tahun 2014 Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan telah resmi ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana oleh Bupati Pasuruan Bapak H. M Irsyad Yusuf, SE, MMA. Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana ini di sesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang bertujuan mengurangi resiko bencana berbasis masyarakat. Namun pengalaman masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir sebenarnya sudah dikatakan tangguh dalam mengatasi banjir di daerah lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sebagian besar masyarakat bisa bertahan dilingkungan mereka yang rawan bencana banjir, hanya saja dalam mengatasi banjir agar tidak terjadi lagi mereka belum dikatakan mampu. Seperti

yang dikutip Koran Warta Bromo, 2016 Kedawungkulon, Desa Tangguh Bencana yaitu:

> "Dapat dilihat setiap anggota masyarakat di Desa Kedawungkulon cukup tanggap menghadapi bencana, ketika air di Sungai Rejoso mulai kelihatan meninggi dan diperkirakan banjir akan datang melanda. Warga memiliki cara tersendiri untuk mengatasi banjir yang melanda tempat tinggal mereka. Cara masyarakat dalam mengatasi banjir adalah "kolong tempat tidur diberinya ban-ban yang sudah dipersiapkan. Jika saat air banjir terjadi dan ketinggian terus bertambah, dengan otomatis ban-ban di kolong tempat tidur akan mengangkat tempat tidur itu sendiri" Diakses Pada tanggal 17 Oktober 2016 Pukul: 17.07 WIB.)

Persoalan yang lebih dalam ditemukan oleh peneliti banjir di Desa Kedawungkulon yaitu setiap tahunnya masih terjadi banjir yang belum teratasi sepenuhnya, dan masih merupakan ancaman bagi masyarakat ketika memasuki musim hujan. Berbagai Implementasi program yang mendukung penanggulangan bencana telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD, baik pada tahap mitigasi bencana, tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. Namun demikian masih ada keluhan dari masyarakat sebagai korban bencana, terutama implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum maksimal dilakukan dan masih menyisahkan berbagai permasalahan.

Data BPBD Kabupaten Pasuruan menyebutkan bahwa, banjir menyebabkan gangguan terhadap infrastruktur antara lain transportasi, kelistrikan, jaringan pipa, air sumber air, tempat ibadah dan lainnya, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Kerusakan Infrastruktur

No	Infrastruktur	Bentuk Kerusakan	Keterangan
1	Jalan Kabupaten	Sedang, Terendam	3 Km
2	Jaringan Listrik	Roboh	60 PAL
3	Jaringan Pipa Air	Rusak Berat, Terendam	2500 meter
4	Sumber Mata Air	Rusak Berat, Tercemar	Air tercemar, warna kecoklatan
5	Pemukiman	Rusak Berat dan Ringan, Terendam	2 Dusun Terendam: Adirogo & Joyomulyo
6	Tempat Ibadah	Rusak Berat, Terendam	2 Masjid dan 1 Gereja
7	Sekolah	Rusak Terendam	SD Kedawungkulon 01, 02 & 03, dan 1 TK di Joyomulyo
8	Jembatan	Rusak Berat/Putus, Tertimbun	2 Jembatan : Magersari dan Joyomulyo

Sumber: Rencana Kontijensi Desa Kedawungkulon Kec. Grati Kabupaten Pasuruan, 2015

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pasuruan dalam penanggulangan bencana banjir belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat pasca bencana. Hal ini bisa dilihat dari kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir yang belum sempat ditanggulangi. Kerusakan infrastruktur bila dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut dalam memperbaiki akan menimbulkan biaya yang lebih besar lagi, dan pada akhirnya pemerintah daerah tidak sanggup untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur. Sedangkan masyarakat mempunyai harapan besar kepada pemerintah dalam memberikan rasa aman, nyaman, bebas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari pemerintah.

Melihat permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir dengan melihat keputusan pemerintah membuat program tersebut berkontribusi atau tidak untuk pengurangan risiko bencana banjir. Pertama, dengan melihat program pencegahan bencana dengan mitigasi, baik melalui pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kedua, dengan melihat program tanggap darurat pada saat bencana berlangsung, dan Ketiga, melihat program rehabilitasi atau rekonstruksi dalam serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana.

Selain itu peneliti juga ingin lebih mengetahui tantangan yang di hadapai Program Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

Setelah itu peneliti akan mendeskripsikan program alternatif Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Daerah Desa Kedawungkulon. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir (Studi Di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Program Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ?
3. Apa saja upaya alternatif yang perlu diambil Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tantangan yang dihadapai Program Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya alternatif yang perlu diambil Program Desa Tangguh Bencana dalam

Penanggulangan Banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dijabarkan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis
   a. Sebagai kajian Ilmu Administrasi yang dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan tentang Implementasi Program Desa Tangguh Bencana kepada pembaca dan peneliti sendiri
   b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan Implementasi Program Desa Tangguh Bencana.
2. Kontribusi Praktis
   a. Sebagai bahan masukan, sumbangan pemikiran dan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat luas mengenai Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
   b. Memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya pemerintah daerah terkait Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibuat agar mempermudah pembaca dalam memahami isi yang terkandung dalam penyusunan skripsi ini, serta memahami maksud dan tujuannya. Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian,. Adapun sistematika ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan penjelasan alasan yang mendasari latar belakang penelitian yang mendasari peneliti untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Selain itu bab ini juga meliputi perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan hasil penelitian secara spesifik, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan tinjauan teoritis yang digunakan dalam hubungannya dengan pembahasan masalah yang disajikan pada BAB IV. Teori- teori yang digunakan dalam analisis, antara lain: (1) Kebijakan Publik, (2) Implementasi Program, (3) Desa Tangguh Bencana, (4) Penanggulangan Banjir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yaitu mencakup jenis penelitian adalah kualitatif, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, teknik pengumpulan data terbanyak melalui wawancara dengan narasumber secara langsung, keabsahan data, dan diakhiri dengan analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data, analisis data, dan hasil dari analisis data yang diperoleh selama penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari uraian bab-bab sebelumnya dan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebjiakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan seluruh kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Dye dalam Wahab (2012:14) mengartikan bahwa kebijakan publik sebagai berikut *"public policy is whatever government choose to do or not to do"*. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apapun. Adapun menurut Mazman dan Sabatier dalam Widodo (2006:87), menjelaskan kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan aksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan menurut Wilson dalam Wahab (2012:13) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut :

> *"The actions, objektives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)"* (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan peryataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)).

Kebijakan publik tersebut menurut Edwards dan Sharkansky dalam Tachjan (2006:16), dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidatopidato pejabat teras pemerintah atau pun dalam bentuk

program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan publik dalam penelitian ini dapat diartikan suatu keputusan yang di ambil oleh pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan, perundang-undangan, pidato-pidato pejabat pemerintah, atau program-program pemerintah sebagai langkah tindakan-tindakan untuk diimplementasikan dalam memecahkan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

2. Proses Kebijakan Publik

Pada dasarnya suatu proses kebijakan melibatkan banyak aktor yang berusaha memecahkan permasalahan publik melalui prosedur pengambilan keputusan. Dalam rangka pembuatan kebijakan, beberapa teori pengambilan keputusan dikembangkan menurut Rofiek (dalam Khairi, 29-32) sebagai berikut:

a. Teori Rasional Komprehensif (*The Rational Comprehensive Theory*)

Teori ini sangat mengandalkan pembuatan keputusan secara rasional yang disebut Teori Rasional Komprehensif, yang secara ringkas oleh Anderson 1979 (dalam Khairi, 29) diuraikan sebagai berikut:

1) Pengambil keputusan dihadapkan kepada suatu masalah tertentu yang terpisah dari masalah-masalah lainnya, atau paling tidak, dapat diperbandingkan dengan masalah-masalah lainnya;
2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan target-target diperjelas, dan disusun secara berurutan sesuai dengan derajat pentingnya;
3) Pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah, diuji;

4) Seluruh konsekuensi (biaya dan manfaat) dari setiap pilihan alternatif, dicari;
5) Setiap alternatif beserta konsekuensinya, diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya; dan
6) Pengambil keputusan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan, nilai dan target.

Ke enam kegiatan dalam membuat keputusan tersebut banyak menuai kritik karena tidak realistis tidak mencerminakan realita. Bahwa keputusan dibuat oleh pengambil keputusan tunggal dengan membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Sehingga sering terjadi konflik diantara mereka baik menyangkut definisi masalah, tujuan yang ingin dicapai, nilai yang mendasarinya, ataupun alternatif yang akan dipilih. Konflik demikian, tidak sepenuhnya rasional, dan karena itu sulit dilakukan pembobotan, misalnya dalam menyusun prioritas pilihan kebijakan. Konflik antar pengambil keputusan ini diabaikan dalam teori rasional komprehensif. Kelemahan lainnya, yaitu teori rasional komprehensif kurang memperhatikan kerugian yang harus diterima, jika kebijakan atau program yang sedang berjalan harus berhenti ditengah jalan. Penerapan teori ini cenderung berakhir dengan keputusan untuk tetap melakukan program atau proyek yang secara rasional dianggap paling efisien. Pengambil keputusan dalam banyak kasus, cenderung menghindari perombakan program secara total suatu program, dan tetap memilih melakukan perbaikan secara tambal sulam, karena besarnya dana untuk menutup program di tengah jalan, dan ketidak-pastian apakah program yang baru akan mendatangkan hasil yang lebih baik.

b. Teori Inkremental (*Incremental Theory*)

Charles E. Lindblom (dalam Khairi, 31) menawarkan alternatif teori lain, yaitu teori inkremental. Teori ini dikenalkan melalui karya tulisnya "*The Science of Muddling Throught*", untuk mengatasi kelemahan yang disandang oleh teori rasional komprehensif, dengan berusaha lebih realistik terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Secara ringkas oleh Hartle (1980) (dalam Khairi, 31) karakteristik teori Inkremental disimpulkan sebagai berikut:

1) Melakukan seleksi terhadap tujuan-tujuan dan target-target diantara tujuan-tujuan dan target-target tersebut, dan analisis empiris tentang tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target yang saling berkaitan;
2) Pengambil keputusan hanya mempertimbangkan, berapa alternatif kebijakan yang berbeda secara inkremental atau marginal dengan kebijakan yang sedang berjalan;
3) Untuk setiap alternatif, hanya sejumlah konsekuensi penting yang dievaluasi;
4) Masalah yang dihadapi pengambil kebijakan selalu didefinisikan kembali. Model inkremental ini menyarankan adanya penyusunan yang terus menerus antara tujuan dan cara secara timbal balik, yang membuat masalah lebih dapat dipecahkan;
5) Tidak ada keputusan tunggal, atau pemecahan yang benar terhadap setiap masalah. Pilihan kebijakan diambil didasarkan pada kesepakatan

diantara para analis, bahwa keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik;

6) Pengambilan keputusan secara inkremental, pada dasarnya bersifat perbaikan secara tambal sulam dari ketidak-sempurnaan yang dapat dikenali, bukan pencapaian tujuan-tujuan sosial secara ambisius (tujuan-tujuan sosial yang besar di masa depan).

Menurut Lindblom dalam Wahab (2012:80), model ini lebih cocok diterapkan di masyarakat yang majemuk (*pluralistic societies*),Teori Pandangan Sekilas Campuran (*Mixed Scanning*), seperti Amerika Serikat. Keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pada hakikatnya merupakan produk saling memberi, menerima, dan percaya di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses keputusan tersebut. Dalam masyarakat yang majemuk, paham inkremental ini secara politis lebih aman. Karena akan lebih gampang untuk mencapai kesepakatan apabila masalah-masalah yang diperdebatkan oleh berbagai kelompok yang terlibat hanya bersifat upaya untuk memodifikasi tersebut menyangkut isu-isu kebijakan mengenai perubahan-perubahan radikal yang memiliki sifat “ambil semua atau tidak sama sekali. karena pembuat keputusan itu berada dalam keadaan yang serba tidak pasti, khususnya yang menyangkut akibat-akibat dari tindakan-tindakan mereka di masa mendatang, maka keputusan yang bersifat inkremental ini akan dapat mengurangi resiko dan biaya yang ditimbulkan oleh suasana ketidakpastian itu. Paham para pembuat keputusan sebenarnya kurang waktu, pengalaman, dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk

melakukan analisis yang komprehensif terhadap semu alternatif untuk memecahkan masakah-masalah yang ada.

Pada dasarnya, seseorang bersikap pragmatis, yakni selalu berusaha menemukan satu-satunya cara terbaik untuk mengatasi permasalahan, melainkan selalu berusaha menemukan satu-satunya cara yang terbaik untu mengatasi permasalahan, melainkan selalu berusaha menemukan cara pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan. Dengan singkat dapat dikatakan, pandangan incremental ada model pembuatan keputusan yang membuahkanhasil yang terbatas, praktis, dan dapat diterima.

c. Teori Pandangan Sekilas Campuran (*Mixed Scanning*)

Amitai Etzioni (dalam Khairi, 32) menawarkan teori lain yang mencoba menegahi kedua kecenderungan ekstrem tadi, dengan teori pandangan sekilas campuran (*Mixed Scanning Theory*). Secara garis besar, teori ini bermaksud menyarankan pengambilan keputusan secara rasional komprehensif atau inkremental, sesuai dengan keadaan. Keadaan tertentu, cara pertama (rasional komprehensif) perlu ditempuh, sedangkan pada keadaan lain, cukup ditetapkan dengan cara kedua (inkremental).

Sebagai gambaran, Etzioni 1967 (dalam Khairi, 32) menggambarkan tiga alternatif dalam observasi cuaca. Penganut pandangan rasional komprehensif akan melakukan pengamatan di semua tempat di bumi ini, secara rinci, dan hasilnya sudah tentu akan sangat mahal. Penganut pandangan inkremental akan merasa cukup mengambil pengamatan di satu tempat secara rinci, dan mengabaikan observasi di tempat-tempat lain, sehingga tidak memiliki gambaran yang bulat

mengenai situasi cuaca di dunia. Penganut pandangan sekilas campuran (mixed scanning) akan melakukan kedua-duanya. Pertama akan memonitor angkasa secara garis besar, kemudian memilih tempat-tempat khusus sebagai sampel, dan pada tiap sampel dilakukan pengamatan secara rinci. Dengan cara ini, akurasi dalam pengambilan keputusan dapat dipelihara, dapat dijaga, dan pada saat yang sama diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang keadaan cuaca dunia.

B. Implementasi Program

1. Definisi Implementasi Program

Menurut Jones dalam Rohman (2009:101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Selanjutnya Jones juga mengungkapkan bahwa implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar pengorganisasian, interpretasi dan pelaksanaan.

Pendapat lainya dari Arikunto (1998: 1) yang menjelaskan implementasi program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan bukan lagi merupakan program. Suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian maka program itu keberhasilannya dapat diukur. Memang dapat dikatakan bahwa setiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin mengetahui sejauh mana program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara

dan alat tertentu. Kegiatan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan tersebut dikenal dengan evaluasi program.

Menurut Syukur (1987:402) Implementasi program merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Menurut Terry (1977) dalam Tachjan (2006:32) implementasi program ialah :

> "*A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets*". Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget.

Menurut Jones (1991) dalam Hessel Nogi, (2003:30) implementasi program mengemukakan bahwa adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya.

Pendapat yang agak sejalan dikemukakan oleh Siagian (1985) dalam Tachjan (2006:32) bahwa, dalam penerapan program tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Sasaran yang hendak dicapai,

b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
d. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Dapat disimpulkan program merupakan serangkaian yang mengoperasikan sebuah program yang direncanakan dalam pencapaian tujuan, sasaran kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget dengan melihat pilar-pilar, interpretasi, pengorganisasian dan pelaksanaannya .

2. Unsur-unsur Implementasi Program

Menurut Syukur (1987:389), proses dalam suatu implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlah yaitu:

a. Adanya program (kebijaksanaan yang dilaksanakan)
b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan, serta
c. Unsur program baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi program selalu berhubungan dengan suatu kebijakan, karena tindakan dari suatu kebijakan dilakukan dengan adanya suatu program dikarenakan program merapakan salah satu komponen dari suatu kebijakan.

Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Penjelasan lainnya menurut Grindle (1980) dalam Tachjan (2006:33) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Kepentingan yang dipengaruhi *(interest of affected)*
b. Jenis manfaat *(type of benefit)*
c. Derajat perubahan yang diinginkan *(extent of change envisioned)*
d. Status pembuat keputusan *(site of decision making)*
e. Pelaksana program *(program implementers)*
f. Sumberdaya yang tersedia *(resources commited)*

Adapun Unsur-unsur program tersebut harus didukung dengan wujud yang bermacam-macam ditinjau dari berbagai aspek yakni tujuan, jenis, jangka waktu, luas, pelaksana, sifatnya dan sebagainya seperti yang dikemukakan Arikunto (1982: 2) sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi tujuan, terdapat program yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan (kegiatan yang bersifat komersial) dan ada yang bertujuan sukarela (kegiatan sosial). Jika programnya bertujuan komersial, ukurannya adalah seberapa banyak program tersebut telah memberikan keuntungan
b. Ditinjau dari segi jenis, ada program pendidikan, program koperasi, program kemasyarakatan, program pertanian dan sebagainya yang pengklasifikasiannya didasarkan atas isi kegiatan program tersebut.

Jenis program cenderung kurang memberikan variasi atas penilaiannya.

c. Ditinjau dari segi jangka waktu, ada program berjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk ukuran jangka waktu bagi sesuatu program sebenarnya agak relatife sesuai beberapa tahun program ditentukan.
d. Ditinjau dari segi keleluasaannya, ada program sempit yang menyangkut variabel terbatas dan program luas yang menyangkut banyak variabel.
e. Ditinjau dari segi pelaksana, maka ada program kecil yang hanya dilaksanakan oleh beberapa orang, dan program besar yang dilaksanakan oleh puluhan sampai ratusan orang.
f. Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat program penting dan program yang kurang penting. Program penting adalah program yang dampaknya menyangkut nasib banyak orang mengenai hal yang vital, sedangkan program yang kurang penting adalah sebaliknya.

3. Tahap-tahap Implementasi Program

Menurut Tachjan (2006:35) implementasi program dalam konteks kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, sebagai berikut:

a. Merancang bangun *(design)* program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu

b. Melaksanakan *(application)* program dengan mendayagunkan struktur-struktur dan personalia, dan serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat

c. Membangun sistem penjadwalan, *monitoring* dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksana.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan terarah dalam penerapannya. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program itu telah gagal dilaksanakan. Berhasil tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya, unsur pelaksana merupakan unsur ketiga dalam proses implementasi suatu program.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, Apakah suatu program terimplementasi dangan efektif atau tidak dapat diukur dengan standar penilaian yaitu pengorganisasian, intrepretasi, dan penerapan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Jones dalam Hessel Nogi (2003:32).

a. Intrepretasi yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembentuk kebijaksanaan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan. Tahap ini yaitu bagaimana menafsirkan agar program dapat menjadi rencana dan

pengarahan yang tepat dan dapat diterima sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Penorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan dan program (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasaran dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan (Wahab, 2012:91). Hal ini dapat dilihat melalui :

   1) Struktur organisasi, yang berkaitaan dengan interaksi, hirarki, tujuan, dan sifat-sifat.
   2) Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
   3) Sumber dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif.
   4) Metode kerja/prosedur kerja, yaitu berhubungan dengan sistem dan prosedur kerja yang sudah baku sehingga dapat bekerja secara terpadu dan tidak tumpang tindih serta sudah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing, sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif.

5) Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang, peraturan-peraturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara formal. Dalam hal ini organisasi harus memiliki kekuatan hukum.

6) Anggaran dana

c. Penerapan merupakan segala keputusan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan dari program.

4. Penilaian Program

Menurut T. Raka Joni (1980) dalam Arikunto (1998: 4) Perbedaan antara penilaian dan penelitian terletak pada segi tujuannya. Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas fenomena dalam arti yang seluas-luasnya, sedangkan penilaian ditujukan untuk dapat mengambil tindakan tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian bersifat *conclusion-oriented* dimana keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pada data. Tetapi dalam metode, langkah dan instrumen yang digunakan dalam penelitian dan penilaian adalah sama.

Dalam *Encyclopedia of Educational Evaluation* Anderson, et, Al, (1976) dalam Arikunto (1998: 4-5) disebutkan ciri-ciri umum penilaian, yaitu:

a. Tujuan utama penilaian pendidikan adalah menyiapkan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan tentang suatu program. Jadi, penelitian penilaian hendaknya dirancang dalam hubungannya dengan alternatif pengambilan keputusan.

b. Hasil-hasil penilaian hendaknya bermanfaat bagi pengembangan program

c. Informasi sebagai hasil penilaian hendaknya tersedia pada waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan (tidak terlalu awal atau terlambat).

d. Penilaian adalah sesuatu yang menyangkut proses pertimbangan manusia tentang hasil suatu program

e. Usaha-usaha penilaian penilaian hendaknya mempertimbangkan tujuan program, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek.

f. Tidaklah penting terlalu mempertimbangkan hasil-hasil yang kecil. Oleh karena itu sebelum mulai melangkah untuk mengevaluasi hendaknya betul-betul diadakan pembatasan mengenai apa yang akan diperhatikan.

g. Bukanlah hal yang mudah menentukan model penilaian mana yang cocok untuk program tertentu yang dinilai, terutama disebabkan karena manusia merupakan hal yang sangat kompleks.

Proses untuk memperoleh informasi untuk penilaian hendaknya memenuhi kriteria objektivitas, realibilitas, validitas, praktibilitas, utilitas dan pertanggungjawaban etis. Walaupun data yang masuk berasal dari dan terkumpul oleh seseorang namun titik pusat penilaian harus tetap pada keseluruhan program.

5. Fungsi Penilaian Program

Arikunto (1998:10) menjelaskan bahwa tujuan penilaian program, adalah mengukur keberhasilan program. Keberhasilan tersebut bukan hanya tampak dalam bentuk hasil tetapi juga diukur dari segi waktu, kelancaran, dana, tenaga dan sebagainya.

Para perencana pengelola dan pelaksana program perlu mengetahui keberhasilan dari usahanya menyelenggarakan program, terutama pihak pertama,

yakni perencana. Oleh karena pada waktu merencanakan sudah dipikirkan bahwa program tersebut akan baik, maka kadang-kadang tidak terasa bahwa yang sedang atau sudah berjalan adalah kurang baik. Lebih-lebih bagi para pelaksana apabila program itu menyenangkan. Dalam keadaan demikian penilaian ini sangat penting karena telah memberikan informasi mengenai keterlaksanaan program.

Dengan demikian maka penilaian program berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksana program agar dapat diketahui tindak lanjut dari pelaksanaan program tersebut.

6. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Program

Dalam suatu implementasi tidak semua berhujung keberhasilan, adanya implementasi gap menurut Andrew Dunsire dalam Wahab (2012:128) yaitu keadaan kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan tidak mampu dicapai ini mampu membuat hambatan-hambatan tersendiri dalam implemenatasi suatu kebijakan. Menurut Hogwood dan Gun dalam Wahab (2012:128) kegagalan implementas dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. *Non-implementation* (tidak terimplementasikan), implementasi yang tidak sesuai dengan rencana dikarenakan pihak-pihak terkait tidak mau bekerjasama, atau bekerja tidak secara efisien, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahannya diluar jangkauan sehingga hambatan-hambatan tersebut tidak mampu mereka atasi.

b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil), implementasi sudah sesuai dengan rencana namun kondisi eksternal tidak menguntungkan seperti terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya.

Selain faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terdapat juga faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, menurut Menurut Edward III dalam Widodo (2006: 98) terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik. Empat variabel tersebut antara lain *communication, resources, dispositions* dan *bureaucratic structure*.

a. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut Widodo bahwa informasi kebijakan publik tersebut harus disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan serta agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik. Adapun berbagai dimensi dalam komunikasi kebijakan, yaitu dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

b. *Resources* (Sumberdaya)

Menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2006:98) bahwa faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menngungkapkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya tersebut antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau anggaran, sumber daya peralatan atau fasilitas dan sumber daya informasi dan kewenangan.

1) Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2006:98) "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*" sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Edward III (1980) pada bagian sebelumnya menegaskan bahwa: *"No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter accuarately they are transmited, if the personel responsible for carring out policies lack resources to do and effective job, implementation will not effective"*

Jika sudah demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (apartur) yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan. Sekalipuun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sekalipun demikian, agar diperoleh efektivitas pelaksanaan

kebijakan tidak hanya mengandalkan banyak sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini ditegaskan oleh Edward III (1980) mengatakan bahwa: "*it is not enough for there to be an adeque number of implementors to carry out a policy. Implementora must posses the skill necessary for the job a hand".*

Selain itu sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan . Oleh karena itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan berlaku.

2) Sumberdaya anggaran

Menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2006:100) bahwa sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya anggaran mempengaruhi proses berjalannya suatu kegiatan atau program. Terbatasnya sebuah anggaran menyebabkan suatu pelayanan publik terhambat dalam implementasinya sehingga masyarakat tidak bisa merasakan keseluruhan pelayanan publik dari kegiatan atau program pemerintah. Hal ini dikemukakan oleh Edward III (1980) dalam Widodo (2006:100) dalam kesimpulan studinya yaitu "*Budgetary limitations, and citizen*

opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of the service that implementors can be provide to the public"

Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *incentive* sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Berkaitan dengan itu, Van Horn & Van Matter (1974) dalam Widodo (2006:100) mengemukakan *"new towns study suggest that the limited supply of federal incentivies was a major contributor to the of the failure of the program"*.

Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Berkaitan dengan hal tesebut, Edward III (1980) dalam Widodo (2006:100) menegaskan:

> *"changing the personnel ingovernment beraucracies is difficult and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors disposition is alter the disposition of implementors through the manipulation of incentives by high-level policy maker may influence their action".*

Besar kecil insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk "*rewards and punishment*". Meskipun dalam pelaksanaannya dikaui sulit seperti yang ditegaskan oleh Edward III (1980) dalam Widodo (2006:101) mengemukakan bahwa: *"Rewards are other side of the incentive coin, but they are even more difficult for executives to administer than penalties. In all*

executives and judicial branch of government, individual performance is difficult to reward with pay increases".

Bahkan insentif dapat mengarah pada terjadinya "goal displacement" para pelaku kebijakan, sebagaiman digambarkan oleh Edward III (1980) dalam Widodo (2006:101) bahwa:

> "*incentivves can be to goal displacement. Bureaucrat who are provided incentive to implement policies may begin to pursue goals others that those intended by their superior. Vague and diverse goal, poor measure of performance, and obscure implementation directives make it diffult to evaluate the success of many policies. When a criterion of success is developed for a policy, bureaucrats may attempt to beat the system by emphasizing most whatever is being measured by their superiors, independent of wetter or not their action advance the policy goal".*

Dalam kondisi seperti ini yang telah dikemukakan dapat disimpulkan behwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaaan kebijakan. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebjakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif bagi para petuugas pelayanan, manajer program dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

3) Sumberdaya Peralatan *(Facility)*

Sumberdaya peralatan Edward III (1980) dalam Widodo (2006:102) bahwa sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakn

yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan . Pernyataan yang muncul adalah bagaimana pengaruh terbatasnya fasilitas dan peralatan dalam pelaksanan kebijakan Edward II (1980) dalam Widodo (2006:102) mengumukakan bahwa:

> "Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementator may hake sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won't succeed".

Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan terbatsanya fasilitas (apalagi yan sudah lama atau kuno terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan tugas.

c. *Disposition* (Disposisi)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasi, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan (*cognitive*) dan mereka dangat mendalami dan memahaminya (*comprehension and understanding*). Penegtahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini

akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), tidak peduli (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Disposisi yang tinggi menurut Edward II (1980) dan Van Horn & Van Matter dalam Widodo (2006:104) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebiajakn ini berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetap mereka harus mampu mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan Edward III (1980) dalam Widodo (2006:105).

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Meskipun beberapa variabel diatas telah terpenuhi seperti sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya akan tetapi menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2006:106) bahwa impelementasi kebijakan bisa jadi belum efektif dikarenakan adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas kegiatan dalam menjalankan sebuah program dengan sebagus-bagusnya tidak akan lepas dari kegagalan dalam pelaksanaannya. Untuk itu dalam mengurangi dampak dari kegagalan harus direncanakan secara matang dengan berbagai pertimbangan dan nantinya bisa dipertanggungjawabkan program tersebut dan memperkecil hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi.

C. Desa Tangguh Bencana

1. Definisi Desa Tangguh Bencana

Pengertian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 merupakan desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas

kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Pasal 4 Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

a. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
b. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
d. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

2. Tujuan Desa Tangguh Bencana

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah:

a. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaran penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencanapada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

3. Komponen-Komponen Desa Tangguh Bencana

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana akan memiliki

a. Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
b. Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
c. Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
d. Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sector swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
e. Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif

sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tangggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

D. Penanggulangan Bencana Banjir

1. Pengertian Bencana Banjir

Bencana adalah suatu gangguan ekstrim fungsi dari suatu masyarakat yang menyebabkan kerugian sosial, material dan lingkungan yang menyebabkan kerugian sosial, material dan lingkungan yang meluas dan melebihi kemampuan masyarakat terdampak untuk mengatasi dengan hanya menggunakan sumber daya sendiri. Kejadian-kejadian seperti gempa bumi, banjir, dan badai, barulah menjadi bencana ketika berakibat serius atau mempengaruhi kehidupan manusia, mata pencaharian dan harta benda. Suatu peristiwa bahaya (misalnya gempa bumi, banjir atau angin topan) menjadi bencana ketika ada yang cedera, kehilangan nyawa dan mata pencaharian, serta kerusakan infrasturktur dan properti umum Ulum (2014:10). Pengertian bencana lainnya sesuai peraturan Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Ulum (2014:10), bahwa yang dimaksud bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan dari definisi bencana merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik nyawa manusia, kerusakan lingkungan hingga kerugian harta benda maupun fasilitas dari pemerintah. Kerugian dari bencana juga menyebabkan kelumpuhan sarana perekonomian masyrakat sehingga menyebabkan kerugian mata pencarian.

Bencana Banjir adalah salah satu bencana yang sering dialami oleh masyarakat ketika memasuki musim hujan berkepanjangan. Bencana banjir bisa disebabkan faktor manusia atau faktor alam, bencana tersebut bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang terdampak baik dari kerugian harta benda, kehilangan sumber mata pencaharian hingga kehilangannya nyawa atau terganggunya psikologis akibat trauma memasuki musim hujan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bakornas PB (2007:20), korban manusia dan kerusakan pada harta benda dan prasarana umum diuraikan sebagai berikut:

a) Manusia

    1) Jumlah penduduk yang meninggal dunia.
    2) Jumlah penduduk yang hilang.
    3) Jumlah penduduk yang luka-luka.
    4) Jumlah penduduk yang mengungsi.

b) Prasarana Umum

    1) Prasarana transportasi yang tergenang, rusak dan hanyut, diantaranya: jalan, jembatan dan bangunan lainnya; jalan KA, setasiun KA, terminal bus, jalan akses dan kompleks pelabuhan.
    2) Fasilitas sosial yang tergenang, rusak dan hanyut diantaranya: sekolah, rumah ibadah, pasar, gedung pertemuan, Puskemas, Rumah Sakit, Kantor Pos, dan fasilitas sosial lainnya.
    3) Fasilitas pemerintahan, industri-jasa, dan fasilitas strategis lainnya: kantor instansi pemerintah, kompleks industri, kompleks perdagangan,

instalasi listrik, pembangkit listrik, jaringan distribusi gas, instalasi telekomunikasi yang tergenang, rusak dan hanyut serta dampaknya, misal berapa lama fasilitas-fasilitas terganggu sehingga tidak dapat memberikan layanannya.

4) Prasarana pertanian dan perikanan: sawah beririgasi dan sawah tadah hujan yang tergenang dan puso (penurunan atau kehilangan produksi), tambak, perkebunan, ladang, gudang pangan dan peralatan pertanian dan perikanan yang tergenang (tergenang lebih dari tiga hari dikategorikan rusak) dan rusak (terjadi penurunan atau kehilangan produksi) karena banjir.
5) Prasarana pengairan: bendungan, bendung, tanggul, jaringan irigasi, jaringan drainase, pintu air, stasion pompa, dan sebagainya.

c) Harta Benda Perorangan

1) Rumah tinggal yang tergenang, rusak dan hanyut.
2) Harta benda (aset) diantaranya modal-barang produksi dan perdagangan, mobil, perabotan rumah tangga, dan lainnya yang tergenang, rusak dan hilang.
3) Sarana pertanian-peternakan-perikanan: peternakan unggas, peternak hewan berkaki empat, dan ternaknya yang mati dan hilang. Perahu, dermaga dan sarana perikanan yang rusak dan hilang.

2. Karakteristik Banjir

Karekteristik bencana banjir menurut Bakornas PB (2007:17) berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori yaitu :

a. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia.
b. Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai.
c. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, bendung, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir.

d. Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai.

Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang. Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Datangnya banjir diawali dengan gejala-gejala sebagai berikut (Bakornas PB, 2007:19):

a. Curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama merupakan peringatan akan datangnya bencana banjir di daerah rawan bencana banjir.
b. Tingginya pasang laut yang disertai badai mengindikasikan akan datangnya bencana banjir beberapa jam kemudian terutama untuk daerah yang dipengaruhi pasang surut.
c. Evakuasi dapat dimulai dengan telah disamai atau dilampuinya ketinggian muka banjir tertentu yang disebut muka banjir/air ”siaga”. Upaya evakuasi akan efektif jika dilengkapai dengan sistem monitoring dan peringatan yang memadai.

Dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir, yaitu bangunan-bangunan menjadi rusak atau hancur yang disebabkan oleh daya terjang air, terseret arus banjir, daya kikis genangan air, longsornya tanah di seputar atau dibawah pondasi, tertabrak oleh benturan dengan benda-benda berat yang terseret arus. Kerugian fisik cenderung lebih besar jika letak bangunan di lembah-lembah pegunungan dibandingkan di dataran rendah terbuka.

3. Tahap-Tahap Penanggulangan Bencana Banjir

Menurut Helsloot dan Ruintenberg (2004) dalam Purnomo dan Sugiantoro (2010:86) ada tiga tahapan dalam bantuan penanggulangan, yaitu tahap peringatan, tahap gawat darurat (tindakan pertolongan, bantuan medis, rumah sementara), dan tahap pemulihan atau pembangunan kembali. Sedangkan menurut Wolensky (1990) dalam Purnomo dan Sugiantoro (2010:87) membedakan tahapan bantuan menjadi empat tahap, yaitu tahap sebelum bencana (*mitigation and preparedness planning*), tahap tanggap darurat (*immediate pre and post impact*), tahap pemulihan jangka dekat (dua tahun), dan tahap pemulihan jangka panjang (10 tahun).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa siklus atau tahapan bantuan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

a. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

b. Mitigasi (*mitigation*) adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

c. Tanggap darurat (*response*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

d. Rehabilitasi/Pemulihan (*rehabilitation/recovery*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

e. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Dari penjelasan diatas ada beberapa tahap-tahap dalam penanggulangan yaitu kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabillitasi/pemulihan rekonstruksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti, maka jenis penelitian yang diambil peneliti adalah deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan secara terinci mengenai keadaan yang ada di masyarakat. Metode penelitian deskriptif menurut Zuriah (2009:47) adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian yang secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu dan dalam penelitian ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan memahami data lebih dalam. Menurut Sugiyono (2015:13) metode penelitian kualitatif ini bersifat seni (kurang berpola), dan disebut juga metode interpretatif karena data hasil penelitian merupakan penjabaran intreprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Jadi, melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan, menguraikan, membahas permasalahan yang terjadi dan kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan mengenai Implementasi Program Desa Tangguh Dalam Penanggulangan Banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan .

B. Fokus Penelitain

Menurut Moleong (2012:94) penetapan fokus penelitian memiliki 2 (dua) maksud atau tujuan, yaitu:

1. Membatasi studi, dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang atau cara pandang terhadap hal-hal baru misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan, dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seseorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan mengacu pada rumusan masalah, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Implementasi Program Desa Tangguh Dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan yang mencakup periode dari Prabencana, Tanggap Darurat, hingga Pascabencana. Berdasarkan implementasi program dapat diukur dengan standar penilaian yaitu
   a. Interpretasi
   b. Pengorganisasian yang dimaksudkan dalam menyelenggarakan kegiatan
      1) Sumberdaya manusia yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

2) Sumberdaya peralatan,sarana dan prasarana;

3) Sumberdaya anggaran

4) Perangkat hukum,

c. Penerapan/pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir

2. Faktor-faktor yang menjadi tantangan ke depan Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

3. Upaya Alternatif yang diambil agar tidak terjadi banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi utama dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah di wilayah Desa Kedawungkulon. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena peneliti melihat wilayah Desa Kedawungkulon merupakan salah satu desa yang menjadi langganan banjir di Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian yaitu merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun situs penelitian ini adalah Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kecamatan Grati, Desa Kedawungkulon, dan Masyarakat sekitar Desa Kedawungkulon.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2012:157), "Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain". Berkaitan dengan hal ini pada proses pengumpulan data di lapangan, peneliti memperoleh data dari seseorang atau yang dapat dijadikan narasumber data karena lebih dianggap menguasai bidang permasalahan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan jenisnya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

   Data primer Menurut Sarwono (2006:209) adalah data berupa teks hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi pengamatan atau observasi secara langsung dan wawancara dengan :

   a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sugeng selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Tanggap Darurat.
   b. Desa Kedawungkulon yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Bapak HM. Sugyarto, Sekertaris Desa Bapak Adi Hamsah, dan Dibidang Koordinator Lapangan Bencana (Trantip) Ketentraman Keamanan dan Ketertiban Desa Bapak Badaru Shamsih.

c. Pihak Swasta Perusahaan Pabrik Gula dalam hal ini diwakili oleh Bapak Frengky dan Bapak Sony selaku masyarakat.

d. Masyarakat

2. Data sekunder

Data sekunder menurut Sarwono (2006:209) adalah data sekunder yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah data-data dari BPBD Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Grati dan Desa Kedawungkulon, seperti:

a. Denah lokasi,

b. Dokumentasi kegiatan berupa foto, video dan

c. Laporan resmi kegiatan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mencari dan memperoleh data. Menurut Catrherin Marshall dan Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2015:309) bahwa dalam penelitian data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta pada wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data-data yang terkait dengan Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir dan kemudian diolah menjadi sebuah

informasi lalu dipaparkan sebagai sebuah hasil penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi.

   Menurut Sarwono (2006:224) bahwa kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini pengamatan dilakukan pada sekitar desa tangguh bencana yang terdapat di Desa Kedawungkulon dan yang terkait dengan penelitian dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian ini

2. Wawancara.

   Keunggulan utama wawancara menurut Sarwono (2006:224) adalah memungkinkan peneliti mendapatkan data yang banyak. Sebaliknya yang menjadi kelemahannya adalah wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan

3. Dokumentasi

   Metode yang dilaksanakan dengan cara mempelajari, mencatat, dan membuat fotokopi dokumen yang terkait program Desa Tangguh Bencana. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:217), Dokumen digunakan dalam penelitian karena sebagai sumber data, dapat digunakan sebagai bukti dalam pengkajian yang sifatnya alamiah sesuai dengan konteks dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti

mengumpulkan data dari BPBD Kabupaten Pasuruan, Desa Kedawungkulon yaitu dengan cara mencari data yang sifatnya tertulis seperti struktur organisasi, laporan-laporan terkait pelaksanaan program, deskripsi wilayah dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Zuriah (2009:168) Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2015:306).
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), instrumen ini dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data dibutuhkan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan mengenai Implementasi Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir Studi Di Desa Tangguh Bencana Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.
3. Catatan lapangan (*field note*), yaitu berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi utama selama peneliti melakukan observasi.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2012:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah yang menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensikannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2013:12), analisis metode interaktif terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan / verifikasi Seperti dalam gambar dan berikut penjelasannya:

1. *Data Collection* (pengumpulan data)

   Pengumpulan data mengacu pada pengumpulan data yang berasal dari wawancara, dokumentasi dari sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

2. *Data Condensation* (kondensasi data)

   Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara

seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

3. *Data display* (penyajian data)

   Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah di kerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.

4. *Conclusion drawing/verification* (pengambilan kesimpulan)

   Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterprestasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.

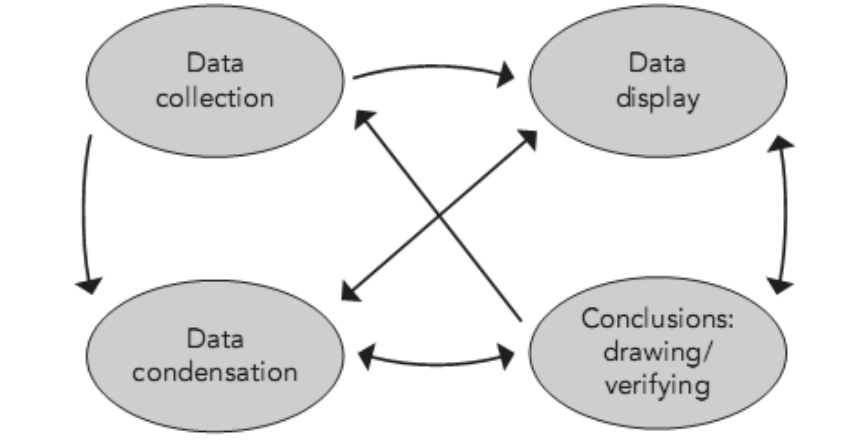

Gambar 3.1 : ***Component of Data Analysis (Interactive Model)***
Sumber : *Miles, Huberman, and Saldana* (2013:14)

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Menurut Sugiyono (2015: 365 - 378) keabsahan data meliputi:

1. Uji Kredibilitas

   Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan terjun kembali ke situs penelitian untuk menentukan lagi apakah data yang telah didapatkan sebelumnya merupakan data yang valid.

2. Uji Transferability

Uji transferability dalam penelitian kualitatif peneliti dalam membuat laporan dari hasil penelitiannya tersebut, harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Uji Dependability

   Uji Dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Seiring terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan,, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji depenabilitynya. Kalau proses pene;itain tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Konfirmability

   Uji Konfirmability dalam penelitian kualitatif, mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses ada tetapi hasilnya ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

a. Letak Administrasi dan Geografis

Kabupaten Pasuruan terletak antara 112°30'-113°30' Bujur Timur - 8°30' Lintang Selatan dengan Luas wilayah sebesar ± 1.474,02 Km^2. Wilayah ini secara ekonomi mempunyai letak strategis karena merupakan persimpangan jalan dari Surabaya-Probolinggo. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan serta memiliki 365 desa/kelurahan yang terklasifikasi menjadi 120 perkotaan dan 245 perdesaan **(Gambar 4.1).** Secara geografis Kabupaten Pasuruan memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Pasuruan Sidoarjo dan Selat Madura
Sebelah Selatan	: Kabupaten Malang
Sebelah Timur	: Kabupaten Probolinggo
Sebelah Barat	: Kabupaten Mojokerto

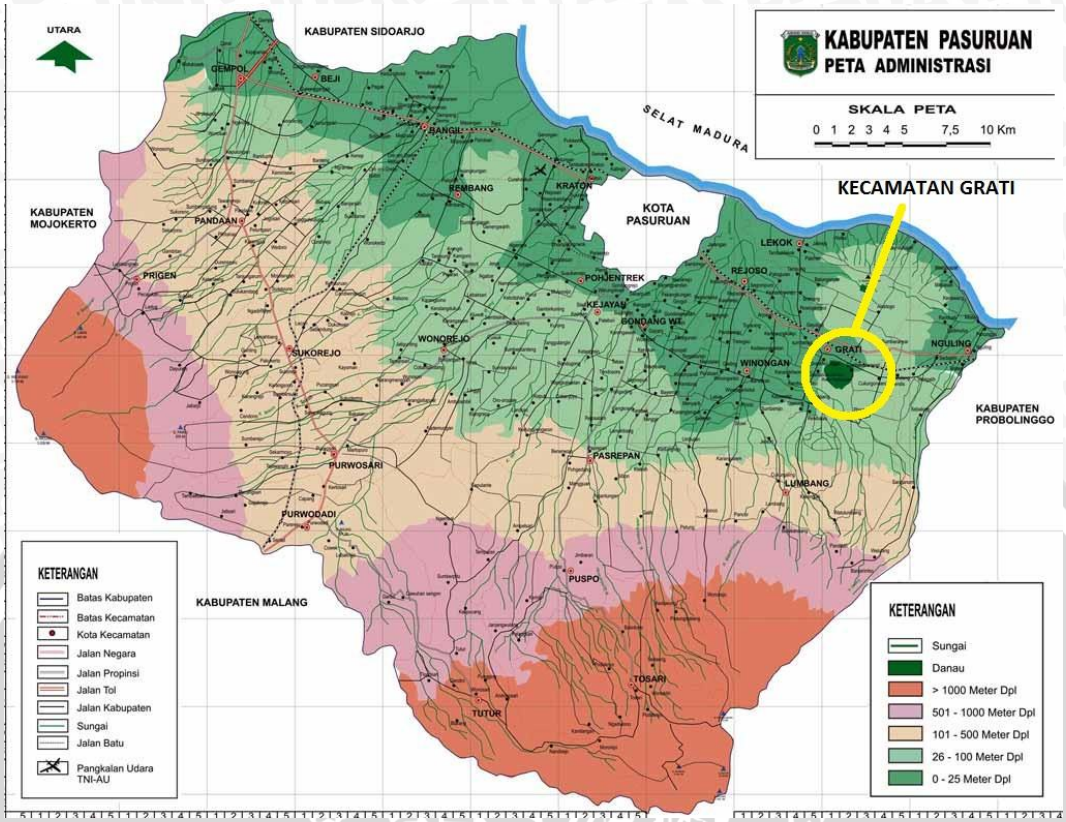

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pasuruan
Sumber : www.pasuruantourism.com

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
1	Purwodadi	102,46	13	Gempol	64,92
2	Tutur	66,30	14	Beji	39,90
3	Puspo	58,35	15	Bangil	44,60
4	Tosari	98,00	16	Rembang	42,52
5	Lumbang	125,55	17	Kraton	50,75
6	Pasrepan	89,95	18	Pohjentrek	11,88
7	Kejayan	79,15	19	Gondangwetan	26,25
8	Wonorejo	47,30	20	Rejoso	37,00
9	Purwosari	59,87	21	Winongan	45,97
10	Prigen	121,90	**22**	**Grati**	**50,78**
11	Sukorejo	58,18	23	Lekok	46,57
12	Pandaan	43,27	24	Nguling	42,60
Jumlah					**1.474,02**

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan dalam Laporan Rencana Kontijensi Banjir dan Sungai Rejoso Kabupaten Pasuruan, 2016

Berdasarkan letak geografisnya, wilayah daratan Kabupaten Pasuruan secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) 180-3000 mdpl, daerah ini membentang di bagian selatan dan barat meliputi Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Tutur, Purwodadi, Prigen, dan Gempol.
2) Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6 – 91 mdpl, yaitu daerah yang membentang di bagian tengah dan merupakan daerah yang subur, serta
3) Daerah pantai dengan ketinggian antara 2 – 8 mdpl, daerah ini membentang di bagian utara meliputi kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, Kraton dan Kecamatan Bangil.

b. Kondisi Topografi

Sedangkan berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi :

1) Wilayah pantai dengan ketinggian 0 – 12,5 mdpl seluas 18.819,04 Ha atau 12,77% dari luas wilayah.
2) Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 12,5 – 500 mdpl seluas 80.169,44 Ha atau 54,39% dari luas wilayah.
3) Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500 – 1000 mdpl seluas 21.877,17 Ha atau 14,84% dari luas wilayah.
4) Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1000 – 2000 mdpl seluas 18.615,08 Ha atau 12,63% dari luas wilayah.

5) Wilayah dengan ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 Ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah.

Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki daerah dataran maupun pegunungan dengan ketinggian dari 0-1.000 mdpl. Kecamatan Rejoso, Lekok, Grati, Winongan dan Gondangan Wetan diketahui terletak pada ketinggian yang relatif rendah dan terdapat bagian yang cekung sehingga berpotensi menghentikan aliran air laut (Sumber: Laporan Akhir Rencana Kontijensi Banjir Das Rejoso Kabupaten Pasuruan, 2016).

c. Kondisi Hidrologi

Terdapat 7 sungai yang mengalir di Kabupaten Pasuruan, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan, Sungai Kedunglarangan dan Sungai Petrung. Sungai yang mengalir di Kabupaten Pasuruan dan bermuara di Selat Madura yaitu:

1) Sungai Laweyan : bermuara di Desa Penunggul-Kecamatan Nguling
2) Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
3) Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
4) Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto-Kecamatan Kraton
5) Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci- Kecamatan Bangil

Sungai-sungai tersebut pada umumnya rawan terhadaap bencana banjir karena terdapat pendangkalan. Pendangkalan diakibatkan oleh tingginya sendimentasi pada badan sungai yang diakibatkan oleh rusaknya lahan sebagai akibat dari penggundulan hutan, penambangan pasir dan perubahan guna lahan di

wilayah hulu sungai-sungai. Sungai yang ada di Kabupaten Pasuruan terdekat Desa Kedawungkulon adalah Sungai Rejoso

d. Karakteristik Sungai Rejoso

Sungai Rejoso adalah salah satu sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Pasuruan yang bermuara di Selat Madura tepatnya berlokasi di Kecamatan Rejoso. Sungai Rejoso termasuk kedalam 8 DPS (Daerah Pengaliran Sungai) yang berada di Kabupaten Pasuruan, selain DPS Kali Kamben, DPS Kedung Larangan, DPS Kali Raci, DPS Kali Welang, DPS Kali Petung, dan DPS Kali Laweyan. Sungai Rejoso mempunyai *catchment area* yang lebih kecil jika dibandingkan dengan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan , yang disebabkan oleh panjang Sungai Rejoso yang lebih pendek, dan debit aliran dan sebit aliran besar serta cepat sampai ke hilir. Hal inilah yang menyebabkan banjir pada muara Sungai Rejoso.

Sungai Rejoso terkategori sungai perenial, yaitu sungai yang selalu mempunyai aliran sepanjang tahun, namun perbedaan antara debit terbesar di musim hujan dan debit kecil di musim kemarau sungai sangat besar. Elevasi permukaan air di sungai sangat tinggi bahkan debitnya pada saat musim penghujan melampaui tanggul hingga meluap ke daerah sekitarnya dan menimbulkan banjir terutama di daerah hilir. Kondisi tersebut terjadi banjir hampir setiap tahun di musim penghujan.

e. Sejarah Kejadian Banjir Luapan Sungai Rejoso

Banjir Sungai Rejoso dari tahun 2007 hingga 2011 menerangkan bahwa bangunan, seperti parapet, dam, dan tangkis tidak mampu menahan besarnya air

penyebab banjir sehingga mengakibatkan adanya wilayah yang terdampak banjir Sungai Rejoso, yaitu Kecamatan Rejoso (meliputi Desa Jarangan, Sambirejo, Patuguran, Rejoso Lor, Kemantenrejo, Arjosari, Toyaning, Padanrejo dan Kategan), Kecamatan Lekok (meliputi Desa Tambaklekok), Kecamatan Grati (meliputi **Desa Kedawungkulon**, Kedawungwetan dan Karangkliwon), Kecamatan Winongan (meliputi Desa Gading, Mendalan, Winongan Lor, Bandaran, Penataan, Winongan Kidul, Menyarik, Prodo, Lebak, Sruwi, Sidepan dan Umbulan) dan Kecamatan Gondang Wetan (meliputi Desa Bayeman). Kecamatan Rejoso, Lekok, Grati, Winongan dan Gondang Wetan secara geografis terletak di bagian utara Kabupaten Pasuruan dengan kondisi topografi wilayah berada pada ketinggian 0-100 mdpl yang tergolong dalam dataran rendah, sehingga sangat berpotensi terdampak bencana banjir ketika musim penghujan. Menurut RTRW Kabupaten Pasuruan 2009-2029, ketiga kecamatan tersebut juga termasuk ke dalam rawan bencana banjir.

Data riwayat kejadian banjir luapan sungai tersebut menjadi dasar sebelum dilakukan survei. Pada data kejadian banjir tahun 2007-2011 memberikan informasi bahwa kejadian banjir terjadi sore menjelang malam hari. Karena kejadian bencana adalah berupa siklus yang dapat terulang kembali, maka waktu kejadian tersebut menjadi pertimbangan dalam pengembangan skenario kejadian banjir (LaporanAkhir Rencana Kontijensi Banjir DAS Rejoso,2016)

f. Penduduk terpapar banjir luapan DAS Rejoso

Banjir luapan Daerah Aliran Sungai Rejoso berdampak hingga menggenangi pemukiman, sehingga terdapat penduduk pada pemukiman tersebut

yang mengalami dampak banjir. Adapun penduduk dibedakan berdasarkan tingkat ancamannya, yaitu penduduk terancam bencana banjir pada tingkat ancaman tinggi, sedang, rendah. Penduduk terpapar pada tingkat ancaman tinggi paling banyak terdapat di Kecamatan Rejoso, yaitu 1984 jiwa. Hal tersebut karena Kecamatan Rejoso memiliki wilayah ancaman banjir terluas di banding kecamata lainnya. Skenario dampak terhadap penduduk (**Tabel 4.2**) sesuai Laporan Akhir Rencana Kontijensi Banjir DAS Rejoso Kabupaten Pasuruan 2016 selain mengetahui kuantitasnya, berfungsi untuk menghitung jumlah pelaksanaan tanggap darurat.

Tabel 4.2 Penduduk Terpapar Banjir Luapan DAS Rejoso

Nama Kecamatan	Nama Desa	Tingkat Ancaman			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Kecamatan Gondang Wetan	Desa Bayeman	734	296	50	1080
Kecamatan Grati	Desa Karangkliwon	11	0	0	11
	Desa Kedawungkulon	**1194**	**579**	**1058**	**2831**
	Desa Kedawungwetan	306	168	181	655
Kecamatan Lekok	Desa Tambaklwkok	157	93	0	250
Kecamatan Rejoso	Desa Arjosari	1059	488	903	2450
	Desa Jarangan	1740	1130	1705	4575
	Desa Kategan	552	666	779	1997
	Desa Kemantrenrejo	118	0	0	118
	Desa Pandanrejo	382	233	73	689
	Desa Patuguran	1626	938	1373	3937
	Desa Rejoso Lor	1372	956	1153	3481
	Desa Sambirejo	940	761	1387	3088
	Desa Toyaning	1527	1444	1810	4781
Kecamatan Winongan	Desa Bandaran	513	376	597	1476
	Desa Gading	963	680	820	2463
	Desa Lebak	935	256	205	1396
	Desa Mendalan	507	434	618	1559
	Desa Menyarik	809	384	419	1612
	Desa Penataan	774	369	89	1232
	Desa Prodo	310	194	274	778
	Desa Sidepan	1034	0	0	1034
	Desa Sruwi	107	0	0	107
	Desa Umbulan	153	0	0	153

	Desa Winongan Kidul	280	126	276	682
	Desa Winongan Lor	701	323	583	1607
Total		**18804**	**10894**	**14344**	**44042**

Sumber : Laporan Rencana Kontijensi Banjir dan Sungai Rejoso Kabupaten Pasuruan, 2016

2. Gambaran Umum Desa Kedawunngkulon

a. Letak Administrasi dan Geografis

Desa Kedawungkulon secara administratif masuk Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Kedawungkulon memiliki luas 1.604,316 ha dan termasuk dalam daerah Tingkat II di wilayah Propinsi Jawa Timur yang terluas, yaitu sekitar 225.360,840 Ha. Dilihat dari Batas Kabupaten Pasuruan adalah sebelah timur dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan Kabupaten Malang, sebelah barat dengan Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan laut. Kecamatan Grati sendiri memiliki 15 desa yakni Kedawung Wetan, Karang Kliwon, Kambingan, Kalipang, Poloso Sari, Sumberdaee Sari, Cukur Gondang, Rebalas, Grati Tunon, Ranu Kindungan, Trewong, Sumber Agung, Kebon Pero, Karang Lo dan Kedawungkulon.

Sebuah desa yang terletak di dataran rendah yang bersifat cekung di sebelah timur Kabupaten Pasuruan yang apabila terjadi hujan yang terus menerus terutama di daerah atas Desa Kedawungkulon pada saat laut pasang maka air sungai tidak akan dapat sampai di muara sehingga mengakibatkan air sungai meluap di Desa Kedawungkulon dan mengakibatkan banjir. Secara geografis Desa Kedawungkulon memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso

Sebelah Timur : Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati

Sebelah Barat : Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso

Sebelah Selatan : Desa Winongan Lor, Kecamtan Winongan

Jarak desa Kedawungkulon ini kurang lebih 11 km dari ibukota Kabupaten Pasuruan dan 5 km dari Kecamatan Grati. Transportasi dari Pasuruan dapat ditempuh jalan darat menggunakan kendaraan roda 4 atau 2, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit.

Wilayah administratif desa dibagi dalam 6 Dusun, 9 Rukun Warga (RW), 31 Rukun Tetangga yaitu: Dusun Kedawung, Dusun Magersari, Adirogo, Joyo Mulyo, Tugu dan Kebruan.

Berdasarkan letak Geografisnya Desa Kedawungkulon merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah sekitar 272,024 hektar. Jumlah penduduk pada akhir tahun 2013 sejumlah 5.756 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sudah mencapai 1.000 lebih jiwa, memiliki jarak orbitasi dengan Kecamatan sekitar 5 km, 11 km dari wilayah ibukota kabupaten 43 km dari wilayah ibukota provinsi dengan fasilitas jalan propinsi dan jalan kabupaten cukup memadai.

b. Keadaan Iklim

Jumlah bulan hujan di Desa Kedawungkulon 6 bulan dengan curah hujan 2000-3000 mm/thn**,** Suhu rata-rata 25-33°C**.** Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan dan Kantor Meterorologi dan Geofisika Pasuruan, curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Juli

sebanyak 2 hari, sedangkan pada bulan Agustus tidak terjadi hujan. Suhu maksimum 33°C terjadi pada bulan Mei, suhu minimum 25°C terjadi pada bulan September.

c. Kondisi Fisik Desa

1) Topografi

Topografi umum Desa Kedawungkulon, keadaan alam dikelilingi oleh dataran tinggi yang bergunung-gunung dan di sebelah selatan adalah hutan produksi dengan jenis pinus dengan daerah yang dikenal selalu kekurangan air pad sat musim kemarau. Keadaanya berbukit-bukit, terdapat sungai di atas tanah dan sumber mata air serta dapat digali sumur dengan kedalaman rata-rata 20 m-30m. jenis tanah zone in adalah vulkanis laterit, sedangkan batuan induknya berupa dasiet. Tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup dengan baik di sini adalah tanaman keras seperti jati, sonokeling, akasia, mahoni, tanaman buah-buahan,cengkeh, mlinjo serta palawija. Tinggi tempat dari permukaan laut 8 mdpl dengan bentang wilayah dataran dan topografinya termasuk dataran rendah.

2) Luas tanah desa

Luas Wilayah Menurut Penggunaan	:
Luas Pemukiman	: 45,300 Ha
Luas Perkebunan	: 30 Ha
Luas Kuburan	: 1,444 Ha
Luas Perkantoran	: 1,790 Ha
Luas Prasarana umum lainnya	: 0,05 Ha
Luas Industri	: 8,654 Ha
Luas Tempat Ibadah	: 1,500 Ha
Luas Sawah Masyarakat	: 159,787 Ha
Luas Tegalan	: 18,720 Ha

3) Akses dan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)

Saran perhubungan dan transportasi sudah menggunakan jalan desa yang sudah diaspal dengan kondisi lumayan baik namun beberapa titik jalan rusak akibat tanah banjir.

a. Jalan Desa : 3,5 km
   Jalan desa yang rusak akibat banjir : 3 titik, panjang 100 m
b. Jalan Kabupaten : 2 km
c. Jembatan Desa
   Jumlah jembatan betom : 2 buah
d. Jemabatan antar desa/kecamatan
   Jumah jembatan besi : 1 buah

d. Sejarah Desa Kedawungkulon

Menurut beberapa keterangan masyarakat yang sedikit banyak tahu dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat Desa Kedawungkulon mengenai asal muasal berdirinya desa ini, bahwa desa dan dusun di Kecamatan Grati ini dimulai sejak penjajahan Kolonial Belanda akan tetapi pemberian nama desa ini tidak ada yang mengetahuinya.

Berbagai cerita ditemukan dari masyarakat pada saat Belanda menguasai Indonesia, disalah satu desa di Kecamatan Grati terdapat banyak tanaman Kedawung dan jenis tanaman ini banyak di konsumsi oleh masyarakat sekitar sebagai jamu tradisional dan cemilan. Batang pohon yang lebih kuat dan besar dari pohon petai dijadikan sebagai bahan bangunan pada pabrik gula. Dalam pembangunan pabrik gula ini banyakmenggunakan tenaga manusia yang rata-rata kaum pribumi yang tidak beruntung dari situlah masyarakat membei nama desa Kedawung.

Pabrik gula yang sudah mulai produksi untuk mengangkut tebu digunakanlah sejenis kereta api yang diberi nama Lori. Banyaknya lori-lori yang

mengantri ke pabrik gula terlihat seperti pagar yang panjang dan menyebabkan masyarakat susah untuk menyebrang jalan, maka lokasi tersebut di beri nama Magersari oleh masyarakt sekitar yang merupakan salah satu dusun di Desa Kedawungkulon. Mager diartikan Pagar, Sah diartikan Susah ndak lewat dan Ri yaitu Sering banyaknya lori berjajar

Disalah satu wilayah terdapat sebuah pondok pesantren yang diasuh oleh seorang Kyai yang bernama Mbah Abu Dzarin yang dipercaya memiliki kesaktian yang mumpuni, yang salah satu menjadi santrinya Khai Kholil Bangkalan. Melihat agam islam semakin berkembang menimbulkan kebencian bagi Kolonial Belanda. Belanda dan para anteknya mulai mengganggu pondok pesantren dengan dalih perluasan wilayah.

Kyai Mbah Abu Dzarin bersama santrinya melihat perbuatan Belanda tersebut tidak terima dan ingin mempertahankan wilayahnya, maka dibangunlah sebuah pertahanan dari batu yang menyerupai benteng setinggi 12 meter tetapi lebih terlihat tugu, letakny dengan sebuah kali winongan, maka oleh masyarakt saat itu diberi nama dusu Tugu.

Di sebelah barat dan sebelah timur persawahan terdapat sebuah lonceng dalam bahasa jawa disebut kenteng, sehingga pada saat Belanda melakukan penyerangan para santri yang menjaga di tugu memberikan komando untuk membunyikan lonceng sehingga para santri dapat waspada. Oleh karenanya nama tempat lonceng tersebut diberi nama Blok Kenteng Wetan dan Blok Kenten Kulon.

Kyai Mbah Abu Dzarin sangat ditakuti oleh pasukan Belanda menurut cerita masyarakat yang berkembang ketika Mbah Abu Dzarin menggelengkan kepalanya dari jarak 20 meter, maka musuh-musuh berjatuhan. Dari peristiwa itu, diberilah nama dusun tempat tentara Belanda tewas dengan nama dusun Kebrukan

Para santri mbah abu dzarin juga pemberani dan pantang menyerah walaupun dalam persenjataan dalam perlindungan diri minim bila dibandingkan senjata belanda yang sudah modern. Dengan senjata clurit, pedang, ketepal, panah dan bambo mereka melakukan perlawanan yang dinamakan adurogo, maka munculah nama dusun yang menjadi saksi keberanian para santri yang diberi nama dusun Adirogo.

Belanda memiliki strategi dalam berperang, salah satu strategi politik yang digunakan untuk memmecah kekuatan para pejuang pribumi yaitu Politik *Devide Et Impera*. Politik ini dilakukan dengan membagi wilayah menjadi dua, yaitu Kedawung Wetan yang dipimpin oleh petinggi yang bernama Suparto dan Kedawungkulon yang dipimpin oleh petinggi yang bernama Sumantri, hingga saaat ini kedua desa masih ada.

Tabel 4.3: Nama-nama Kepala Desa Kedawungkulon dan periodenya

No.	Nama Kepala Desa	Periode Kepemimpinan	Sebutan
1.	Sumantri	-	Kepala Desa
2.	Wongso Kenrtoroharjo	1963 – 1993	Kepala Desa
3.	Abd.Rahman Yahya	1993 – 2001	Kepala Desa
4.	Surono	2001-2008	Kepala Desa
5.	Sugiarto	2008-2016	Kepala Desa
6.	Sugiarto	2016-2021	Kepala Desa

Sumber : Rencana Kontijensi Desa Kedawungkulon, 2014

3. Gambaran Umum Pelaku Kegiatan Desa Tangguh Bencana

a. Gambaran Umum BPBD Pasuruan

Visi daari BPBD yang berisi terwujudnya masyarakat yang Tanggap dan Tangguh dalam menghadapi Bencana. Penjelasan Visi BPBD Kabupaten Pasuruan

Tanggap : Respon cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yang dengan segera pada saat kekjadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan, pengusian, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Tangguh : Suatu kondisi yang memiliki kemampuan beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana secara mandiri serta tetap mempertahankan kelangsungan hidup dan mewujudkan kesejahteraan, bahkan pada saat bencana mampu memulihkan diri dengan cepat dan memiliki daya penting setelah tertimpa bencana.

Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Misi : 1) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulan bencana yang

handal.

3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, cepat, tepat, akurat, valid dan akuntabel.

b. Kelompok Masyarakat Penangggulangan Bencana (KMPB)

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Masyarakat Penangggulangan Bencana (KMPB)

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok masyarakat penanggulangan bencana (KMPB)

a. Mengikuti pelatihan dan pendidikan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.
b. Membuat/menyusun perencanaan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya.
c. Mengkoordinasikan elaksanaan kegiatan Penanggulangaan Bencana secara terpadu.
d. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan berkelanjutan.
e. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat, serta instansi-instansi terkait.

2) Gambaran Umum Forum Pengurangan Resiko Bencana (FRPB) Desa Kedawungkulon

Visi dari Forum Pengurang Resiko Bencana (RPB) Desa Kedawungkulon. "Forum PRB Kedawungkulon yang peduli, tanggap dan selalu siap bergotong royong dalam penanggulangan bencana berdasarkan kemanusiaan dan nilai luhur yang menjadi budaya masyarakat" dengan mempunyai misi sebagai berikut:

a) Mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi pengembangan budaya pencegahan , melalui advokasi dan penumbuh kembangan kesadaran dan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana
b) Memfasilitasi pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
c) Menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menganalisa berbagai ancaman bencana
d) Menjadi wadah kerjasama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan
e) Memberikan sumbangan pemikiran tentang penguranga resiko bencana melalui upaya yang terpadu dan terkoordinasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi dan pengambilan keputusan pembangunan kepada Pemerintahan Desa.
f) Mengembangkan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun partisipasi masyarakat.
g) Selalu meningkatkan SDM serta merintis relawan baru secara berkesinambungan terutama bagi pemuda Desa Kedawungkulon

h) Senantiasa memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat Desa Kedawungkulon untuk berfikir bijak dalam menghadapi bencana serta cepat bangkit ketika terkena musibah/bencana.

i) Mewujudkan Desa Kedawungkulon menjadi Desa Tangguh Bencana

Tujuan dibentuknya Forum PRB adalah sebagai berikut:

a) Konsolidasi dan mengkoordinasikan kegiatan penangan pengurangan risikp bencana ke Pemerintahan Desa dan BPBD Kabupaten serta seluruh komunitas di Desa Kedawungkulon.

b) Untuk mendorong kerjasama antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di Desa Kedawungkulon.

c) Memprioritaskan program pengurangan risiko bencana secara partisipatif dalam perencanaan, kebijakan, dan program-program pembangunan di Desa Kedawungkulon.

d) Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antara pemangku kepentingan di Desa Kedawungkulon, sehingga Desa Kedawungkulon menjadi Desa Tangguh Bencana.

e) Mendorong partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, para pengambil keputusan, perencanaan dan pelaku pembangunan.

f) Menjadikan wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, fakta/kenyataan untuk pembelajaran atau hikmah dari berbagai kejadian melalui media.

g) Memfasilitasi program kegiatan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan.

h) Membangun dan meningkatkan hubungan kerja sama antar pelaku pengurangan risiko bencana di tingkat desa sampai tingkat internasional (global).

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Kedawungkulon

a. Interpretasi

Interpretasi yang dimaksud disini ialah bagaimana menafsirkan agar program dapat menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Program ini adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai bagian dalam upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentan Pedoman Desa Tangguh Bencana.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan dua desa sebagai Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati dan Desa Wonokitri Kecamatan Tosari. Dua desa tersebut dipilih karena rawan bencana khusus Desa Kedawungkulon rawan bencana banjir dan Desa Wonokriti rawan tanah longsor. Peneliti akan memfokuskan pada Desa Kedawungkulon. Awal mula terpilihnya Desa Kedawungkulon sebagai Desa Tangguh Bencana dalam

Penanggulangan Banjir Menurut Bapak Badaru Samsih Selaku Koordinator Lapangan (Trantip) Kententraman Keamanan dan Ketertiban Desa sebagai berikut:

> "Awal terbentuknya desa tangguh bencana itu BPBD sendiri melihat Desa Kedawungkulon setiap ada bencana dia kok tidak terlalu heboh desanya kok tidak sampai terjadi yang macam-macam, tidak ada kerusakana vatal kok bisa sampe jiwanya selamat. Disini BPBD berfikir dan ternyata masyarakat Desa Kedawungkulon boleh di katakana SDMnya itu 30 % masih rendah tetapi secara tradisional dia sudah berfikir seandainya saya ada bencana saya harus melakukan demikian seandainya rumah saya kemasukkan air banjir sekian tinggi yang harus dipersiapkan ini-ini. Jadi intinya masyarakatnya itu sudah bisa mengendalikan diri tanpa bantuan orang lain dan dia sudah berfikir sendiri. Nah begitulah cara peniliain BPBD bahwa Desa Kedawungkulon sudah tidak kaget lagi kalau ada bencana tinggi semacam itu dia tidak kaget. Karena dia sudah bisa secara tradisional sudah bisa menyelamatakan dirinya sendiri, bisa menyelamatkan aset-asetnya, alat-alat rumah tangga yang bernilai tinggi, terkecuali aset sawah. Kenapa program ini ada karena masyarakat koordinasinya kurang sehingga dibentuklah desa tangguh bencana dibawah naungan BPBD. (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 07 Desember 2016)

Pada tanggal 22 Desember 2014 Desa Kedawungkulon resmi menjadi desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir yang dihadiri pemerintah daerah, BPBD, polisi, tim relawan serta pihak yang berkepentingan lainnya. Adapun proses Perencanaan dan Pengarahan dari desa tangguh bencana di Desa Kedawungkulon Menurut Bapak Sugeng selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

> "Pertama dimulai pada bulan Juli sampai November tahun 2014. Kedua tujuan desa tangguh adalah Mewujudkan masyarakat Desa Kedawungkulon menjadi masyarakat yang selalu siap siaga dalam mengantisipasi bencana, tangguh dalam mengadapi bencana serta cepat bangkit serta mandiri ketika menghadapi bencana melalui pemantauan unsur kearifan dan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Tiga kegiatan dilakukan dalam perubahan sosial, pelatihan dan

bimbingan, seminar dan studi banding ke Pacitan. Kempat kegiatan pembentukkan desa tangguh kerjasama antara BPBD Kabupaten Pasuruan dan LPBI selaku fasilitator."
(Data wawancara yang dilakukan di Rumah Makan Miami Purwodadi, tanggal 07 Desember 2016)

Berdarsarkan penjelasan diatas Program desa tangguh bencana di Desa Kedawungkulon seperti penjelasan Bapak Sugeng sudah dimulai dibentuk pada bualn Juli sampai November 2014. Dari program ini masyarakat dapat simulasi, seminar pelatihan hingga studi banding ke daerah lain salah satunya Pacitan. Studi banding tersebut dari wawancara yang di lakukan peneliti sudah terselenggarakan kegiatannya dan masyarakat cukup aktif dalam mengikuti kegiatan studi banding dalam mencari ilmu untuk desa tangguh mereka.

Gambar 4.2 Seminar Pemantapan dan Penetapan Desa Tangguh di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan
Sumber : Dokumen BPBD, 2014

Ketika Desa Tangguh Bencana ini sudah diterapakan dalam kegiatan atau program maka dalam pelaksanaannya akan berguna pada saat Prabencana, Tanggap Darurat dan Pascabencana. Karena di dalam penanggulanngan bencana mempunyai 3 tahap sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng Selaku Kepala Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

> "Proses Penanggulangan bencana ada tiga yaitu prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Ketika kita berbicara tentang bencana ketiganya harus menjadi satu, harus dibicarakan semua dan harus komprehensif oleh karenanya di Desa Kedawungkulon memang sebetulnya bukan tangguh kalau disana awalnya adalah cuman harmonis saja dengan bencana. jadi mereka tiap tahun tiap musim penghujan ketika banjir maka masyarakat terbiasa dan masyarakat disana memulai membangun rumah tinggi dari perkiraan mereka dengan banjir seperti itu hanya beberapa rumah saja yang masih rendah."
> (Data wawancara yang dilakukan di Rumah Makan Miami Purwodadi, tanggal 07 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan Bapak Sugeng proses dalam penanggulangan bencana terdiri 3 bagian yang di jalankan dan terpilihnya Desa Kedawungkulon sebagai desa tangguh bencana ialah masyarakatnya yang harmonis dengan bencana banjir. Hasil dari wawancara peneliti masyarakat bisa mengatasi banjir sendiri dengan menyelamatkan diri dan sebagian barang-barang milik pribadi mereka akan tetapi mereka tidak mampu menyelamatkan diri ketika bencana banjir mempersulit mereka untuk keluar dari tempat kejadian dan barang milik pribadi yang tergolong besar tidak bisa dibawa keluar dalam proses penyelamatan.

Melihat permasalahan diatas pemerintah membentuk desa tangguh bencana untuk membentuk tim relawan dari masyarakat sendiri dalam penyelamatan diri berbasis masyarakat agar mempermudah masyarakat keluar dari bencana dengan bergotong royong dengan membawa korban ke tempat pengungsian. Penjelasan dari Bapak Sugeng mengenai terbentuknya tim relawan sebagai berikut:

> " Sebelum BPBD bekerjasama dengan masyarakat belum ada tim relawan resmi. Terbentuknya tim relawan karena adanya desa tangguh bencana yaitu Forum Pengurangan Resiko Bencana. pemerintah tugasnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dan pemuda-pemuda yangg diberi nama KETAN KOYA oleh masyarakat sendiri dan nama resminya yang diberikan pemerintah PUSKORLAP 5. Makanya sekarang

berdirinya Ketan Koya/Puskorlap 5 itu menjadi tim relawan setelah saya bentuk PRB dan disana mereka membentuk sendiri nama tim relawam dan kemudian bagaimana menggandeng dengan perusahaan. Dan disana ada perusahaan pabrik gula kita sinergiskan dengan ada beberapa karyawan mereka menjadi tim relawan kemudian ikut berkontribusi terhadap penanggulangan bencana. Sebelum adanya desa tangguh bencana jalan ke Desa Kedawungkulon hancur total dan termasuk parapet-parapet sungai hancur oleh karenanya kita bentuk desa tangguh bencana dan di fokuskan pada pembangunan-pembangunan disitu jadinya."
(Data wawancara yang dilakukan di Rumah Makan Miami Purwodadi, tanggal 07 Desember 2016)

Tim relawan merupakan salah satu bagian dari program desa tangguh bencana yang didalamnya Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB). Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di desa untuk mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana, serta mampu berfungsi membantu masyarakat dalam menanggulangi maupun memperkecil atau mengurangi akibat dan dampak bencana yang mungkin timbul di wilayahnya. KMPB di Desa Kedawungkulon mempunyai nama Pusat Koordinasi Lapangan (PUSKORLAP 5) nama ini sebagai tanda tim relawan di desa yanga ada di Kabupaten Pasuruan.

Gambar 4.3 Penandatanganan Peresmian Desa Tangguh Bencana oleh Tim Relawan atau Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) Desa Kedawungkulon
Sumber: Dokumen BPBD 22 Desember 2014

Peresmian Kelompok Masyarakat Penaggulangan Bencana (KMPB) sebagai tim relawan disahkan pada saat pemantapan dan penetapan Desa Tangguh Bencana serta ikut melihat dan menandatangani peresmian Desa Kedawungkulon sebagai Desa Tangguh Bencana. Setelah adanya KMPB dibentuklah juga Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), dimana forum adalah wadah media komunikasi dan koordinasi untuk menyatukan elemen-elemen pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Komunitas di Desa Kedawungkulon. Elemen-elemen yang dimaksud adalah lembaga pemerintah dan kemasyarakatan/kelompok organisasi masyarakat.

Dalam mendukung kegiatan atau program dari Desa Tangguh Bencana setelah adanya Kelompok Masyarakat Penaggulangan Bencana (KMPB) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana ini harus dilandaskan hukum oleh sebab itu pada pembentukkan desa tangguh bencana telah dibuat peraturan yang melandaskan kegiatan atau program sebagai berikut pertama, Peraturan Kepala Desa Kedawungkulon Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (PROTAP PB) Desa Kedawungkulon isi dalam peraturan bagian ketiga sampai keenama sebagai berikut:

> "Ketiga: Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (PROTAP PB) Desa Kedawungkulon untuk menjadi acuan/pedoman bagi seluruh pihak Desa dan instansi terkait yang terlibat dalam upaya penanggulangan di Desa Kedawungkulon.
> Keempat: Segenap unsur organisasi/lembaga kemasyarakatan dan anggota di Desa Kedawungkulon agar mematuhi dan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana dan Penanggulangan Bencana di Desa Kedawungkulon.

> Kelima : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Desa ini dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat (APBN,APBD, Bansos Terencana dan/atau Tidak Terencana, Bantuan Pihak ketiga/Lembaga Usaha/Ormas atau dari masyarakat).
> Keenam: Segala sesuatu yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa." (Peraturan Kepala Desa Kedawungkulon Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (PROTAP PB) Desa Kedawungkulon).
> Kedua, setalah adanya peraturan dibuat Rencana Penanggulangan.

Rencana Penaggulanagan Bencana (RPB) Desa Kedawungkulon dengan "tujuan sebagai berikut:

> "1) Menjadi pedoman pemerintah desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam menyelenggarakan upaya pengurangan resiko bencana (PRB) dan penanggulangan bencana. 2) Menjadi bagian dari rencana pembangunan desa dalam menanggulangi bencana desa, agar resiko dapat hilang atau dikurangi secara terpadu dan terkoordinasi." (Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Kedawungkulon).

Rencana Penanggulangan Bencana (PRB) berisi rencana penanggulangan bencana Desa Kedawungkulon yang memuat profil wilayah, analisis resiko bencana, isu dan tantangan, kebijakan, program dan strategi dalam tahapan manajemen bencana yakni pada tahap sebelum bencana (Prabencana) terjadi dengan program pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan: tahap saat bencana terjadi dengan program tanggap darurat dan tahap setelah (Pasca) bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai rujukan atau pedoman pemerintah desa dan pihak lain dalam merancanag dan melaksanakan upaya penanggulangan bencana. dokumen PRB ini berlaku pada satu periode kurun waktu lima tahun (2014-2019) di wilayah Desa Kedawungkulon.

Ketiga Rencana Kontijensi Desa Kedawungkulon perencanaan disusun sebagai landasan operasional, strategi dan pedoman dalam penanganan bencana

pada saat tanggap darurat, yang melibatkan para pemaku kepentingan, sehingga pelaksanaanya lebih jelas, terkoordinasi dan terpadu. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kontijensi yang dijelaskan Bapak Sugeng Selaku Kepala Kesiapsiagaan Tanggap Darurat sebagai berikut:

> "1) Sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. 2) Tersedianya data kebutuhan penanganana bencana, ketersediaan sumberdaya dan kesenjangan sumberdaya. 3) memastikan mekanisme koordinasi semua pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. 4) sebagai upaya menggalang komitmen para pihak pada kondisi darurat." (Data wawancara yang dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, tanggal 08 Desember 2016).

Berdasarkan penjelasan dalam proses perencanaan desa tangguh bencana di Desa Kedawungkulon dengan adanya tim relawan KMPB beserta Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di dukung adanya peraturan kepala desa, rencana kontinjensi dan rencana penanggulangan bencana diharapkan menciptakan masyarakat yang mandiri dan tangguh dalam mengahadapi ancaman banjir sesuai keluarnya keputusan Bupati Pasuruan Nomor 180/728/HK/424.013/2014 Tentan Penetapan Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Sebagai Dess Tangguh Bencana Tahun 2014 resmi dijalankan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dimaksudkan Pelaksanaan dalam penetapan siapa yang menjadi pelaksana dilakukan dengan pembentukan badan-badan atau unit untuk menyelenggarakan kegiatan atau program untuk pencapaian tujuan. Kegiatan tidak akan berjalan tanpa adanya pengorganisasian dalam menjalankan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi. Adapun yang menggerakkan suatu organisasi karena adanya sumberdaya manusia yang didukung dengan

sumberdaya peralatan dan anggaran. Pengorganisasian yang baik akan berjalan dengan optimal ketika sumber-sumber ini berkesinambungan. Berikut penjelasan dari sumberdaya sebagai bagian organisasi, yaitu :

1) **Sumberdaya Manusia**

Dalam program penanggulangan banjir, sumberdaya manusia terbagi menjadi 3 bagian yaitu Pemerintah lokal terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, dan BPBD Kabupaten Pasuruan, Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Karang Taruna, PKK, LPPMD, KMPB/PUSKORLAP 5 dan Lembaga Non-Pemerintah/ORMAS/LSM terdiri dari LMDH, SPPL. Ketiga bagian dari organisasi lokal ini memiliki peran penting ketika desa mengalami ancaman bencana seperti banjir. Sumberdaya manusia tersebut digerakkan oleh pemerintah desa dan BPBD dengan satu koordinasi dengan BPBD agar terjalinnya satu komunikasi dengan artianya yang akan bertanggungjawab dalam program yang akan di jalankan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Frengky selaku Tim Relawan Swasta Pabrik Gula

> "BPBD hanya mengkoordinir saja, jadi BPBD ketika membuka pesawat radio open sar, open berita, open sumbangan, silahkan yang mau terbuka tetapi semuanya harus lewat BPBD satu pintu. BPBD bukan menambahkan diri tidak, artinya distribusinya biar lancar.
> (Data wawancara yang dilakukan di Rumah Penduduk, tanggal 31 Desember 2017).

Jadi, koordinasi dilapangan ketika terjadi banjir harus dilaporkan terlebih dahulu ke BPBD akan tetapi semua organisasi terlibat langsung dalam penanggulangan banjir. Tambahan dari Bapak Sugeng selaku Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasurua Akan tetapi bila permasalahan bencana banjir tidak terlalu besar dan bisa di selesaikan di desa maka pemerintahan desa yang

menyelesaiakan , dan ketika dusun bisa menyelesaikan maka diselesaikan di level dusun.

> "Aktor yang terlibat selain BPBD dan pemerintah desa yaitu mustika terdiri dari kecamatan, polsek setempat, dari komunis, puskesmas ada perawat, bidan yang terlibat termasuk perkumpulan dari Kedawungkulon dari desa, dan juga swasta seperti Perusahaan Pabrik Gula. Adapun juga dari Swasta seperti PT.Sempoerna di Desa Kedawungkulon tidak terlibat langsung, tetapi kita mengadakan pelatihan PT.Sampoerna memberikan fasilitas peralatan-peralatan. Jadi kita dilatih menggunakan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh PT.Sampoerna."
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, tanggal 08 Desember 2016).

Sumberdaya manusia yang bertanggungjawab di dalam pelaksanaan program ini adalah semua pihak yang ada di organisasi lokal. Khususnya mereka yang berada di bidang BPBD Kabupaten Pasuruan dibawah pertanggungjawaban Bapak Sugeng Selaku Kepala Kesiapsiagaan. Kemudian Kepala Desa di bawah pertanggungjawaban Bapak HM. Sugyarto. Dibidang Koordinator Lapangan Bencana (Trantip) Ketentraman Keamanan dana Ketertiban Desa Bapak Badaru Shamsih.

Program desa tangguh bencana juga membentuk organisasi Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) sebagai sumberdaya manusia yang ada di organisasi berbasis masyarakat dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon dengan Kepala Desa Kedawungkulon sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaran penanggulangan bencana di tingkat desa. Menurut Bapak Badaru Samsih selaku Koordinator Lapangan Bencana (Trantip) Ketentraman Keamanan dan Ketertiban Desa sebagai:

> "Ketan Koya sebetulnya nama grup relawan dari KMPB, yang diberi nama resmi oleh pemerintah PUSKORLAP 5 (pusat koordinasi lapangan 5) tetapi tetap dibawah naungan BPBD. Sebetulnya Ketan Koya sudah ada

sebelum tahun 2014 akan tetapi diresmikan pada tahun 2014. Organisasi KMPB yang ada didalamnya itu selain masyarakat, ada karyawan Pabrik Gula, Kalau dari masyarakat pun beda-beda ada dari Karang Taruna dari Desa Kedawungkulon ada dari kayu sereb itu didalamnya nanti terpecah lagi. Jadi kita itu disini tidak kerja sendiri dari organisasi-organisasi lain kalau desa butuh bantuan dari kota pun mau datang kesini. Jadi ketika di desa terjadi bencana tidak selalu yang membantu masayarakat Desa Kedawungkulon jadi bisa dari desa-desa lain tim relawannya diluar dari KMPB Desa Kedawungkulon."
(Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017).

Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) sebagai suatu kegiatan atau program dalam desa tangguh bencana untuk menciptakan tim relawan dari masyarakat Desa Kedawungkulon sehingga nantinya sumberdaya manusia yang di dalam organisasi ini mampu mandiri dan dapat mengatasi ancaman banjir. Khusus untuk Desa Kedawungkulon Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) diberi nama Pusat Koordinasi Lapangan (PUSKORLAP 5) dimana setiap desa yang mempunyai ancaman bencana mempunyai nama sendiri sebagai perwakilan desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Berikut struktur organisasi Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 4.4 Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat Penanggulagan Bencana (KMPB) Desa Kedawungkulon

No.	JABATAN	NAMA
1	Penasehat	Camat Grati
2	Penanggungjawab	Kepala Desa Kedawungkulon
3	Koordinator Umum	Badarus Samsih
4	Sekretariat	Drs. Adi Hamzah
SEKSI SIAGA		
5	Koordinator	Badarus Samsih
6	Regu Peringatan Dini	Bambang Suprayogi
7	Regu Pemetaan	M. Arifin
SEKSI TANGGAP DARURAT		
8	Koordinator	Saptono
9	Regu Perintis	Sujono

10	Regu Keamanan	Seger
11	Regu Penyelamatan	Usman
12	Regu Pengungsian	Totok
13	Regu Kebakaran	Puji Roni
14	Regu Logistik	Siti Maisaroh
SEKSI KOMUNIKASI		
15	Koordinator	Sony
16	Regu Administrasi dan Dokumentasi	Linda
17	Regu Informasi dan Hubungan Luar	Zainul A
18	Regu Relawan	Rustina
SEKSI KESEJAHTERAAN		
19	Koordinator	Indri Sugiarto
20	Regu Pertolongan Pertama	Ely Andayani
21	Regu Dapur Umum	Leni Yunita

Sumber : Peraturan Kepala Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan No 04 Tahun 2014

Fungsi dari Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) yaitu mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat di setiap tahapan penanggulangan bencana (sebelum, saat dan sesudah bencana), yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan berkelanjutan untuk menanggulangi bencana yang dihadapi bersama

Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) memiliki tugas pokok yaitu:

a. Mengikuti pelatihan dan pendidikan pengurangan resiko penangggulangan bencana
b. Membuat/menyusun perencanaan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu

d. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan berkelanjutan
e. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayahnya
f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat, serta instansi-instansi terkait.

2) **Sumberdaya Peralatan, Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasana merupakan sebuah media fasilitas dalam mendukung jalannya sebuah program dengan sumberdaya manusia yang didukung oleh alat dalam melakukan pekerjaan yang akan memperlancar berjalannya sebuah program dengan sempurna. Proses dalam penanggulangan banjir ada 3 yaitu Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana untuk sarana dan prasana di setiap tahap berbeda-beda.

1) Prabencana / Peringatan Dini

Pada sektor peringatan dini (Prabencana) memiliki tugas untuk melakukan pemantauan lokasi dan alat peringatan dini (Prabencana), menyebarluaskan tanda-tanda ancaman pada masyarakat sebelum terjadi bencana, dan memberi peringatan kepada masyarakat agar mengungsi. Di tahap prabencana dilakukannya pemantauan tanda-tanda ancaman seperti situasi yang dihadapi ketika terjadinya hujan selama 5 jam, jika ancaman terdeteksi maka akan diberikan tanda-tanda kepada masyarakat dengan membunyikan sirine alat peringatan dini, dan koordinator akan melaporkan kepada Kepala Desa untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Menurut Pak Frengky selaku Relawan Perusahaan Pabrik Gula

> "Jadi kita piket mbak, hari senin siapa, selasa , rabu siapa dari situ kita bergantian memantau. Seperti ini cuaca ekstrim kita piket dan kita koordinasi terus dengan BPBD begitu ada sesuatu yang menandakan bahwa akan banjir, kita langsung gerak dan menghubungi (kontak) sehingga masayarakat sudah siap. Sarana yang digunakan seperti masjid, gereja, perusahaan. Kalau perusahaan membunyikan sirine dan itu juga di sosialisasikan ke masyarakat. Kalau ada sirine jam sekian-sekian berarti ada bencana nggak tau apakah itu gempa bumi, banjir atau bencana lainnya. Warga lewat masjid atau gereja untuk memberi tahukan karena tidak mungkin menggedor-menggedor satu-satu rumah masyarakat. Ketika kejadian kita harus tau arah mana saja yang perlu dilakukan, kita *contact* untuk bergerak dan melapor ke BPBD dan kita disuruh gerak. Disini kita bentuk posko-posko, supaya kita tinggal *contact* tidak perlu bertanya posisi dimana setelah itu berkumpul di satu titik dan langsung evakuasi warga."
> (Data wawancara yang dilakukan di Rumah Penduduk Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017).

Tambahan dari Bapak Sonny selaku tim relawan dari Perusahaan Pabrik Gula sebagai berikut:

> "Sirine ini suatu bentuk yang tidak main-main karena kita sudah menghubungi (kontak) juga dengan teman-teman yang jaga di atas (desa-desa yang ada diatas Desa Kedawungkulon) dengan melihat hujan deras sudah berjam-jam disini banjir luar biasa yang tidak seperti biasanya, kita harus melihat kondisi di lapangan dulu sebelum membunyikan sirine. Seperti kemarin itu saya kesini loh kok di depan warung sate tidak pernah ada air dan sudah mulai tinggi. Nah setelah itu saya kontak pos 1 dan pos 2 atau perusahaan saya minta untuk dinyalakan sirine itupun nggak percaya kalau air belum kesana dan saya bilang yang bertanggungjawab saya tolong dicatet kalau sampean di panggil manajemen bilang saya yang bertanggungjawab."
> (Data wawancara yang dilakukan di Rumah Penduduk Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Penjelasan lainnya dari Bapak Badaru Shamsih selaku Koordinator Lapangan Bencana (Trantip) Ketentraman Keamanan dana Ketertiban Desa mengenai Prabencana

> "Sebelum kejadian bencana, BPBD sudah membentuk pos-pos tiap-tiap desa di Kabupaten Pasuruan yang berpotensi bencana termasuk bencana banjir seperti Desa Lumbang Desa, Karangjati, Rembulan. Jadi kita selalu memberikan informasi ketika masuk musim penghujan kalau tidak masuk

> musim pengujan kita cuman melakukan apel penjaring saja menceritakan kepada BPBD bahwa ditiap-tiap desa ini aman dan terkendali dari LINE. Kalau sudah musim penghujan, radio HT ON semua informasi dibuka semua dari tiap-tiap desa, untuk mengetahui laporan dari tiap-tiap desa. Missalnya Ini berpotensi hari ini banjir karena hujan dari wilayah atas hujan lebat sekitar 3 jam, jadi tiap-tiap desa memberikan informasi termasuk Desa Kedawungkulon. Sebelum terjadi banjir kita sudah mengetahui duluan, sehingga kita bisa menyebarkan ke RT/RW untuk berwaspada dan bersiapsiaga jadi barang-barang atau dokumen-dokumen penting termasuk nyawa mereka sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kitakan sudah bisa memprediksi ketinggian air yang datang dengan cara satu jam hujan airnya ini diprediksi airnya rendah, kalau dua jam sedang kalau tiga jam sudah termasuk tinggi ini yang membahayakan. Seperti banjir di Januari ini terjadi hujannya diatas 3 jam lebih ini yang membahayakan".
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas Pemantauan tanda-tanda ancaman bencana dengan menyebarluaskan informasi ketika ancaman banjir akan datang dengan menjaga komunikasi yang baik agar bisa bertukar informasi. Alat-alat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sesuai yang dijelaskan diatas ialah alat peringatan dini (serene/pengeras suara) befungsi untuk memberikan informasi siap siaga bahwa banjir akan datang, HT untuk saling berkoordinasi manjaga satu komunikasi, Senter sebagai alat penerangan ketika melakukan pemantauan, Kentongan dan Pos Keamanan maupun Pos Pemantauan yang nantinya membantu didaalm kegiatan atau program tersebut.

2) Tanggap Darurat

Pada tahap tanggap darurat sumberdaya alat sangat dibutuhkan dimana alat-alat tersebut berguna untuk evakuasi warga dalam penyelamatan jiwa seperti halnya penjelasan oleh Bapak Badar Shamsih alat yang digunakan dalam evakuasi pada saat pertolongan dikejadian yaitu perahu karet, pelampung, dan tali tambang.

Alat-alat yang dibutuhkan tidak semuanya dari BPBD Kabupaten Pasuruan maupun pemerintah desa melainkan perusahaan swasta yang berada dekat dengan Desa Kedawungkulon ikut serta dalam memberikan bantuan dalam menyediakan alat bantu siaga. Seperti penjelasan oleh Bapak Sonny selaku Tim Relawan

> "Semua tim relawan, perahu karet, tutup jembatan, apa yang dibutuhkan desa kita usahakan seperti memberikan penarangan yang masuk dari pabrik gula , karena aset yang punya jenset yaitu pabrik gula dan diutamakana untuk PURSKOLAP 5 mengutamakan memberikan penerangan di poskonya. Kita juga memberikan tutup jembatan supaya banjir tidak keluar kemana, pabrik gula membuatkan tutup jembatan. Dalam proses kebutuhana alat tersebut pemerintah desa harus untuk membuat pengajuannya seperti permohonan terlebih dahulu baru diberikan oleh pihak pabrik gula."
> (Data wawancara yang dilakukan di Rumah Penduduk Desa Kedawungkuon, tanggal 31 Januari 2017)

Perahu karet sangat diperlukan ketika bencana banjir terjadi dan tidak hanya perahu karet saja yang menjadi alat bantu dalam penanggulangan banjir yaitu diperlukannya pompa air, peta desa, jas hujan tali tambang, helm, chainsaw, masker, tandu, sepatu boat, sarung tangan, compressor air, alat-alat tuang, senter, eskavalator, Bulldozer dan sebagainya (**Lampiran 2**).

3) Pasca Bencana

Tahap pasca bencana merupakan tahap pemulihan desa dan kesehatan masayarakat pemerintah, pemerintah desa, BPBD Kabupaten Pasuruan, organisasi masyarakat memberikan fasilitas/alat kepada masyarakat sebagai bentuk masa pemulihan seperti mendirikan Posko Pengungsian dan WC Umum bagi masyarakat yang rumahnya terkena banjir serta Dapur Umum, membuat peta lokasi pengungsian agar terdata, menyediakan alat-alat sekolah dimana banyak peralatan sekolah anak yang terendam banjir.

Setelah pasca bencana pemerintah desa mencatat pengeluraan dan kerusakan rumah warga serta tanggul-tanggul sungai yang jebol, dimana nantinya alat yang digunakan dalam mengantisipasi banjir Bapak Badaru Shamsih sebagai berikut.

> "Yang sedang dikerjakan seperti sekarang ini pasca bencana, merengreng (mencatat ulang) kerugian kalau ada rumah itu dilaporkan, tiap-tiap dusun memberikan laporan ke RT yang mana saja yang terkena itu dilaporkan itu yang pertama. Kedua, tanggul-tanggul yang rusak itu dilaporkan, itukan banyak yang roboh karena terkena banyaknya air yang masuk. Untuk penanganan sementara yang di namakan tanggap darurat yaitu selbek (karung yang didalamnya sak pasir). Selbek itu di tumpuk-tumpuk setinggi tanggul sungai yang jebol. Ini dilakukan supaya ketika datangnya banjir susulan dampaknya tidak terlalu besar. Dan penanganan itu pada saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman. Seperti kerugian tanggul, kondisi pengairan, kerugian yang roboh, aset-aset pemerintah yang rusak semacam sekolah atau yang lainnya itu di laporkan semuanya. Dalam pengecekkan sungai dikhususnya Pengairan Kecamatan Grati untuk Desa Kedawungkulon otomatis Pengairan Grati yang bertanggungjawab dengan tanggul-tangul itu dan kita harus mempersiapkan laporannya berapa tanggul yang roboh dan di dusun mana, RT mana yang terdampak itu dilaporkan. Korban jiwa juga dilaporkan bila ada, untungnya belum ada sampai korban jiwa untuk itu ketika terjadi bencana banjir diutamakan jiwa agar tidak ada korban jiwa."
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkuon, tanggal 31 Januari 2017).

Penjelasan Bapak Shamsih dimana keadaan proses dalam menjalankan program di tahap pasca bencana banjir. Penjelasan dari berliau di serupa dengan kepala desa, hal ini ditambahkan oleh Bapak HM. Sugiarto selaku Kepala Desa Kedawungkulon. Pada saat pascabencana kita persiapkan alat-alat evakuasi mana kala terjadi banjir kembali, ada perahu karet, pelampung, lampu senter dll. Jembatan oranye (jembatan magersari) itukan jadi pos pantau kalau disitu ada titik levelnya kalau ketinggian air itu 320 itu berarti sungai tinggi ada pengukurnya

disebelah utara." Berdasarkan penjelasan diatas peralatan yang digunakan secara lebih rinci terdapat di (**Lampiran 2**).

Gambar 4.4 Posko Pemantauan Banjir di Desa Kedawungkulon
Sumber : Dokumen Pribadi, Desember 2016

3) **Sumberdaya Anggaran**

Biaya atau anggaran diperlukan sebagai operasionalisasi pelaksanaan dari program atau kegiatan. Suatu program akan berjalan apabila ada anggaran dalam menjalankan program. Seperti dalam menjalankan sumberdaya manusia dan alat-alat yang digunakan dalam penanggulangan banjir tentunya membutuhkan anggaran. Program Desa Tangguh Bencana di Desa Kedawungkulon dalam penanggulangan banjir sesuai tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana harus di dukung oleh alokasi anggaran/pembiayaan yang cukup besar.

Penerapam Pelaksanaan Pembentukkan desa tangguh bencana dengan diawali kegiatan simulasi untuk tim relawan, PRB, BPBD maupun pemerintah desa. Dimana pelatihan simulasi ini sebagai bentuk pelatihan sumberdaya manusia yang berperan dalam penyelamatan manusia ketika ancaman banjir terjadi. Kegiatan lainnya melakukan studi banding ke daerah lain seperti daerah Pacitan

dan sering mengadakan rapat sebagai bentuk ilmu pengetahuan dalam penanggulangan banjir. Berikut penjelasan dari Bapak Sugeng selaku Kepala Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasuruan.

> "Pertama yaitu belanja pakaian, makan minum rapat, pergantian transportasi rapat kemudian perjalanan untuk studi banding seperti ke Pacitan, kegiatan-kegiatan rutinitas untuk pembinaan-pembinaan dalam penanggulangan diperlukan oprasional, jadi setiap kali pertemuan mereka mendapatkan pengganti uang saku 50.000. Kemudian dapat makan, snack kemudian narasumbernya juga sudah ada sebagai pemateri yaitu dari BPBD dan ada juga dari luar instansi, LPBI sebagai fasilitator. Dari instansi luar itu seperti dinas perkebunan, dinas perairan dan sebagainyanya. Ini dilakukan selama 5 bulan mulai dari persiapan sebagai pertemuan awal, pembentukkan sendri pertemuan 50 orang yang kita bina selama satu bulan mungkin 2 kali sampai 5 bulan 10 kali pertemuan. Jadi kita setiap tahunnya berbeda desa. Kebetulan kita dimulai dari 2014 di Desa Kedawungkulon kemudian 2015 di wonokitri dan 2016 di Ledug, tapi pertama belajarnya di Desa Kedawungkulon."
> Data wawancara yang dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, tanggal 08 Desember 2016)

Berikut merupakan salah satu kegiatan simulasi pelatihan yang diberikan sebagai satu bentuk program dari desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon.

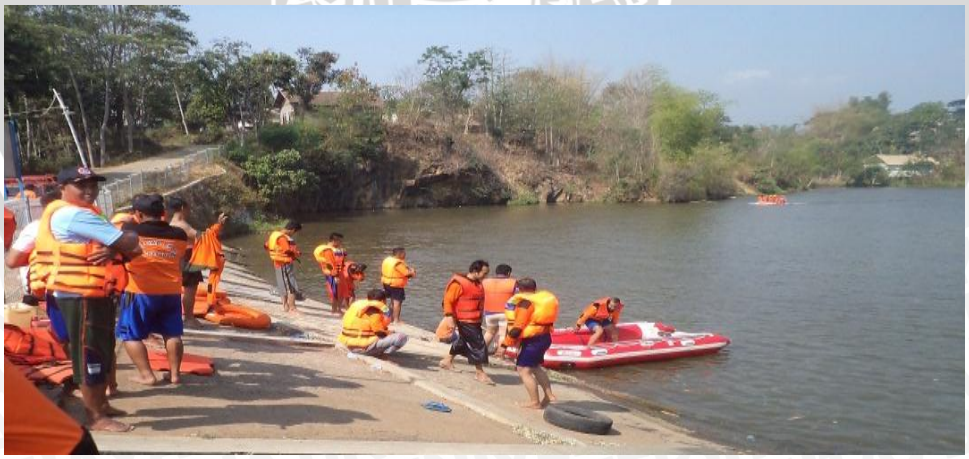

Gambar 4.5 Diklat Simulasi Pelatihan Water Rescue Kertosari 10/22/2014
Sumber: Dokumen BPBD, 2014

Kebijakan untuk pengalokasian anggaran dana dalam pembentukkan desa tangguh bencana di Desa Kedawungkulon dalam penanggulangan banjir diberi dana Rp.169.161.000,00 dan menghabiskan dana sekitar Rp.78.917.500,00. Seperti yang diketahui dana tersebut habis digunakan sesuai kegiatan yang di tetapkan dalam menjalankan program desa tangguh bencana yaitu pembentukan KMPB, Penetapan Perdes, sosialisasi dusun 01-06, pemasangan rambu di lokasi bahaya, simulasi seperti studi banding pelatihan dan sosialisasi KMPB.

Setelah pembentukan desa tangguh bencana dana anggaran yang dikeluarkan pada saat tanggap darurat atau pada saat terjadi bencana berikut penjelasan dari Bapak Sugeng selaku Kepala Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasuruan

> "BPBD akan mengajukan surat tanggap darurat kepada Bupati maka Bupati akan membuat SK Tanggap Darurat (Surat Keputusan Tanggap Darurat) surat ini berlaku sampe tujuh hari dan bisa diperpanjang sampe 14 hari. Surat tanggap darurat itulah yang dipakai untuk sebagai payung hukum mengajukan anggaran namanya BTT (Bantuan Tidak Terduga). Karena bencana harus dapat bantuan, yaitu melalui bantuan BTT. Ketika terjadi bencana kita bikin nota dinas ke Bupati seperti beberapa tempat kerusakan, berapa KK yang terdampak untuk disampaikan baru setelah itu dikeluarkan SK Tanggap Darurat. Jadi setelah ada nota dinas dari bencana yang terjadi maka SK di keluarkan setela itu bisa dikeluarkan dana BTT.
> BTT yaitu anggaran yang di siapkan dikeuangan yang disiapkan untuk bencana."
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, tanggal 08 Desember 2016).

Anggaran lainnya pada saat pasca bencana, dana yang dikeluarkan tidak dari BPBD maupun desa melainkan dari dinas-dinas yang berhubungan seperti dinas perairan, lingkungan dan sebagainya, seperti penjelasan Bapak Sugeng

> "Anggaran buat pembangunan tanggul sungai, pemecah gelombang, penanam pohon, pelatihan kebencanaan. melekat di dinas masing-masing terkait seperti desa normalisasi air di dinas pengairan tidak ada dari BPBD

> anggarannya. Untuk pengajuannya prosesnya dari musrembang desa, musrembang kecamatan, dikemudian musrembang kabupaten. Jadi dari musrembang itu dibagi pos-pos kemana tujua dari musrembang itu sendiri. Usulan-usulan itu dari masyarakata sendiri itukan dari musrembang dari situ dialokasikan anggaran. Mereka punya anggaran sendiri terkait perbaikan jalan raya dan dari dinas pengairan."
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, tanggal 08 Desember 2016)

Sedangkan penjelasan oleh Bapak HM. Sugyarto selaku Kepala Desa sebagai berikut :

> "ya pertama-tama kita sinergikan dengan BPBD, LPM dan sektor lain yang berkaitan dengan bencana seperti Bina Warga, Cipta Karya, Pengairan. Karenakan dari BPBD misalkan anggaran darurat bencana tetep sektoralnya seperti kalau dari wilayah Cipta Karya yah Cipta Karya (dinas yang menangani lingkungan) yah kalau pelaksanaannya pengairan yah pengairan (dinas pengairan yang menangani masalah saluran, kali kecil) jadi harus ada mereka dalam pembentukkan peraturan"
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa pembentukan desa tangguh bencana tidak menghabiskan dana sesuai yang dianggarkan masih ada dana yang tersisa serta untuk pasca bencana kerusakan yang terdapat di desa di sesuaikan dengan dinas-dinas yang terkait dalam penanggulangannya.

4) **Perangkat Hukum**

Suatu program kegiatan dalam suatu instansi pemerintah selain memiliki sdm, pengorganisaasiaan, peralatan hingga anggaran, yang tidak kalah penting adalah perangkat hukum sebagai landasan sebuah program berjalan. Dengan memiliki perangkat hukum suatu program di dalam kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan kegiatan laporannya.

Kegiatan atau program desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir di desa Kedawujngkulon pemerintah merancang Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. program pemerintah ini dilandaskan oleh perangkat hukum dalam rencana penanggulangan bencana yang diharapkan nantinya kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai tujuan yang di inginkan. Dengan adanya aspek hukum akan bersifat akuntabilitas dan dapat di awasi dalam kegiatannya.

Perangkat hukum yang pertama sesuai dengan lampiran dalam Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan, perangkat hukum ditandai dengan adanya Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor: 189/728/HK/424.013/2014 Tentang Penetapan Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Sebagai Desa Tangguh Bencana Tahun 2014. Perangkat hukum ini memuat tentang kewajiban dan hak Desa Kedawungkulon sebagai Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Melindugi semua warga masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana dari dampak bencana yang dirugikan
2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pengeolaan sumberdaya alam dalam rangka mengurangi resiko bencana
3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat daam pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana

4) Menigkatkan kapasitas sumberdaya manusia pemerintah desa, masyarakat dan lembaga usaha dalam hal teknis bagi pengurangan risiko bencana
5) Meningkatkan kerjasama antara pihak pemerintah desa, sector swasta, perguruan tinggi, LSM, Ormas dan para pemangku kepentingan lainnya Dallam pengurangan resiko bencana
6) Memberikan laporan perkembangan desa kepada Pemerintah Daerah secara rutin/periodic dan/atau insidensil sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan
7) Berhak mendapatkan bantuan, pedoman, pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan, simulasi/gladi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat sesuai ketetntuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014, dengan adanya keputusan bupati tersebut menjadikan masyarakat desa lebih mandiri dalam menghadapi ancaman bencana banjir.

Perangkat hukum berikutnya yang mendukung keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan dilandaskan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. landasan hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana terdapat pada pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa tujuan upaya penanggulangan bencana adalah “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”. Selanjutnya

Pasal 6 menyatakan bahwa tanggungjawab pemerintah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi.

1) Pengurangan resiko bencana dan pemaduan bencana dengan program pembangunan
2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana
3) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
4) Pemulihan kondisi dari dampak bencana
5) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai
6) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dan siap pakai dan
7) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Peraturan Pemerintah Nomor.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hanya menerangkan tentang rencana aksi pengurangam resiko bencana (PRB) yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana rincian anggarannya.

c. Penerapan/Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir

Melihat potensi ancaman bencana secara geografis dari Kabupaten Pasuruan. Kejadian bencana yang dipicu oleh perkembangan dan pembalakan hutan, kemudian hujan deras pada setiap memasuki bulan-bulan penghujan seperti bulan November hingga Februari selama 3 sampai 5 jam atau lebih terus manerus yang disebut masa kritis, di tambah hutan yang gundul dibukit denngan keterangan yang curam kejadian diperparah dengan adanya penambang batu kali dan kondisi saluran irigasi/selokan yang tidak memenuhi syarat sehingga menyebabkan pengikisan dan kemampuan tanah hilang maka terjadilah luapan air yang besar. Kondisi ini selama setahun masih terus terjadi di Desa Kedawungkulon, akan tetapi masyarakat bisa bertahan dalam keadaan kondisi banjir. Sehingga pemerintah punya penilaian dengan melihat desa/kelurahan dikatakan tangguh bencana apabila memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan mampu menghadapi potensi ancaman bencana serta mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan seperti bencana banjir. Sehingga pemerintah yang mempunyai program desa tangguh bencana dengan menetapkan Desa Kedawungkulon sebagai desa tangguh bencana hal ini telah di tuangkan dalam Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 180/728/HK/424.013/2014 tentang Penetapan Desa Kedawungkuon Kecamatan Grati sebagai Desa Tangguh Bencana Tahun 2014. Pernyataan ini ditambah

penjelasannya oleh Bapak Sugeng selaku Kepala Kesiapksiagaan BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

> "Tujuan dari program ini untuk masyarakat sendiri bisa mengurangi beban-beban akibat bencana itu sehingga bisa mengurangi dampak resiko. Semakin masyarakt itu dibina maka untuk mengurangi resiko bencana itu tinggi. Contoh-contoh sederhana pembentukkan desa tangguh sebetulnya adalah implementasi dari bentuk pengurangan resiko bencana program dari BPBD sendiri. Jadi masyarakat dibina karena bencana itu tidak bisa dicegah yang bisa hanya dikurangi sebagai dampak resiko. Contoh kalau kita memberikan sosialisasi seperti terjadi banjir apa yang perlu masyarakat lakukan, kita akan memperbuat implementasi dini itu untuk para relawan. Sehingga nantinya dalam penerapannya itu mereka bisa berkoordinasi dan memberikan informasi awal bahwa "ada banjir" jadi masyarakat bisa siaga. Dokumen-dokumen yang penting diamankan seperti ijasah, sertifikat tanah dan sebagainya. Sekarang masyarakat Desa Kedawungkulon itu punya sendiri diatas atap mereka itu jadi ketika banjir terjadi maka mereka akan berbuat sesuatu termasuk menyelamatkan anak-anaknya, diatas sudah tersedia semua. Jadi ada tempat khusus disitu untuk menyimpan barang-barang berharga setiap rumah. Masyarakat di Kedawungkulpn sudah terbiasa masyarakat dengan banjir maka yang menjadi sentuhan kita adalah informasi dini sehingga mereka betul-betul siap ketika ada tanda-tanda terjadi banjir. Jadi Pak Shamsih dengan teman-teman sudah bergerak untuk memberikan infromasi banjir, sehingga masyarakat bisa menyelamatkan diri dan mengurangi resiko bencana. kemudian juga tanggap darurat karena adanya relawan-relawan perempuan mereka sudah memasak dikarenakan banjir mereka tidak sempat belanja tetapi Karena disini ada relawan ada bantuan mereka bisa makan dari relawan itu dinamakan dapur umum." Data wawancara yang dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, tanggal 08 Desember 2016).

Pada saat Prabencana pelaksanaan program desa tangguh bencana ini desa Desa Kedawungkulon dituntut untuk bisa berkoordinasi sesama masyarakat dalam hal memberi peringatan bahwa akan terjadinya ancaman banjir. Pelaksanaan program, pemerintah mengharapkan agar desa bisa mandiri dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya dengan saling bekerjasama bersama masyarakat.. Salah satu keadaaan banjir yang terjadi di Desa

Kedawungkulon sebagai bentuk hasil pelaksanaan kegiatan desa tangguh bencana ketika terjadinya bencana banjir di bulan Januari oleh Bapak Badaru Shamsih

> "Dapat dilihat banjir 3 hari dibulan januari 2017, ini merupaksana salah satu yang termasuk banjir besar, jadi keadaan lumpuh total. Namun pemerintah tidak tinggal diam dan masyarakat disini di tuntut harus mandiri sebelum pemerintah bertindak desa sudah harus beretindak, kalau dulu BPBD menyiapkan timsar ada tim dapur umum kalau sekarang tidak dan disediakan dari desa sendiri, tidak hanya itu saja ada tim penyisiran, tim penyelamat, tim dapur umum, tim informasi, tim selter. Kalau kita ingin menghilangkan bencana tidak bisa tetapi untuk mengurangi resiko bisa, makanya disitu dibentuk forum PRB. Didalamnya ada masyarakat atau KMPB. Adapun ilmu yang dibutuhkan atau tingkat kebutuhan dalam penyelamatan sudah disiapkan dari dan kita diberi pelatihan semcama tim rescue itu diberi pelatihan seperti naik perahu itu ada caranya, kita punya tim khusus untuk penanganan reaksi cepat penanganan jiwa manusia dilatih bagaiaman cara membuat perahu atau merakit perahu bagaimana, cara mennyelamatkan manusia kalau sudahh tenggelam kita harus bagaimana, kalau sudah meninggal harus bagaimana bertindak dan itu kita juga sudah ada timnya. Jadi kita tidak asal-asal menolong orang, karena kalau kita asal-asalan menolong orang bisa-bisa yang menolong bisa jadi korban jadi kita harus punya bukunya ilmu pengetahuannya cara menolong orang itu bagaimana kalau ada di ketinggian bagaimana cara menolongnya kalau kita sudah punya ilmunya dan alat-alat sudah disediakan oleh BPBD."
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Hal yang dirasakan dari pelaksanaan program kegiatan desa tangguh bencana ini masyarakat desa bisa menyelamatkan terutama dirinya sendiri dengan adanya pemberitahuan tanda-tanda yang disebarluaskan, menyelamatkan barang-barang penting seperti dokumen-dokumen pribadi, tv, kulkas hingga ternak.

Kegiatan program ini juga mengajarkan masyarakat ketika di dalam keadaan bencana banjir dalam evakuasinya cara menggunakan alat-alat dalam penyelamatan jiwa. Sehingga ketika bencana terjadi masyarakat tidak terlalu takut dalam evakuasi karena telah memahami pemakaian alat-alat untuk evakuasi

ketempat yang lebih aman. Berikut bentuk kegiatan dan waktu kegiatan pada saat prabencana di desa Kedawungkulon.

Tabel 4.5 Kegiatan dalam Prabencana (sebelum) Desa Kedawungkulon

No	Kegiatan	Alat/Pelaku	Waktu
1	Pengamatan Lokasi	Tim peringatan dini, Linmas dan Masyarakat	Sebelum
2	Pemantauan Alat	- Tim peringatan dini, Linmas dan Masyarakat - Alarm, alat pengukur air	Sebelum
3	Penyebarluasan Informasi dan Peringatan	- Tim Peringatan dini, Linmas dan masyarakat, takmir, toga dan tomas - Masjid, HT, sms center, Telepon	Sebelum
4	Pelaporan Peringatan	Koordinator, posko dusun	Sesaat Sebelum
5	Mengadakan ronda keliling	Linmas, warga	Setelah Kejadian
6	Mengadakan giliran jaga	Linmas, warga	Setelah Kejadian
7	Menyediakan alat-alat keamanan	Linmas, pemdes dan masyarakat	Setelah Kejadian
8	Mendirikan tenda / pos keamanan	Linmas, pemdes, karangtaruna	Setelah Kejadian

Sumber : Rencana Kontijensi Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, 2014

Tabel ini menjelaskan kegiatan pada prabencana dalam kesiapsiagaan dalam ancaman bencana banjir. Kegiatan ini menjelaskan tindakan-tindakan apa saja dalam pemantauan ancaman bencana dan pelaku kegiatan itu sendiri. Setiap organisasi yang berperan adalah masayarakat Desa Kedawungkulon sendiri.

Pada saat tanggap darurat, pelaksanaan program desa tangguh melalui pelatihan, simulasi yang dipelajari atau ilmu yang telah diberikan dari kegiatan program desa tangguh bencana tersebut diterapkan saaat kondisi bencana terjadi. Tim yang mempunyai bekal dalam penyelamatan manusia langsung mengevakuasi warga dengan melaporkan situasi keadaan ancaman kepada BPBD Kabupaten Pasuruan tanpa harus menunggu bantuan langsung dari pihak BPBD.

Disini gunanya manfaat dari desa tangguh bencana, masyarakat desa sendiri mampu bergerak langsung dalam penyelamatan pertama terhadap masyarakat tanpa menunggu bantuan dari luar atau pemerintah. Pernyataan ini didukungan penjelasan oleh Bapak Badaru Samsih Selaku Koordinator Lapangan (Trantip) Kententraman Keamanan dan Ketertiban Desa

> "Pertama penyelamatan nyawa jiwa yang harus diutamakan kita tidak memikirkan yang mana yang bocor, yang mana tersumbat kita fokus ke nyawa keselamatan jiwa manusia. Terutama bayi yang diutamakan. Seandainya ada orang dewasa dan bayi yang terikut air mana yang kita utamakan? Kita harus memilih bayi, karena secara logika bayi masa depannya masih panjang dibanding orang dewasa lanjut usia akan tetapi kalau bisa kedua-duanya ditolong. Tetapi di dalam keadaan darurat harus bayi yang diselamatkan. Yang kedua peralatan-peralatan rumah tangga seperti kulkas, binatang peliharaan seprti sapi, domba itu perlu kita selamatkan itu pun ada tempat khusus untuk evakuasinya dan allhambulialh disini sudah diselamatkan semua. Setelah penyelamatan sudah selesai baru kita membuka dapur umum. Kita tidak mungkin ketika banjir datang langsung membuka dapur umum karena nomor satu penyelamatan, kedua pengiriman itu sulit logistik seperti beras, lauk, air bersih dan harus menunggu. Sedangkan perahu dipakai untuk penyisiran." (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017).

Setelah melakukan penyelamatan jiwa pihak pemerintah desa berkoordinasi dengan pihak BPBD dalam menetapkan lokasi evakuasi warga sebagai tempat tinggal sementara warga. Adapun Menurut Bapak Badaru Shamsih mengenai evakuasi warga sebagai berikut:

> "Penyisiran warga di Kedawung Wetan disana tempat tertinggi dan disana ada puskesmas yang sudah dibuka dengan tenda penanganan darurat namun sehingga masyarakat yang terkena sakit akan dirawat akan tetapi bila tidak kunjung sembuh akan dikirim kerumah sakit. Penanganan ini diberi nama sebagai tim selter (penanganan darurat). Kalau masyarakat sudah merasa aman kita harus memikirkan kenyamanan bagaimana masyarakat disitu tinggal kita sediakan selimut, termasuk pempers bayi. Dari pemerintah juga menyediakan selimut, tempat tidur seperti kasur yang diberikan kedesa jadi ketika sewaktu-waktu banjir kembali bisa digunakan. Setelah itu kita yang ada dilapangan mengecek data berapa

> yang sakit, berapa yang bayi, balita, lansia. Karena sehubungan dengan bantuan yang dikirim. Contoh bayi di Kedawunngkulon sekian berarti kita harus membeli kebutuhan bayi diperkirakan. Ada juga makanan siap saji dari pemerintah bentuk kalengan pusat BNPB tetapi sebelumnya desa yang mendahulukan terlebih dahulu dan kepala desa harus bisa menalangkan. Biasanya tiap-tiap warung yang buka yang tidak terkena banjir kita pesan dan kita pesan 50 bugkus setiap beberapa warung itu dari desa dahulu itu yang di sebarkan setelah itu baru pemerintah, kita buat LPJ atau anggarannya. Tetapi 2017 insyallah sudah di anggarkan untuk bencana banjir di DD (Dana Desa), jadi ketika ada kejadian dana sudah siap mungkin untuk makanannya dan sebagainya. Istilahnya pemerintah menuntut desa untuk mandiri. Intiya kedepannya desa tangguh bencana dituntut untuk mandiri tidak dari pemerintah lagi.
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Penjelasan diatas merupakan bentuk penerapan program pada saat tanggap darurat dimana pemerintah desa, BPBD, tim relawan dari setiap organisasi mulai dari evakuasi warga yang terjebak banjir dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa warga, aset warga, berusaha mengfungsikan akses transportasi menuju wilayah terdampak hingga memberikan barang-barang kebutuhan masyarakat hinggaa pasokan air bersih di wilayah terdampak.

Berikutnya Tahap Pascabencana merupakan sesudah bencana dimana masyarakat masuk kedalam tahap pemulihan dari banjir. Diperkirakan banyak tempat tinggal yang terkena banjir sehingga diungsikan dan diberi penampungan sementara dan fasilitas MCK yang layak bagi pengungsi. Tahap pasca bencana juga memberikan kegiatan penyembuhan trauma (*trauma healing*) terhadap anak-anak sehingga anak-anak tidak memiliki trauma yang berlebihan. Berikut kegiatan dan pelaku dalam menjalankan kegiatan secara terinci sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kegiatan Pasca Bencana (sesudah) Desa Kedawungkulon

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Berkoordinasi dengan sektor posko	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD dan relawan	Setelah kejadian
2	Membuat/mendirikan tempat pengungsian	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD, dan relawan	Setelah kejadian
3	Mendirikan dapur umum	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD, dan relawan	Setelah kejadian
4	Membuat WC umum	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD, dan relawan	Setelah kejadian
5	Membuat data informasi mengenai pengungsi di setiap tempat pengungsian	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD, dan relawan	Setelah kejadian
6	Membuat peta lokasi pengungsian	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD, dan relawan	Setelah kejadian
7	Menyiapkan kebutuhan dasar	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD, relawan dan PKK	Setelah kejadian
8	Mendistribusikan bantuan	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD, relawan, PKK, dan muslimat	Setelah kejadian
9	Motivasi	Relawan, psikiater dan tokoh agama	Setelah kejadian
10	Memberikan hiburan	Relawan	Setelah kejadian
11	Menyediakan alat-alat sekolah	Pemerintah desa, dinas pendidikan	Setelah kejadian
12	Pelaporan	Pemdes, karangtaruna, linmas, LPMD, relawan, dan PKK	Setelah kejadian

Sumber : Rencana Kontijensi Desa Kedawungkulon Kec.Grati Kab.Pasuruan, 2014

Kegiatan dari tabel menjelaskan bahwa pada kejadian pasca bencana, baik pemerintah desa dan organisasi masyarakat memberikan pemulihan kembali dari banjir untuk masyarakat desa yang terdampak dengan mendirikan tempat pengungsian, WC Umum dan Dapur Umum . Setelah itu pemerintah desa akan mendata masyarakat yang terdampak seperti jumlah bayi atau anak-anak, orang tuan (usia rentan) dan sebagai yang nantinya untuk kebutuhan mereka akan disediakan melalui pendistribusian bantuan.

2. Faktor-fakor yang menjadi tantangan Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Dalam penanggulangan banjir yang telah diterapkan dalam program desa tangguh bencana di Desa Kedawungkulon oleh BPBD Kabupaten Pasuruan, ternyata ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Berikut Tantangan yang dihadapi program desa tangguh bencana tersebut antara lain :

a. Pelaksanaan Mitigasi Struktural (Fisik)

Tanggul-tanggul sungai sangat diperlukan untuk pencegahan banjir. Seperti kondisi yang dapat dilihat tanggul merupakan pembangunan sungai yang harus diselesaikan dan dibangun. Hal ini didukung penjelasan dari Bapak Sonny dan Bapak Frengky selaku tim relawan

> "Kita tidak bisa menghilangkan banjir, tetapi bagaimana kita meminimalisir banjir. Jadi kedepan saya mau tanggul-tanggul sungai diperbaiki dan dari mana air ini berasal. sehingga kita tidak bisa menyalahkan air dari sini, padahal air berasal dari atas pegunungan kita sudah ke bagian pemerintahan tolong dikoreksi yah pak proyek-proyek yang ada digunung (pegunungan tenggiri), Banyu Biru. Karena sudah banyaknya lubang akibat batu yang diambi, namanya lubang diameter sekampung dalamnya seratus meter itu tidak hanya satu dua tetapi ratusan lubang, bila tidak diatasi dan adanya kemiringan air itu kalau jebol bisa dampakanya desa kita habis."
> (Data wawancara yang dilakukan di Rumah Penduduk Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Penjelasan diatas sebagai salah satu faktor tantangan dalam penanggulangan banjir perlunya dibangun tanggul-tanggul yang rusak. Perlunya kerjasama antar dinas-dinas untuk mengurangi dampak banjir untuk daerah dataran rendah seperti Desa Kedawungkulon dan pembangunan infrastruktur harus dibenahi agar dampak banjir bisa dikurangi.

Gambar 4.6 Pembuatan Selbeck di Jembatan Oranye dalam mengantisipasi tanggul yang bocor ketika banjir Januari 2017
Sumber: Dokumen Tim Relawan, 2017

Seperti gambar diatas merupakan salah satu kejadian bencana banjir pada bulan Januari 2017 dimana tim relawan membuat selbeck (karung berisi pasir) untuk menutupi tanggul yang bocor untuk sementara. Masyakat Desa Kedawungkulon berharap ketika banjir sudah redah diharapkan pemerintah langsung membenahi tanggul sungai yang bocor dengan mengganti menjadi parafet agar bila ada banjir susulan di bulan berikutnya parafet tersebut mampu menahan air sungai.

b. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat

Pola ketahanan ekonomi menjadi faktor tantangan bagi desa dan masyarakat desa. Sebagian besar mata pencarian masyarakat desa adalah petani dan pegawai/pengusaha, bencana banjir menyebabkan persawahan warga terendama sehingga menyebabkan gagal panen, menyebabkan kelumpuhan transportasi jalan sebagai jalur transportasi untuk jalur perekonomian. Berikut

penjelasan Bapak Bapak Badaru Samsih Selaku Koordinator Lapangan (Trantip) Kententraman Keamanan dan Ketertiban Desa sebagai berikut :

> "Pola Ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat betul tidak berhasil, karena kita sudah mengalami bencana ini jelas sudah tidak bisa beraktivitas apalagi ketika pada saat bencana besar terjadi yang menyebabkan lumpuh total secara ekonomi. Bila di ukur ketika orang mau kerja itu sudah tidak bisa karena transportasi ikut terendam, termasuk banjir pada januari 2017."
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Terendamnya transportasi jalan menyebabkan kelumpuhan ekonomi karena jalan merupakan salah satu alah transportasi dalam perekonomian. Begitu juga dengan petani, persawahan dan perkebunan yang terendam menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan perkebunana akibatnya mata pencaharian. Berikut tingkat ancaman bagi lahan sawah dan perkebunan di tingkat Kecamatan Grati, yaitu:

Tabel 4.7 Ancaman Banjir pada Lahan Pertanian, Perkebunan

Kecamatan Grati / Guna Lahan	Tingkat Ancaman			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Desa Karangkliwon	0,44	-	-	0,44
Sawah Irigasi	0,44	-	-	0,44
Desa Kedawungkulon	30,54	11,09	18,61	60,24
Kebun	1,35	0,73	9,00	11,08
Sawah Irigasi	29,19	10,35	9,61	49,15
Desa Kedawungwetan	4,15	0,02	0,07	4,24
Kebun	0,43	-	0,07	0,49
Sawah Irigasi	3,72	0,02	-	3,74

Sumber : Laporan Rencana Kontijensi Banjir dan Sungai Rejoso Kabupaten Pasuruan, 2016

c. Perlindungan aset produktif utama masyarakat

Kejadian bencana tidak hanya berpotensi menimbulkan bahaya jatuhnya korban jiwa akan tetapi kerusakan aseat atau kehancuran lingkungan hidup

menyebabkan kerugian bagi setiap masyarakat. Masyarakat desa tangguh bencana Desa Kedawungkulon sudah tanggap dalam menyimpan aset-aset mereka agar tidak terkena banjir namun ada beberapa aset yang tidak bisa diselamatkan seperti kendaraan,rumah, persawahan, ternak dan sebagainya. Tantangan dihadapi Desa Kedawungkulon masih banyak aset masyarakat desa yang tidak bisa diselamatkan dari banjir sesuai keterangan Bapak Bapak Badaru Samsih Selaku Koordinator Lapangan (Trantip) Kententraman Keamanan dan Ketertiban Desa sebagai berikut:

> "Perlindungan aset produktif utama masyarakat betul tidak berhasil seperti sawah merupakan aset masyarakat bahkan panen bisa gagal panen karena terkena terjang air. Seperti januari kemarian semua sawah jadi sungai semua tidak terlihat karena terendam air dari ujung selatan ke ujung utara. Pada saat banjir januari 2017 ini ke dalam kantor desa juga masuk sekitar 20 cm dan ini termask tinggi. Rumah yang agak rendah yang paling tinggi terkena banjir hingga 2 meter. Secara ekonomi masyarakat masih ada yang belum di tinggikan, ada yang sudah tinggi, ada yang memang sudah tinggi."
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

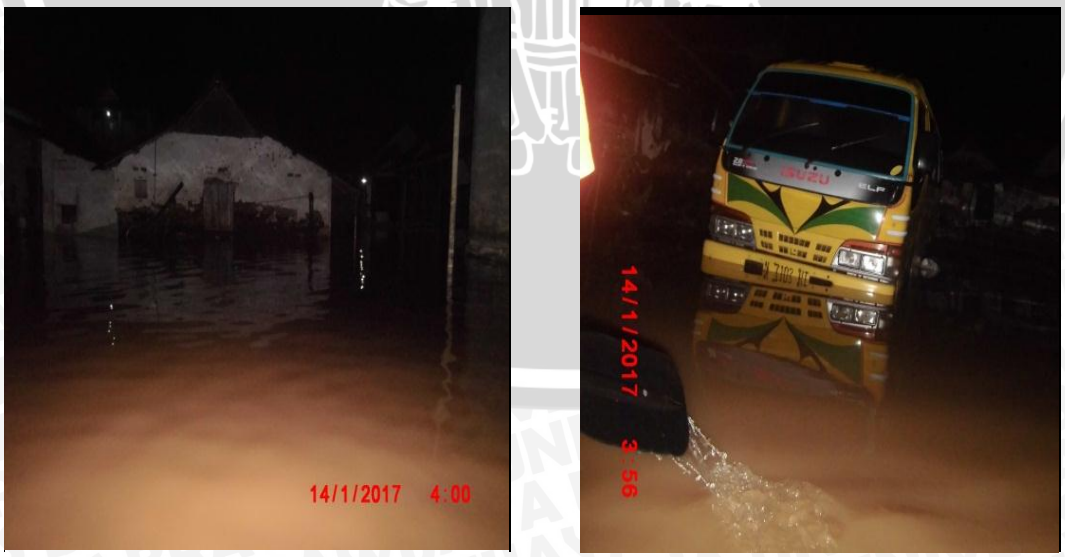

Gambar 4.7 Rumah dan kendaraan yang terkena banjir 14/01/20017
Sumber: Dokumen Desa Kedawungkulon, Januari 2017

Sebagian masyarakat desa setelah terkena dampak banjir banyak mengalami kerugian dari beberapa keterangan masyarakat rumah mereka terendam banjir dikarenakan rumah yang belum ditinggikan, bahayanya lagi rumah roboh akibat banjir. Transportasi yang ikut tenggelam menyebabkan kerusakan sehingga mengeluarkan dana.

d. Membangun koordinasi dengan dinas-dinas pemerintahan dan masyarakat

Membangun koordinasi merupakan salah satu jalan membangun satu perkataan dan satu tindakan dalam menyelesaikan masalah dari yang diharapkan Bapak Sugyarto Selaku Kepala Desa Kedawungkulon menjelaskan

> "koordinasi dibangun dimulai dari pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah pusat, dinas-dinas yang terkait karena untuk memecahkan permasalahan perlunya kerjasama yang baik sehingga nantinya menemukan solusi. Sejauh ini pihak pemerintah desa, BPBD Kabupaten Pasuruan sudah kompak dan diharapkan dengan dinas-dinas lain bisa lebih kompak dan bisa memberikan solusi dari permasalahan di desa kedwanungkulon. Tantangan yang terjadi, dinas-dinas terkait kita harus lebih kompak dan bekerja keras, bagaimana untuk mengurangi dampak bencana agar tidak semakin besar dan semakin berkurang kalau untuk menghilangkan total itu sangat sulit karenakan adanya faktor alam dan faktor manusianya. Jadi kita mulai dari atas yaitu tambang-tambang, dari kehutanan sudah habis semua jadi resapan air juga kurang dan kita yang paling bawah ini terkena dampaknya, ketinggian permukaan tanah paling bawah ini sering terkena banjir dan Desa Kedawungkulon termasuk yang rendah. Tantangan yang bisa diliat dari masa ini ke masa depan harapannya kita harus lebih terinci lagi, harus lebih kompak, infrastruktur dengan sebagainya harus kita benahi, karena aliran sungai rejoso ini mulai hulu sampai hilir kurang lebih panjangnya itu 21 kilo sampai muara sampai laut utara."
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Dalam menjalin kerjasama pihak BPBD Kabupaten Pasuruan menjelasakan bahwa sudah pernah dilakukan sosialisasi secara berkala, sesuai

interval yang ditentukan dengan menghadirkan beberapa sumber. Seperti Badan Meteorelogi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tema dari materi tersebut berhubungan dengan upaya apa saja yang harus dilakukan mayarakat ketika menghadapi bencana termasuk upaya bagaimana mengantisipasi bencana. "selama ini kami sudah melakukan kegiatan untuk meghadapi musim penghujan, diantaranya kegiatan sosialisasi mengantisipasi bencana, khususnya di musim penghujan. Peserta dari seluruh kecamatan ditambah beberapa dinas terkait, seperti Dinas Cipta Karya, Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP. sosialisasi ini nantinya diharapkan tidak hanya sebuah sosialisasi saja akan tetapi adanya penerapan atau pelaksanaan dalam memecahkan permasalahan dengan pengurangan bencana yang ada.

3. Upaya Alternatif yang diambil dalam penanggulangan banjir

Upaya yang diharapkan dalam program desa tangguh bencana, sebagai berikut:

a. Perbaikan tanggul-tanggul sungai dan normalisasi saluran air

Setiap tahun pada musim hujan sebagian besar daerah Pasuruan baik wilayah Kabupaten maupun kota melumpuhkan jalan transportasi dikarenakan banjir. Penyebab banjir disebabkan penyempitan dangkalan sungai, kemudian berkurangnya hutan di hulu sehingga air langsung turun saat hujan lebat, dan kondisi pasang surut air penjelasan dari Bapak Bhakti Jati selaku Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan (detiknews 12/11/2016 diambil pada 02-02-2012). Menurut beliau buruknya drainase di sejumlah lokasi dan kebiasaan buang sampah

sembarangan. Di dejumlah daerah lokasi, banjir tidak selalu akibat sungai meluap. Hujan lebat menyebabkan banjir karena drainase buruk untuk itu harus mitigasi struktural dan non-struktural. Penjelasan Bapak Bhakti Jati selaku Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan

> "mitigasi struktural diantaranya melakukan normalisasi sungai-sungai, reboisasi dan pembangunan drainase yang baik. Kalau normalisasi itu wewenang Provinsi Jawatimur, reboisasi dan pembangunan drainase yang baik. Sedangkan non-struktural mencipatakan masyarakat tangguh bencana, kemudian menyiapkan penyelamatan. Kami menyiapkan fungsi tanggap darurat seperti evakuasi, membantu perbaikan kerusakan rumah dan infrastruktur. Jika ada kerusakan baik rumah warga maupun fasilitas umum kami mengusulkan pada pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan" (sumber: DetikNews.com diambil tanggal 05 Februrai 2017)

Penjelasan lainnya dari pihak pemerintah desa warga desa mencoba mempelajari dan menulusuri penyebab banjir dan mengusulkan memperbaiki tanggul sungai rejoso maupun menormalisasi sejumlah saluran sekunder dan tersier. Sungai Rejoso masih belum dilakukan normalisasi sungai untuk mengangkat endapan lumpur yang membuat sungai menjadi dangkal. Sehingga saat musim penghujan, daya tampung aliran sungai justru menjadi susut atau berkurang dan mengakibatkan luapan ke pemukiman masyarakat, ditambah masih adanya tanggul-tanggul belum diperbaiki. sehingga perlu dilakukan normalisasi dan perbaikan tanggul-tanggul sungai.

b. Melestarikan Hutan

Melestarikan Hutan merupakan salah satu rekomendasi program alternatif dalam pencegahan ancaman bencana seperti penjelasan oleh Menurut Bapak Badaru Samsih Selaku Koordinator Lapangan (Trantip) Kententraman Keamanan dan Ketertiban Desa mengemukakan

> "bahwa daerah bagian selatan termasuk penebangan secara liar bagaimana dinas perhutani memberikan solusi terhadap masyarakat yang melakukan penebangan secara liar adanya peraturan yang dibuat namun kurang penerapan".
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017).

Faktor penebangan memberikan dampak kedepannya yang menyebabkan banjir di daerah lainnya. Sehingga pihak pemerintah berharap dinas-dinas yang terlibat dalam penanggulangan bencana diharapka lebih tegas memberi peraturan bagi penebang liar dan melakukan penghijauan kembali dari hutan yang sudah gundul. Sesuai penjelasan Bapak HM Sugyarto Selaku Kepala Desa Kedawungkulon mengemukakan.

> "Perhutani harus penanaman dan penghijauan kembali. Misalkan lani ini ditempatkan untuk pertanian, penyerapan diatas itu, adanya peraturannya namun tidak aktif.
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Dari penjelasan diatas pihak berharap adanya dari dinas perhutani memberi peraturan yang tegas kepada penebang liar dan melakukan penghijauan kembali agar kedepannya dampak bencana tidak mengenai desa kedawungkulon maupun desa lainnya.

c. Pengurangan Pengerukan Batu di atas Gunung yang Menyebabkan Rawan Bencana

Pengerukkan batu diatas gunung bila diambil terus menerus tanpa ada penanganan solusi dampak kedepannya bisa menyebabkan bencana untuk daerah lain dan merugikan masyarakat yang terkena dampaknya. Menurut Bapak Badaru Shamsih Selaku Koordinator Lapangan (Trantip) Kententraman Keamanan dan Ketertiban Desa mengemukakan

> "bahwa pabrik batu merupakan salah satu penyebab ancaman bencana batu yang ada diatas pegunungan dipecah dan diambil sehingga kekuatan dari tanah tidak memungkinkan lagi, ada sekitar 3 pabrik batu yang beroperasi di atas. Diharapkan adanya solusi atau program pemerintah untuk mengurangi pabrik batu atau menghilangkan pabrik tersebut dengan meneggakkan perizinan terhadap pabrik-pabrik swasta yang mengambil batu-batu pegunungan tersebut.
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017)

Sedangkan penjelasan lainnya dalam memberikat alternatif Bapak HM Sugyarto Selaku Kepala Desa Kedawungkulon mengemukakan

> "Pertambangan, tambang paku, tambang pasir, harus diperketat harus ada peraturan setelah ditambang mungkin harus dibuat tambak siling kemudian harus dibuat penghijauan kembali".
> (Data wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Kedawungkulon, tanggal 31 Januari 2017).

Menurut penjelasan berikut diharapkan adanya peraturan yang ketat dan penghijauan kembali dari pengerukan batu, tambang pasir, tambang paku bagi daerah pegunungan. Sehingga dampak dari bencana bisa dikurangi dan tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

d. Kegiatan Pengetahuan dalam Pembuangan Sampah dan Perawatan Lingkungan Sekitar

Perlunya kegiatan pengetahuan kepada masyarakat dalam pembuangan sampah kesungai. Hal ini dianggap kecil tetapi dampaknya membuat selokan tersumbat sungai menjadi jorok dan menyebabkan banjir dikemudian hari. Hasil dari wawancara Bapak Sugyarto selaku Kepala Desa menjelaskan masyarakat diharapkan bisa mengkondisikan tempat tinggal atau lingkungan sekitar rumahnya dengan tidak membuang sampah, menjaga selokan (paret) yang nantinya bila dari

masyarakat lebih bisa mengkondisikan mungkin dampak positif bisa memberi dampak kecil terhadap ancaman banjir.

Kegiatan yang diharapkan masyrakat mau bergotong royong membersihkan selokan yang mengahambat saluruan air. Masyarakat diajarkan mengolah sampah dengan memisahkan terlebih dahulu sampah organik dan nonorganik yang nantinya sampah tersebut bisa didaur ulang dan bisa berguna fungsinya seperti sampah organik sayuran atau basah bisa menjadi kompos dan nonorganic seperti kaleng, botol mungkin bisa menjadi kreatifitas msayarakat. Bila dilihat peluang ekonomi ini bisa menciptakan ekonomi daerah, dan secara tidak langsung menciptakan interaksi sosial terhadap sesama masyarakat desa. Masyarakat bisa bertukar pikiran dan memberikan pendapat solusi untuk lingkungan rumah mereka agar mengurangi dampak banjir di lingkungan rumahnya.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Kedawungkulon

a. Interpretasi

Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan , Jones dalam Rohman (2009:101-102). Dimana program di implementasikan dengan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu Arikunto (1998: 1). Dengan melihat ciri-ciri dari program seperti a.Sasaran yang hendak dicapai, b.Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, c.Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya, d.Jenis-jenis

kegiatan yang akan dilaksanakan, dan e.Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Suatu program akan berjalan bila adanya sasaran seperti persiapan dan perencanaan secara baik dalam penyusunan implementasinya oleh karena itu tujuan dari sebuah program harus di rencanakan secara matang dan adanya pertimbangan dalam memberikan keputusan agar nantinya tujuan dari program bisa terwujud. Sebaliknya bila suatu program tidak direncanakan dengan baik maka implementasi kegiatan tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai program Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan bencana dikarenakan bencana banyak merugikan masyarakat terutama masyarakat miskin yang nantinya bisa mandiri dalam mengahdapi bencana. Pemerintah mempunyai harapan dimana nantinya program ini berjalan di setiap desa dan mengurangi dampak resiko dari bencana. Program pemerintah ini diterapkan di desa/kelurahan karena berpotensi besar dalam bencana. Salah satu desa/kelurahan yang menerapkan program tersebut adalah Desa Kedawungkulon dan ditetapkan pada tahun 2014 dengan sasaran program yang dicapai ialah memandirikan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pihak BPBD Kabupaten Pasuruan mencoba untuk menerapkan program tersebut untuk pertama kali di Kabupaten Pasuruan. Terpilihnya desa ini dikarenakan masyarakatnya bisa bertahan dengan keadaan ancaman banjir di lingkungannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto (1998: 1) yang mengatakan bahwa implementasi program adalah sederetan kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program yang dimaksud dalam hal ini memiliki tujuan mewujudkan masyarakat desa Kedawungkulon menjadi masyarakat yang selalu siap siaga dalam mengantisipasi bencana, tangguh dalam menghadapi bencana serta mandiri ketika menghadapi bencana dengan membangun kerjasama antar masyarakat. Hal ini dikarenakan penyebab banjir tidak hanya faktor dari manusia melainkan dari alam juga. Sehingga keduanya harus seimbang agar mengurangi dampak banjir di lingkungannya.

Program ini diterapkan sebagai suatu inovasi agar Desa Kedawungkulon mampu menyelamatkan dirinya sebelum terjadinya ancaman banjir masuk lingkungannya. Program ini telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yaitu adanya Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor: 189/728/HK/424.013/2014 Tentang Penetapan Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Sebagai Desa Tangguh Bencana Tahun 2014. Selain itu adanya antusias masyarakat yang mendukung program ini berjalan baik. Tentunya alasannya sangat rasional yaitu pertama, sebagian masyarakat bermata pencarian dibidang pertanian mereka resah ketika memasuki musim penghujan dan terjadinya banjir pertanian mereka terendam air sehingga bisa menyebabkan gagal panen. Kedua, ketika memasuki hujan penghujan dan banjir masuk ke lingkungannya menyebabkan jalan transportasi terhambat dikarenakan jalan terendam banjir.

Program desa tangguh bencana ini tidak hanya berupa rancangan saja akan tetapi sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dan berjalan cukup baik. Seperti halnya dikemukakan Tachjan (2006:35) implementasi program dalam konteks kebijakan publik terdiri dari beberapa dilihat dari tahap-tahap Impementasi adalah

a. merancang program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu, b.melaksanakan *(application)* program dengan mendayagunkan struktur-struktur dan personalia, dan serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat, c. membangun sistem penjadwalan. Perencanaan yang dilakukan oleh pihak BPBD dan pemerintah desa mengikuti komponen-komponen sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang berisikan Legislasi, Perencanaan, Kelembagaan, Pendanaan, Pengembangan kapasitas dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pertama legislasi, Penetapan Peraturan Kepala Desa Kedawungkulon Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Prosedur tetap penanggulangan bencana (PROTAP PB) penyusunan dilakukan pada desember 2014. Adanya peraturan ini sebagai prosedur agar tugas pokok dan fungsi serta tata kerja penanggulangan bencana kepada segenap aparatur pemerintah desa, segenap unsur organisasi/lembaga kemasyarakatan dan masyarakat disekitar. Adanya peraturan ini harus dibuat sebagai pedoman dalam pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa sesuai komponen-komponen desa tangguh bencana Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Dalam penyusunan peraturan ini dibuat dengan segala pertimbangan adapun penjelasan dari Kepala Desa sebenarnya peraturan ini sudah di buat sebelum tahun 2014 Desa Kedawungkulon akan tetapi masih banyaknya kekurangan dalam pembuatan peraturan tersebut hingga tahun 2014 peraturan Kepala Desa diputuskan untuk dikeluarkan agar nanti kedepannya setiap sumberdaya manusia yang mempunyai peran dalam

penanggulangan bencana tau tindakkan yang diperbuat setiap diperbuat dalam kegiatan program tersebut.

Kedua, membuat perencanaan dalam penanggulangan bencana seperti Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan) sesuai komponen-kompen Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Pada tahap ini Desa Kedawungkulon juga sudah memenuhi syarat dalam komponen-komponen ini yaitu sebagai berikut adanya Rencana Kontijensi Desa Kedawungkulon digunakan sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana di Desa Kedawungkulon yang di dalamnya merupakan dokumen desa yang memuat tentang kebijakan, strategi, manajemen, upaya-upaya dari aspek koordinasi dalam penanggulangan bencana saat terjadi bencana yang diberlakukan sesaat belum terjadi bencana oleh Kepala Desa Kedawungkulon.

Berikutnya, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Kedawungkulon sesuai tujuannya sebagai pedoman pemerintah desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam menyelenggarakan upaya pengurangan resiko bencana (PRB) yaitu (Karang Taruna, PKK, Forum PRB Desa atau PUSKORLAP 5, LMDH, Perhutani, Pemerintah Kecamatan, dan sebagainya) dan menjadi bagian dari rencana pembangunan desa dalam menanggulangi bencana desa agar resiko bencana dapat dikurangi. RPB merupakan rencana pemerintah Desa Kedawungkulon selama 5 (lima) tahun untuk memastikan terlaksananya rencana penanggulangan bencana, program dari kegiatan penanggulangan bencana diintegritasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang

berlaku satu tahun dan memuat rincian program dan kegiatan tahunan sebagai penjabaran RPJM Desa. Hingga sekarang peraturan tersebut masih digunakan sebagai pedoman penanggulangan banjir dalam pelaksanaannya.

Ketiga, pemerintah Kabupaten Pasuruan membuat aturan dan tata tertib Forum Pengurangan Bencana forum ini didirikan untuk menjadi lembaga kemasyarakatan dalam menangani PRB Desa sejak tahun 2014 sampai waktu yang tidak ditentukan. Pendirian ini dilakukan atas prakarsa dari organisasi masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda di Desa Kedawungkulon yang difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Desa Kedawungkulon. Forum ini sebagai bentuk pedoman untuk tim relawan Pusat Koordinasi Lapangan 5 (PUSKORLAP 5) yang dimana pemangku kepentingan ada di dalamnya. Sebenarnya tim relawan tersebut dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada akan tetapi diresmikan pada saat program desa tangguh sebagai tim inti ketika ancaman banjir mereka siap dan dijalankan dengan menggunakan acuan dari aturan dan tata tertib Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) untuk terjun langsung dalam penyelamatan warga. Kegiatan dalam tim relawan ini disebut Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) dan tim relawan dari Desa Kedawungkulon ini adalah Pusat Koordinasi Lapangan 5 (PUSKORLAP 5), pemberian nama ini sebagai tanda setiap desa yang ada di Kabupaten Pasuruan memiliki tim relawan resmi. Anggota didalam PUSKORLAP 5 seperti yang dijelaskan sebelumnya sebagian besar masyarakat desa, swasta dan pemerintah desa yang diselenggarakan pada bulan November 2014.

Dari pemaparan diatas terkait proses perencanaan dalam program desa tangguh bencana sesuai komponen-komponen yang di tetapkan Perka BNPB 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana. Hal ini sesuai dengan proses implementasi yang dikemukakan oleh Jones (1991) dalam Hessel Nogi, (2003:30) adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya.

Berdasarkan pemaparan perencanaan diatas dalam implementasi desa tangguh bencana pemerintah dan BPBD Kabupaten Pasuruan berusaha memandirikan Desa Kedawungkulon agar nantinya ketika terjadi bencana masyarakat bersama pemerintah desa bisa mengatasi bencana atau memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terkena banjir. Sehingga tidak menunggu bantuan datang dari luar desa karena BPBD Kabupaten Pasuruan sudah memfasilitasi program desa tangguh bencana agar pemangku-pemangku yang mempunyai peran bisa menerapkan pembelajraran yang diberikan pada tahap tanggap darurat. Seperti yang ditemui dilapangan masyarakat sangat antusias dan mau bekerjasama dalam menanggulangi bencana dan mengikuti setiap proses program pemerintah terkait desa tangguh bencana.

b. Pengorrganisasian

Pengorganisasian yang dimaksudkan ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) yang mana akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari

mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan; penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan program, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan program (Wahab, 2012:91). Pengorganisasian yang digunakn berupa sumberdaya manusaia, sumberdaya keuangan dan sumberdaya keuangan dan sumberdaya peralatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward III (1980) dalam Widodo (2009:98) mengungkapkan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebjikan atau program, Sumberdaya tersebut antara lain adalah sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan atau anggaran, sumberdaya peralatan atau fasilitas dan sumberdaya informasi dan kewenangan.

Di dalam Program desa tangguh Desa Kedawungkulon adanya organisasi KMPB sebagai tempat forum pengurangan resiko bencana dan diberi nama Pusat Koordinasi Lapangan 5 (POSKORLAP 5) yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat, pemerintah desa, dan swasta

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan atau program sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (1980) dalam Widodo (2006:98) menjelaskan "*probably the most essential resources in implementing policy is staff"* sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Jadi efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumberdaya manusia (apartur) yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan teori di atas ini sesuai dengan keadaan dilapangan terkait Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan di dalam kegiatan atau program dapat ditemukan adanya sumberdaya manusia yang terlibat. Mulai dari keterlibatan perangkat desa, BPD, BPBD Kabupaten Pasuruan, Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Karang Taruna, PKK, LPPMD, POSKORLAP 5 dan Lembaga Non-Pemerintah/ORMAS/LSM terdiri dari LMDH, SPPL. Pembentukan organisasi tersebut berdasarkan musrembang seluruh warga dan dipertanggungjawabkan langsung oleh Kepala Desa.

Dalam konteks pelaksanaan program desa tangguh bencana dalam penanggualangan banjir memberikan tugas memberikan tugas kepada desa untuk bertanggungjawab agar mensukseskan tercapainya tujuan dari program desa tangguh bencana kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kedawungkulon yang sering terdampak banjir. Adapun Pusat Koordinasi Lapangan 5 (PUSKORLAP 5) sebagai organisasi yang dibuat program desa tangguh bencana dimana didalamnya pemangku yang berperan memantau dan bertukar informasi mengenai gejala banjir seperti turunnya hujan yang berkepanjangan hingga berjam-jam dengan sesama posko-posko yang sudah ditetapkan di desa dan dilaporkan langsung kepada pihak BPBD Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan Grup Line. Hal ini digunakan agar informasi yang disampai langsung masuk tanpa adanya perantara. Setiap koordinasi mempunyai pertanggungjawaban dalam laporan kegiatan yang di laksanakan seperti di bidang BPBD Kabupaten Pasuruan dibawah pertanggungjawaban Bapak Sugeng Selaku

Kepala Kesiapsiagaan. Kemudian Kepala Desa di bawah pertanggungjawaban Bapak HM. Sugyarto. Dibidang Koordinator Lapangan Bencana (Trantip) Ketentraman Keamanan dana Ketertiban Desa Bapak Badaru Shamsih.

2) Sumberdaya Peralatan, Sarana dan Prasarana

Sumberdaya peralatan merupakan suatu fasilitas yang mendukung terselenggaranya suatu kegiatan atau program yang dijalankan. Peralatan merupakan suatu alat-alat yang mempermudahkan kegiatan atau program mulai dari prabencana, tanggap darurat dan pascabencana apabila tidak ada peralatan yang mendukung maka kegiatan atau program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Pada program desa tangguh bencana di Desa Kedawungkulon mempunyai 3 tahap yaitu Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana. Ketiga tahap ini dalam sumberdaya peralatan menggunakan fungsi alat yang berbeda-beda.

Tahap Prabencana sumberdaya peralatan yang digunakan dalam memperlancar kegiatan seperti dibutuhkannya seperti HT Sirine, Senter, Pos Keamanan dan Pos Pemantauan. HT berfungsi untuk bertukar informasi keadaan desa baik lingkungan desa ataupun antar desa dengan pemantauan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan adapun tempat pemantauan didiriakannya juga Pos Keamanan dan Pos Pemantauan. Dalam sumberdaya peralatan ini Desa Kedawungkulon sudah mempunyai HT, Pos Keamanan dan Pos Pemantauan untuk saling koordinasi yang bagus sehingga ketika tanda-tanda ancaman datang tim relawan atau PUSKORLAP 5 bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan Sirine. Alat ini disediakan oleh Pabrik Gula dikarenakan sirine perusahaan ini mempunyai suara yang besar sehingga mudah terjangkau sebagian besar

linngkungan desa dibantu denga alat pengeras suara disetiap tempat ibadah agar bagi warga desa yang tidak terjangkau bisa mendapatkan informasi ancaman bencana. Disini juga tidak kalah penting Senter, alat ini harus selalu dibawah sebagai alat penerang ketika melakukan pemantauan.

Tanggap darurat alat-alat yang digunakan untuk pertolongan pertama adalah perahu dimana perahu merupak alat yang terpenting dalam pertolongan pertama dan perahu ini selain ada ketersediaanya pihak Pabrik Gula jugaa antusias memberikan perahu karet ini demi membantu evakauasi masyrakat didukung denga alat-alat lainnya yang tersedia baik pemerintah desa, Pabrik Gulan, dan masyarakat seperti mobil bak terbuka, truk, pompa air, tandu, perahu karet, peta desa, jas hujan, tali tambang, helm, masker, sarung tangan, sepatu boaat, compresoar air, senter, ekskavator, bulldozer dan sebagainya.

Tahap pascabencana merupakan tahap pemulihan sumberdaya sarana/peralatan yang disediakan oleh pemerintah juga sudah baik seperti pendirian Posko Pengungsian dan WC Umum, Dapur Umum, peta lokasi pengungsian, alat-alat sekolah. Peralatan lainnya dalam mencegah banjir susulan pemerintah desa, BPBD Kabupaten Pasuran dan tim relawan membuat selbek (karung yang didalamnya sak pasir) untuk pertolongan pertama dan terus memantau ketinggian air sungai dengan alat ukur yang ada di sungai tersebut. Tanpa adanya fasilitas yang mendukung pelaksanaan program akan sulit dalam penanggulangan banjir. Karena dalam penggunaan alat-alat penyelamatan perlunya perlatihan khusus dalam menggunakannya sehingga membutuhkan pembelajran dalam menggunakan alat karena alat terssbut nantiny yang akan

membantu masyarakat keluar dari tempat yang terdampak banjir. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Edward III (1980) dalam Widodo (2006:102) bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori yang digunakan bahwa tanpa adanya peralatan yang mendukung akan memperhambat terselenggaranya kegiatan atau program., begitu pun sebaliknya apabila peralatan/prasarana mendukung akan mempermudah terselenggaranya kegiatan atau program dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan BPBD berusaha untuk memaksimalkan prasarana/fasilitas peralatan untuk menanggulangi banjir di Desa Kedawungkulon baik prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

3) Sumberdaya Anggaran

Sumberdaya anggaran adalah sebagai salah satu alat yang penting sebagai operasionalisasi pelaksanaan dari kegiatan atau program. Karena anggaran merupakan faktor utama dalam menjalankan suatu kegiatan atau program di dalam organisasi. Sumberdaya manusia selaku pelaku dalam menjalankan suatu kegiatan atau program juga memerlukan sumberdaya anggaran dan peralatan. Dimana sumber-sumber ini saling berketergantungan dan saling melengkapi. Dengan adanya sumberdaya anggaran sumberdaya manusia bisa menggerakkan suatu kegiatan atau program dan didukung dengan menggunakan sumberdaya peralatan. Oleh karena itu sumberdaya anggaran harus terinci dan jelas dalam

pembuatannya sehingga untuk penggunaan nantinya sumberdaya anggaran dapat digunakan sesuai kegiatan atau program yang dijalankan. Seperti yang dikemukakan Edward III (1980) dalam Widodo (2006:100) bahwa sumberdaya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumberdaya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Dengan begitu anggaran yang digunakan dalam kegiatan atau program harus jelas dalam penggunaannya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan di dalam program.

Bila sumberdaya anggaran tidak mencukupi suatu kegiatan atau program kondisi ini nantinya akan mempersulit pemangku kebijakan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal dan bisa menyebabkan kegagalan atau terhambat dalam menjalankan kegiatan atau program tesebut seperti yang dikemukakan Van Horn & Van Matter dalam Widodo (2006:100) *"new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failue of the program."* Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh Karena itu, agar pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup.

Berdasarkan teori yang diatas dan disandingkan dengan data dilapangan terkait program desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon terbatasnya anggaran yang ada dari rincian yang diperlihat pihak

BPBD tidak menghabiskan dana sesuai yang dirincikan dalam perencanaannya, dikarenakan pihak BPBD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Desa dan masyarakat masih belajar dalam menjalankan program desa tangguh, dan masih banyaknya kekurangan dan pertimbangan dalam menjalankan program tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng selaku Kepala Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasuruan bahwa program desa tangguh ini baru pertama kali di jalankan di Kabupaten Pasuruan Desa Kedawungkulon dan pihak BPBD Kabupaten Pasuruan masih merabah-rabah dalam mengartikan indikator-indikator kegiatan program desa tangguh bencana oleh pemerintah. Untuk itu pihak BPBD Kabupaten Pasuruan hanya menggunakan dana kegiatan sesuai pengeluaran kegiatan program saja.

Pihak BPBD Kabupaten Pasuruan pun dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pasuruan tidak berhenti di Desa Kedawungkulon saja akan tetapi pada tahun 2015 sudah menerapakn program ini di desa Wonokrti dan 2016 desa ledug. Sehingga harapan oleh pihak BPBD nantinya desa dan masyarakat bisa menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana di daerahanya dan bisa mandiri sebelum menghadapi ancaman bencana.

4) Perangkat Hukum

Perangkat hukum merupakan suatu landasan dari berjalannya sebuah kegiatan atau program, dengan adanya perangkat hukum tersebut kegiatan atau program akan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam program desa tangguh bencana ini Pemerintah melihat bahwa bencana khususnya banjir

sangat merugikan dan meresahkaan masyarakat dikarenakan banjir bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, barang-barang pribadi hingga nyawa mereka. Seperti yang dijelaskan Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Ulum (2014:10), bahwa yang dimaksud bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Banjir terjadi terdiri dari beberapa faktor untuk itu bencana khususnya banjir tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dikurangi dampaknya.

Berbagai upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana sesuai landasan hukum dengan harapan masyarakat bisa mengurangi dampak dari bencana banjir pemeintah berharap agar masyarakat bisa mengetahui gejala bencana membangun koordinasi sesama masyarakat serta pemerintah desa sehingga ketika bencana datang pertolongan pertama masyarakat bisa mengatasi permasalah bencana didesanya. Upaya pemerintah ini sesuai dengan tujuan dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang menjelaskan Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah a.Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana; b.Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumberdaya dalam rangka mengurangi risiko bencana; c.Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;

d.Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumberdaya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; e.Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Program desa tangguh bencana yang telah diterapkan di desa Kedawungkulon sesuai tujuan dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana berjalan dengan cukup baik. Pemilihan Desa Kedawungkulon menjadi desa pertama yang menggunakan program tersebut di Kabupaten Pasuruan menjadikan masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi gejala dari ancaman bencana. Dalam pelaksanaan program ini pihak BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan kerjasama sesama pihak pemerintah daerah, pemerintah desa organisasi masyarakat, swasta dan masyarakat desa dengan membentuk organisasi masyarakat sebagai perwakilan desa yaitu PUSKORLAP 5. Organisasi ini telah difasilitasi dengan adanya pedoman, pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan, simulasi/gladi sesuai tujuan program dengan meningkatkan peran dari semua pemangku. Masayarakat Desa Kedwungkulon juga sangat antusias dalam menjalankan program ini dengan mengikuti segala prosedur kegiatn program tersebut hingga sekarang masyarakat Desa Kedawungkulon lebih mandiri dalam mengatasi bencana di daerahnya.

c. Penerapan/Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir

Secara geografis Desa Kedawungkulon termasuk dataran rendah sehingga dampak banjir mudah menggenangi desa tersebut. Banjir diwillayah di Desa Kedwungkulon tidak hanya disebabkan oleh faktor manusia saja akan tetapi dari alam juga. Tanda-tanda hujan yang berkepanjangan salah satu tanda ancaman banjir di daerah tersebut. Sesuai dengan situasi dilapangan, bahwa pelaksanaan program desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon sudah terlaksana dengan baik. Dalam program desa tangguh bencana sesuai yang direncanakan telah ditetapkan sesuai kebutuhan dalam penanggulangan banjir. Seperti yang dikemukakan Syukur (1987:402) Implementasi program merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan.

Dari melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan Desa Kedawungkulon mempunyai beberapa proses penanggulangan yaitu prabencana (sebelum), tanggap darurat dan pasca bencana (sesudah).

Kegiatan pada saat Prabencana semua yang telah direncanakan dan di rumuskan di dalam pelaksana program desa tangguh bencana Desa Kedawungkulon seperti membangun berkoordinasi sesama masyarakat dalam hal memberi peringatan bahwa akan terjadinya ancaman banjir dengan bertukar informasi antar dusun dengan melihat keadaan cuaca di desa. Adapun Pelaksanaan program tersebut pemerintah ternyata berhasil memandirikan desa karena bisa

bekerjasama sesama masyarakat dengan bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya bersama dan tetap dibawah pengontrolan dari pihak BPBD Kabupaten Pasuruan

Pada Tanggap Darurat program desa tangguh bencana dalam perencanaanya kegiatan Program desa tangguh bencana memberikan dampak baik bagi desa ketika memasuki keadaan tanggap darurat. Adanya simulasi, pelatihan yang diberikan dari program desa tangguh bencana memberi bekal yang cukup kepada masyarakat Desa Kedawungkulon bagaimana mengevakuasi warga siapa yang harus diutamakan, penyelematan jiwa maupun barang pribadi yang bisa diselamatkan, hingga penggunaan alat-alat baik penggunaanya dan penenangan warga yang trauma ketika dibawa keluar dari lokasi banjir.

Berikutnya Pasca Bencana (setelah), merupakan tahap pemulihan dari bencana banjir kegiatan program desa tangguh bencana dalam tahap ini cukup dikatakan baik walaupun adanya kekurangan diakibatkan karena keadaan. Tim relawan masyarakat Desa Kedawungkulon bersama pemerintah desa dan BPBD Kabupaten Pasuruan berhasil dalam memberikan penampungan sementara, pembuatan MCK sementara, Dapur Umum, kebutuhan dasar dan kegiatan penyembuhan trauma(*trauma healing*) terhadap anak-anak dari trauma yang berlebihan. Akan tetapi pada tahap ini tidak luput dari kekurangan dari informasi yang didapat oleh peneliti pada saat pendistribusian bantuan makanan untuk warga yang terdampak setiap RT/RW dari pemerintah pernah mengalami kekurangan bantuan atau karena adanya koordinasi yang kurang dalam pendataan

warga sehingga Kepala Desa memberikan dana bantuan dalam penyaluran makanan kepada warga yang terdampak.

Dapat disimpulkan keberhasilan sebuah program karena adanya disusun kegiatan sistematis seperti program desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir dari prabencana, tanggap darurat pasca bencana dimulai pada tahap interpertasi, pengorganisasian dan penerapan/pelaksanaan kegiatan program. Program desa tangguh bencana di Desa Kedawungkulon sesuai dengan konsep Jones dalam Hessel Nogi (2003:32) mengemukakan bahwa program terimplementasi dangan efektif atau tidak dapat diukur dengan standar penilaian yaitu penorganisasian, interprestasi, dan penerapan/pelaksanaan kegiata program. Standat Penilaian program ditambahkan oleh Arikunto (1998:10) yang menjelaskan bahwa tujuan penilaian program, adalah mengukur keberhasilan program. Keberhasilan tersebut bukan hanya tampak dalam bentuk hasil tetapi juga diukur dari segi waktu, kelancaran, dana, tenaga dan sebagainya.

Dalam penilaian program desa tangguh bencana untuk mencapai keberhasilan sudah dikatakan berhasil seperti adanya penentuan segi waktu untuk menjalankan program, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan, dana yang digunakan seperlunya dan tenaga yang diberikan olah masyarakat sangat berantusias untuk mencapai keberhasilan program tersebut.

2. Faktor-fakor yang menjadi tantangan Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Pasal 4 Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
2) Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sebagai perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan program mempunyai komponen-komponen program desa tangguh bencana, dimana kompone tersebut mempunyai faktor tantangan dalam

pelaksanaannya. Desa Kedawungkulon mempunyai beberapa tantangan dalam program desa tangguh bencana sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Mitigasi Struktural (Fisik)

Tanggul-tanggul sungai sangat diperlukan untuk pencegahan banjir. Tanggul-tanggul sungai yang jebol akibat hempasan kuat dari aliran sungai di Desa Kedawungkulon perlunya ada perhatian khusus. Alangkah baiknya adanya perbaikan tanggul-tanggul sungai secara cepat dengan diperkokoh dengan pembuatan parafet berupa batu yang digeronjongi atau ditahan dengan kawat dan adanya normalisasi sungai serta pengawasan terhadap kondisi sungai. Baik sungai-sungai yang berada di Kabupaten Pasuruan maupun anak-anak sungai.

Seperti sungai Rejoso salah satu sungai yang dekat dengan Desa Kedawungkulon riwayat kejadian banjir luapan sungai dari tahun 2007 hingga 2011 tersebut menerangkan bahwa bangunan seperti parafet, DAM dan tangkis tidak mampu menahan besarnya aliran air penyebab banjir sehingga menyebabkan beberapa wilayah terdampak banjir salah satu Desa Kedawungkulon.

Ketika Sungai Rejoso meluap hingga anak sungai Rejoso yang berada di jembatan Oranye Desa Kedawungkulon ikut meluap karena tidak bisa menampung air yang banyak. Maka diperlukan perhatian khusus untuk sungai-sungai baik di Kabupaten Pasuruan maupun Desa Kedawunngkulon sendiri. Untuk itu perlu diberi perhatian dengan menata daerah aliran sungai sesuai fungsinya, lakukan pengerukan sungai dan diperlukan sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun daerah rawan banjir. Mungkin untuk desa sendiri juga diperlukan membuat lubang biopori, yaitu merupakan

teknologi yang tepat dan ramah lingkungan untuk mencegah banjir yaitu dengan dengan meningkatkan daya air yang meresap, dan merubah sampah organil menjadi pupuk kompos. Oleh sebab itu diperlukan ketegasan pemerintah terhadap dinas-dinas terkait agar mau berupaya dalam memberikan penanggulangan banjir untuk mengurangi dampak banjir di masyarakat.

b. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat

Banjir yang diakibatkan oleh meluapnya sungai-sungai yang disekitar desa Kedawungkulon sangat berdampak pada aktivitas ekonomi baik bagi masyarakat desa Kedawungkulon, Kabupaten Pasuruan maupun daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena luapan air sungai menggenangi jalan penghubung kota. Kabupaten, antar desa. jalan yang dimaksud seperti jalan Pantura penghubung Pasuruan-Probolinggo bila dilihat dari kota. Terhambatnya akses transportasi untuk distribusi barang dan jasa yang memberikan dampak banyaknya kerugian dari sisi ekonomi.

Bila dilihat dari mata pencaharian sebagian besar mata pencarian masyarakat desa adalah petani dan pegawai/pengusaha. Bencana banjir menyebabkan persawahan warga terendam sehingga menyebabkan gagal panen, dan juga menyebabkan kelumpuhan transportasi jalan. Sejauh ini belum adanya program dalam menanggulangi pola ketahanan ekonomi lebih khusus.

Berdasarkan permasalahn tersebut sebaiknya adanya program dalam pembuatan jalan alternatif sebagai transportasi jalannya perekonomian masyarakat untuk mengantisipasi lumpuhnya mata pencaharian perekonomian masyarakat dan diharapkan anggaran bantuan disediakan untuk pemulihan perekonomian

masyarakat terdampak banjir sesuai kerusakan lahan, rumah dan jalan transsportasi.

c. Perlindungan Aset Produktif Utama Masyarakat

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bakornas PB (2007:20), korban manusia dan kerusakan pada harta benda dan prasarana umum diuraikan sebagai berikut:

a. Prasarana Umum

a) Prasarana transportasi yang tergenang, rusak dan hanyut, diantaranya: jalan, jembatan dan bangunan lainnya; jalan KA, setasiun KA, terminal bus, jalan akses dan kompleks pelabuhan.
b) Fasilitas sosial yang tergenang, rusak dan hanyut diantaranya: sekolah, rumah ibadah, pasar, gedung pertemuan, Puskemas, Rumah Sakit, Kantor Pos, dan fasilitas sosial lainnya.
c) Fasilitas pemerintahan, industri-jasa, dan fasilitas strategis lainnya: kantor instansi pemerintah, kompleks industri, kompleks perdagangan, instalasi listrik, pembangkit listrik, jaringan distribusi gas, instalasi telekomunikasi yang tergenang, rusak dan hanyut serta dampaknya, misal berapa lama fasilitas-fasilitas terganggu sehingga tidak dapat memberikan layanannya.
d) Prasarana pertanian dan perikanan: sawah beririgasi dan sawah tadah hujan yang tergenang dan puso (penurunan atau kehilangan produksi), tambak, perkebunan, ladang, gudang pangan dan peralatan pertanian dan perikanan yang tergenang (tergenang lebih dari tiga hari dikategorikan rusak) dan rusak (terjadi penurunan atau kehilangan produksi) karena banjir.
e) Prasarana pengairan: bendungan, bendung, tanggul, jaringan irigasi, jaringan drainase, pintu air, stasion pompa, dan sebagainya.

b. Harta Benda Perorangan

a) Rumah tinggal yang tergenang, rusak dan hanyut.
b) Harta benda (aset) diantaranya modal-barang produksi dan perdagangan, mobil, perabotan rumah tangga, dan lainnya yang tergenang, rusak dan hilang.
c) Sarana pertanian-peternakan-perikanan: peternakan unggas, peternak hewan berkaki empat, dan ternaknya yang mati dan hilang. Perahu, dermaga dan sarana perikanan yang rusak dan hilang.

Luapan banjir dari sungai-sungai berpotensi merusak saran dan prasarana bagi wilayah daerah yang terdampak. Prasarana seperti jalan merupakan penghubung natar wilayah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan fenomena yang

didapat banjir pada bulan januari akhir tahun 2017 menghambat akses transportasi jalan kedesa dikarenakan sungai oranye menenggelamkan jembatan penghubung Desa Kedawungkulon dengan dusun-dusun kurang lebih 18 jam air mulai surut.

Gambar 4.8 Jembatan Oranye terendam banjir Januari 2017
Sumber : detiknews.com, 2017

Dilihat dari sarana banjir pada bulan januari 2017 bangunan rumah atau gedung menenggelamkan rumah penduduk dan ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan, tidak hanya itu saja adanya kerusakan kendaraan pribadi, persawahan yang rusak gagal panen dan sebagainya. Dari sisi lain ada barang yang masih bisa diselamatkan seperti prabotan rumah, dokumen-dokumen penting, barang elektronik kulkas, tv dan sebagainya. Diketahui masyarakat Desa Kedawungkulon sudah tanggap dalam menyimpan aset-aset mereka agar tidak terkena. Apalagi adanya desa tangguh bencana mereka bisa lebih siapsiaga dalam menghadapi bencana, karena setiap ancaman banjir akan datang tim relawan sudah siapsiaga untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk berwaspada dengan satu komando bersama BPBD Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan pengamatan peneliti sejauh ini pemerintah belum ada program dalam menyelamatkan aset bagaimana cara menyelamatkan aset persawahan agar tidak terjadinya gagal panen ketika terkena banjir. Adapun program pemerintah dalam memberikan asuransi rumah atau tanah belum diikuti semua masyarakat desa jadi ketika rumah roboh akibat banjir pemerintah akan setengah dari kerusakan. Sebaiknya pemerintah lebih menegaskan lagi program dalam perlindungan aset di Desa Kedawungkulon.

d. Membangun Koordinasi Dengan Dinas-Dinas Pemerintahan Dan Masyarakat

Membangun koordinasi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi bagaimana menyatukan satu pendapat agar menemukan solusi dalam pemecahan permasalahan. Koordinasi yang dapat dilihat di Desa Kedawungkulon sudah cukup baik dengan masyarakat, pemerintah dan pihak BPBD Kabupaten Pasuruan maupun dinas-dinas lain yang ikut berperan.

Pihak BPBD Kabupaten Pasuruan sudah berupaya dalam memberikan sosialisasi baik bagi masyarakaat maupun pemerintah desa, kecamatan, Dinas Cipta Karya, Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Akan tetapi penerapan dari kegiatan upaya dalam penanggulangan bencana dilakukan dinas-dinas yang terkait BPBD hanya memberikan forum untuk menyatukan pendapat dan memberikan solusi kedepan.

Kondisi yang ditemukan di Desa Kedawungkulon masih banyak ditemukan permasalahan yang dihadapi seperti jalan transportasi didalam desa banyak lubang-lubang akibat jalan rusak pihak pemerintah sudah mengajukan

proposal untuk membenarkan jalan tersebut akan tetapi belum adanya respon dari atas.

Gambar 4.9 Jalan berlubang disepanjang Desa Kedawungkulon
Sumber : Dokumen Pribadi, Desember 2016

Tantangan yang dihadapi masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan transportasi jalan tersebut karena ketika memasuki musim penghujan jalan-jalan berlubang tersebut sudah tidak terlihat lagi dan mungkin bisa menyebabkan kecelakaan kecil seperti jatuh terpeleset maupun kerusakan kendaraan.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya itu saja pemerintah desa dan BPBD Kabupaten Pasuruan berharap dinas perhutani menegakkan peraturan terhadap penebangan liar dan penghijauan sehingga bisa mengurangi bencana. peran-peran dan koordinasi dinas-dinas terkait harus bisa di perkuat lagi dalam menerapkan kegiatan-kegiatan penanggulangan karena untuk memecahkan suatu permasalah tidak hanya dari pemerintah desa dan masyarakat tetapi perlu adany dukungan

pemerintah pusat dan dinas-dinas lainnya atau pemangku-pemangku kepentingan lainnya.

Melihat permasalahan diatas mengenai Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir dengan melihat keputusan pemerintah membuat program desa tangguh bencana tersebut berkontribusi dalam memberikan ilmu dalam mengahadapi bencana akan tetapi kurang dalam pengurangan resiko bencana banjir dilihat dari dinas-dinas lain yang bersangkutan yang memicu banjir sehingga penanggulangan banjir kurang ditegaskan kepada dinas-dinas tersebut oleh sebab itu sebaiknya peran dinas-dinas terkait dalam mengatasi penanggulangan perlu ditegaskan dan dibutuhkan dalam memberikan solusi penanggulangan

3. Upaya Alternatif yang diambil penanggulangan banjir di Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Upaya alternatif merupakan tindakan dari pemerintah sebagai acuan kedepannya dalam mengatasi suatu masalah bisa berupa keputusan-keputusan dalam bentuk undang-undang maupun program kegiatan. Konsep ini dikaitkan dengan penjelasan Dye dalam Wahab (2012:14) yang mengartikan bahwa kebijakan publik sebagai berikut *"public policy is whatever government choose to do or not to do"*. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apapun. Ditambahkan dengan pendapat dari Mazman dan Sabatier dalam Widodo (2006:87), menjelaskan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif

yang penting atau keputusan-keputusan aksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Adapun tindakan pemerintah sebagai upaya alternatif dalam penanggulangan bencana yang diharapkan sebagai berikut:

a. Perbaikan tanggul-tanggul sungai dan normalisasi saluran air

Daerah Kabupaten Pasuruan khususnya Desa Kedawungkulon terletak sangat dekat dengan sungai Rejoso dan anak sungainya seperti di Jembatan Oranye dan sangat dekat dengan pinggiran-pinggiran pantai sehingga menyebabkan kemungkinan besar pada masuk musim penghujan otomatis Desa Kedawungkulon banjir. Salah satu penyebab banjir Desa Kedawungkulon melalui analisis dari pemerintah desa karena volume air yang masuk kesungai terlalu banyak dan melebihi kapasitas ketahanannya menyebabkan air keluar dari sungai sehingga masuk ke pemukiman masyarakat dan memicu banjir. Program alternatif yang disarankan perlunya perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol dengan parafet berupa batu yang digeronjong atau ditahan dengan kawat. Kondisi yang ditemukan tanggul-tanggul sungai yang jebol sebagai bentuk penanganan sementara yaitu dengan selbeck (karung yang didalamnya sak pasir). Selbek itu di tumpuk-tumpuk setinggi tanggul sungai yang jebol, kondisi ini mengurangi dampak banjir sementara akan lebih baiknya lagi perlunya pengawasan terhadap sungai-sungai dan perbaikan tanggul-tanggul untuk mengurangi dampka banjir seperti mengganti selbek dengan parafet.

Di perlukan juga normalisasi sungai penjagaan ini harus dilakukan terus menerus sebagai bentuk perwatan sungai untuk mengurangi dampak banjir. Banyak ditemukan banjir disebabkan pembuangan sampah kesungai, adanya

tumbuh-tumbuhan air yang telah mati sepantaran sungai bila dalam jumlah yang banyak bisa menghambat fungsi saluran air. Oleh karena itu perlunya normalisasi terhadap sungai dalam mengurangi dampak banjir atau program alternatif terhadap sungai dalam mengatasi banjir karena sungai merupakan salah satu jalan mengurangi resiko banjir.

Alternatif lain lakukan pengerukan sungai dan diperlukan sistem pemantau maupun peringatan akan terjadi bencana sesuai daerah rawan banjir dan perlu adanya membangun/kontruksi pencegah banjir seperti bendungan yang memiliki bentuk kolam besar yang berfungsi untuk tempat menampung air dengan jumlah banyak. Sedangkan untuk desa Kedawung sendiri lebih ditekankan membuat fungsi sungai oranye dan selokan dapat bekerja dengan baik dengan cara tidak mencemari dengan sampah atau menjadikan tempat pembuangan sampah sehingga menyebabkan tersumbatnya sungai maupun selokan yang memicu banjir. Oleh sebab itu diperlukan ketegasan pemerintah terhadap dinas-dinas terkait agar mau berupaya dalam memberikan penanggulangan banjir untuk mengurangi dampak banjir di masyarakat sesuai alternatif yang diberikan atau mungkin ada upaya alternatif lain yang disediakan atau sudah direncanakan pemerintah semoga kedepannya dapat diselenggarakan. Sehingga dampak banjir dapat dikurangi setiap tahunnya.

b. Melestarikan Hutan

Penglestarian Hutan merupakan alternatif pencegahan ancaman bencana yang diharapkan oleh pihak pemerintah Desa Kedawungkulon. Sesuai pernyataan dari pemerintah desa saya setuju dengan upaya alternatif ini. Penebangan liar

perlu ditegakkannya peraturan oleh dinas perhutani bagi masyarakat yang menebang pohon di pegunungan secara liar, bila adanya penebangan pohon harus dibatasi dan adanya penanaman penghijauan kembali agar hutan tidak gundul dan tidak menyebabkan kebanjiran atau bencana alam lain di daerah yang bisa terkena dampaknya.

Seperti diketahui gundulnya hutan mengurangi penyerapan air atau hilang dan fungsi hutan sangat berdampak besar dalam resiko bencana. Perlunya perhatian khusus terhadap pelestarian hutan sehingga secara berlahan dengan adanya pengawasan ketat terhadap penebangan liar dan penghijauan hutan akan mengembalikan fungsi hutan sendiri dan mengurangi dampak banjir. Oleh karenanya untuk pihak dinas perhutani agar menegakkan peraturan terhadap masyarakat maupun oknum yang melakukan penebangan hutan, pembakaran hutan agar di beri sanksi sehingga adany kejerahan dalam perusakan huta. Diharapkan juga pihak perhutani melakukan pengawasan ketat terhadap hutan dan reboisasi penanaman hutan agar hutan memiliki fungsinya kembali dan bisa menyerap air sehingga mengurangi dampak banjir.

c. Pengurangan Pengerukan Batu di atas Gunung yang Menyebabkan Rawan Bencana

Pengerukan batu diatas gunung melalui informasi yang di dapat pabrik batu merupakan salah satu penyebab ancaman bencana. Batu yang ada diatas pegunungan dipecah dan diambil sehingga kekuatan dari tanah tidak memungkinkan lagi. Dilansir terdapat ada sekitar 3 pabrik batu yang beroperasi di atas pegunungan yang melakukan pengerukkan batu terus menerus mennyebabkan

lubang-lubang besar hingga kelongsoran dan memicu banjir untuk daerah dibawahnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlunya penangan pemerintah untuk menegakkan perizinan 3 pabrik batu diatas, mungkin bisa dengan upaya alterantif mengurangi jumlah pabrik batu yang ada diatas atau adanya jumlah yang ditetapkkan untuk pengambilan batu serta reboisasi terhadap pengerukan batu yang diambil. Dari wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan lemahnya peraturan dinas terkait dalam memberikan peraturan bagi pabrik-pabrik tersebut.

Bila permasalah ini dibiarkan terus menerus dengan pengambilan batu dikeruk tanpa adanya pengolahan yang baik dan tidak melihat dampak kedepannya bagi daerah lain ini akan menyebabkan bencana bagi masyarakat di bawah daerahnya. Diharapkan program alternatif kedepan dalam mengurangi dampak bencana kedepan pemerintah lebih tegas memberikan peraturan bagi pabrik batu yang ada di atas gunung

d. Kegiatan Pengetahuan dalam pembuangan sampah dan perawatan lingkuangan sekitar

Dibutuhkan kedisiplinan warga untuk membuang sampah dan berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Perlunya kegiatan pengetahuan kepada masyarakat dalam pembuangan sampah kesungai diharapkan pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengajarkan tidak membuang sampah sembarangan dan bagaimana cara pengolahan sampah atau bagaimana mendaur ulang kembali sampah menjadi bagian berguna dengan membedakan sampah organik dan sampah non-organik. Seperti dalam unsur-unsur

implementasi program menurut Syukur (1987:389), proses dalam suatu implementasi Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan. Disini ilmu dan kegiatan yang diperoleh dari sosialisasi dapat menciptakan masyarakat lebih sadar terhadap lingkungan dan membangun kerjasama antar masyarakat.dan mungkin bisa menciptakan sumber mata pencaharian bagi desa dengan mendaur ulang barang-barang atau sampah menjadi barang yang bisa digunakan fungsinya. Seperti sampah nonorganik botol, kaleng, plastik dan sebagainya bila di beri pengajaran pengeolahan sampah menjadikan sampah ini menjadi barang yang berguna dan bisa digunakan kembali begitu juga dengan sampah organik seperti potongan sayuran, ampas ikan atau lauk rumah tangga bisa dijadikan pupuk kompos. Untuk itu perlu adanya upaya alternatif pemerintah untuk memberiakan sosialisasi kepada masyarakat dan nantinya sosialisasi pembelajaran tersebut menjadi peluang mata pencaharian masyarakat.

Berikutnya dengan memberikan pelajaran dengan mengajarkan masyarakat untuk merawat lingkungan sekitar mungkin dengan cara penghijauan sekitar rumah. Banyak ditemukan penyebab banjir karena kurangnya penghijauan sekitar rumah, bila dimulai dari masyarakat memberikan penghijaun terhadap rumahnya sendiri ini merupakan salah satu mengurangi dampak resiko bencana banjir karena membangun resapan air yang didapat dari lingkungan sekitar rumah. Mungkin dengan cara penanaman pohon hingga menjaga kebersihan selokan.

Gambar 4.10 Skema Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Kedawungkulon

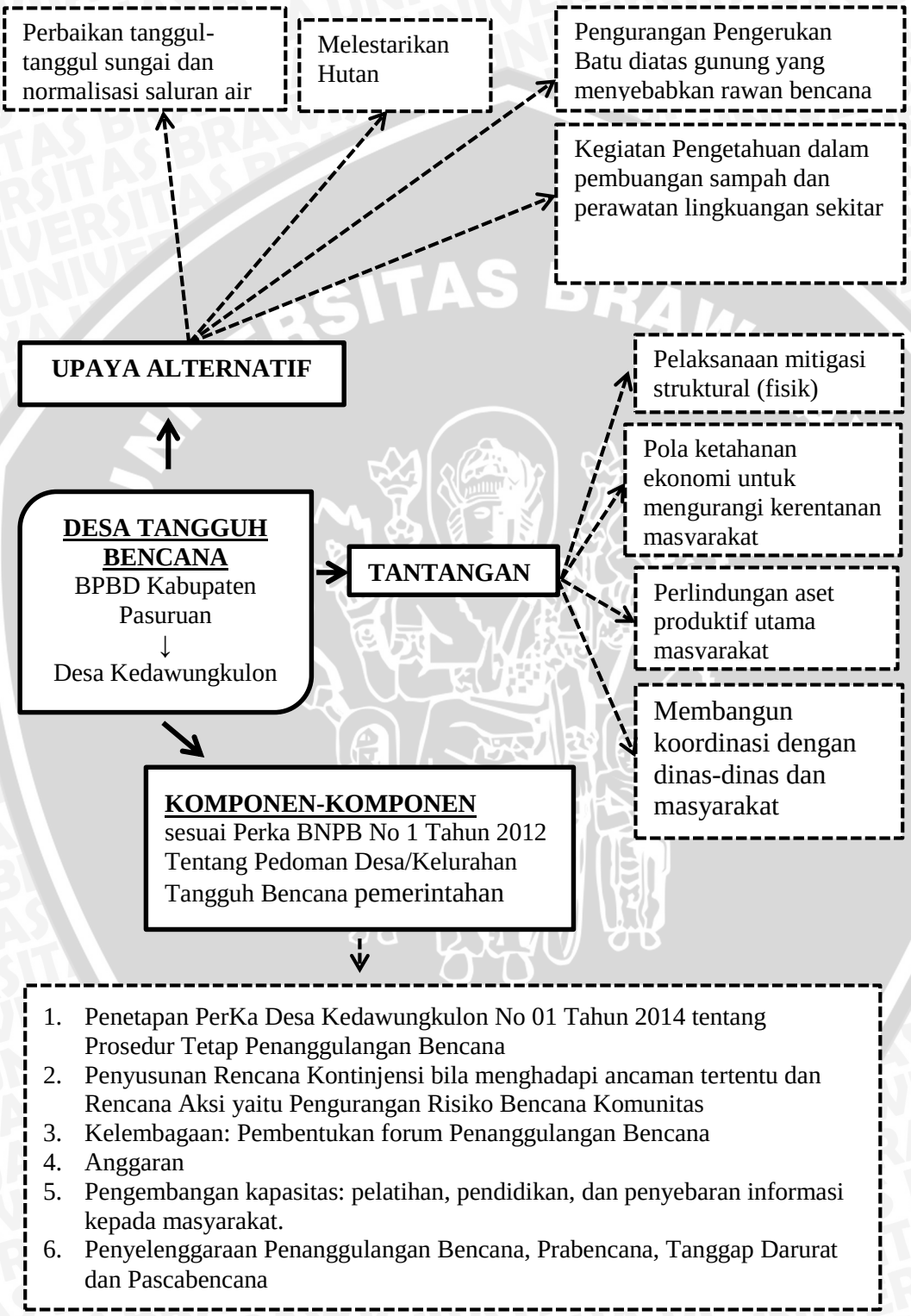

Sumber: Olahan Penulis, 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebegai berikut:

1. Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Desa Kedawungkulon sudah berjalan baik karena sudah meningkatkan dan melibatkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana dimana masyarakat diajarkan agar mandiri bisa mengatasi bencana di desanya sebelum bantuan datang dari luar. Akan tetapi program ini juga masih adanya kekurangan dalam penerapannya, Karena ada 3 komponen-komponen yang belum bisa teratasi seperti pelaksanaan mitigasi structural (fisik), Pola ketahanpenjan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, dan Perlindungan aset produktif utama masyarakat. Dalam Implementasi Desa Tangguh Bencana mempunyai 3 tahapan yaitu interpretasi, organisasi, dan penerapan/pelaksanaan berikut penjelasan dari ketiganya yaitu:

   a. Interpretasi

      Suatu program akan berjalan bila adanya persiapan dan perencanaan secara baik dalam penyusunan implementasinya oleh karena itu tujuan dari sebuah program harus di rencanakan secara matang dan adanya pertimbangan dalam memberikan keputusan agar nantinya tujuan dari program bisa terwujud. Sebaliknya bila suatu program tidak

direncanakan dengan baik maka implementasi kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan oleh pihak BPBD dan pemerintah desa mengikuti komponen-komponen sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang berisikan Legislasi, Perencanaan, Kelembagaan, Pendanaan, Pengembangan kapasitas dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dimaksudkan ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) yang mana akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan; penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan program, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan program. Elemen-elemen tersebut ialah berupa sumberdaya manusaia, sumberdaya keuangan dan sumberdaya anggaran dan sumberdaya peralatan, sarana dan prasarana. Dalam program desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon adanya organisasi KMPB sebagai tempat forum pengurangan resiko bencana dan diberi nama Pusat Koordinasi Lapangan 5 (POSKORLAP 5) yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten

Pasuruan didukung dengan sumber daya keuangan adanya dana dalam yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan program dan sumber daya peralatan seperti alat-alat sesuai tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana

c. Penerapan/pelakasanaan

Dari melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan Desa Kedawungkulon mempunyai beberapa proses penanggulangan yaitu prabencana (sebelum), tanggap darurat dan pasca bencana (sesudah). Kegiatan pada saat prabencana semua yang telah direncanakan dan di rumuskan di dalam pelaksana program desa tangguh bencana Desa Kedawungkulon seperti membangun berkoordinasi sesama masyarakat dalam hal memberi peringatan bahwa akan terjadinya ancaman banjir. Pelaksanaan program tersebut pemerintah ternyata berhasil memandirikan desa dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya bersama masyarakat desa dan tetap dibawah pengontrolan dari pihak BPBD Kabupaten Pasuruan

2. Terdapat beberapa tantangan pelaksanaan yaitu pertama mitigasi struktural (fisik) adanya Tanggul-tanggul sungai yang jebol akibat hempasan kuat dari aliran sungai di desa Kedawungkulon tanggul tersebut masih menggunakan Selbeck untuk penanganan pertama setelah pasca bencana, tetapi belum ada perbaikan khusus seperti tanggul-tanggul sungai diperkokoh dengan pembuatan parafet berupa batu yang digeronjongi atau

ditahan dengan kawat dan adanya normalisasi. Kedua, Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, Sejauh ini belum adanya program dalam menanggulangi pola ketahanan ekonomi lebih khusus seperti pembuatan jalan alternatif sebagai transportasi jalannya perekonomian masyarakat untuk mengantisipasi lumpuhnya mata pencaharian perekonomian masyarakat dan Ketiga, Perlindungan aset produktif utama masyarakat Sejauh ini pemerintah belum ada program dalam menyelamatkan aset bagaimana cara menyelamatkan aset persawahan agar tidak terjadinya gagal panen ketika terkena banjir. Adapun program pemerintah dalam memberikan asuransi rumah atau tanah belum diikuti semua masyarakat desa jadi ketika rumah roboh akibat banjir pemerintah akan setengah dari kerusakan Keempat, Membangun Koordinasi Dengan Dinas-Dinas Pemerintahan Dan Masyarakat

3. Teradapat beberapa upaya alternatif pertama, Perbaikan tanggul-tanggul sungai dan normalisasi saluran air Program alternatif yang disarankan perlunya perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol dengan parafet berupa batu yang digeronjong atau ditahan dengan kawat. Kondisi yang ditemukan tanggul-tanggul sungai yang jebol sebagai bentuk penanganan sementara yaitu dengan selbeck (karung yang didalamnya sak pasir) serta normalisasi sungai. Kedua, Penglestarian Hutan merupakan alternatif pencegahan ancaman bencana yang diharapkan oleh pihak pemerintah Desa Kedawungkulon. Sesuai pernyataan dari pemerintah desa saya setuju dengan upaya alternatif ini. Penebangan liar perlu ditegakkannya peraturan

oleh dinas perhutani bagi masyarakat yang menebang pohon di pegunungan secara liar. Ketiga, Pengurangan Pengerukan Batu di atas Gunung yang Menyebabkan Rawan Bencana, ada sekitar 3 pabrik batu yang beroperasi di atas pegunungan. Perlunya penangan pemerintah untuk menegakkan perizinan 3 pabrik batu diatas atau mengurangi jumlah pabrik batu yang ada diatas dengan menegakkan peraturan. Keempat, perlunya kegiatan pengetahuan kepada masyarakat dalam pembuangan sampah kesungai. Diharapkan pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengajarkan tidak membuang sampah sembarangan dan bagaimana cara pengolahan sampah ata daur ulang menjadi bagian berguna.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi bencana BPBD Kabupaten Pasuruan bersama pemerintah dan dinas-dinas yang terkait dalam penanggulangan bencana harus menegakkan peraturan/hukum untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak maupun masyarakat yang menebang hutan, pengerukkan batu, tambang dan sebagainya. Salah satu dalam pengurangan resiko bencana adalah dengan mengurangi resiko dampak dari bencana tersebut.
2. Perlunya perbaikan tanggul-tanggul sungai sebagai bentuk penanggulangan banjir serta normalisasi anak-anak sungai dan perlunya pengawasan dalam menjaga kebersihan sungai.

3. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan banjir, maka BPBD Kabupaten Pasuruan harus sering mengadakan pelatihan atau simulasi bagi relawan yang baru dalam memberikan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat mempunyai bekal dalam melakukan evakuasi.
4. BPBD Kabupaten Pasuruan harus lebih sering mengadakan studi banding kedaerah lain untuk mendapatkan gambaran dan ilmu baru dalam meningkatkan pengetahun masyarakat terhadap penanggulangan bencana dan lebih ditekankan dalam tanggap darurat, seperti cara menolong orang ditengah ancaman banjir untuk pertolongan pertama, cara menggunakan alat-alat untuk melakukan penyelamatan dan sebagainya.
5. Untuk meningkatkan antusiasme masyarakat peduli akan lingkungan Pemerintah, Pemerintah Desa maupun BPBD Kabupaten Pasuruan harus lebih intensif dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi yang dimaksud penting pengelolaan sampah sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengajarkan bagaimana mengolah sampah menjadi sesuatu yang bisa di daur ulang dan memiliki manfaat dengan cara memisahkan sampah organik yaitu sayuran, ampas ikan (rumah tangga) dan nonorganic botol, kaleng, plastik dan sebagainya. Sehingga nantinya sampah itu bisa menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat Desa Kedawungkulon.

LAMPIRAN

Lampiran1. Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor: 189/728/HK/424.013/2014 Tentang Penetapan Desa Kedawungkulon Kec.Grati Sebagai Desa Tangguh Bencana 2014

BUPATI PASURUAN
PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 180/ 728 / HK/ 424.013/ 2014

TENTANG

PENETAPAN DESA KEDAWUNGKULON KECAMATAN GRATI SEBAGAI DESA TANGGUH BENCANA TAHUN 2014

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketangguhan bangsa program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas/ masyarakat perlu dikembangkan melalui upaya desa/kelurahan tangguh bencana yang dipadukan ke dalam perencanaan dan praktek pembangunan reguler;

b. bahwa suatu desa/kelurahan dikatakan tangguh bencana bilamana memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana serta mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan;

c. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas lokal masyarakat sebagaimana huruf b di atas dalam rangka mewujudkan desa/ kelurahan tangguh bencana, perlu adanya pembinaan terhadap desa/kelurahan melalui bimbingan, sosialisasi, simulasi, gladi dan penyadaran akan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan guna memenuhi indikator desa/ kelurahan tangguh bencana;

d. bahwa guna memberikan motivasi dan dorongan kepada Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati yang telah memenuhi indikator desa/kelurahan tangguh bencana, perlu menetapkan Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sebagai Desa Tangguh Bencana Tahun 2014 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sebagai Desa Tangguh Bencana Tahun 2014.

KEDUA : Type Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati sebagaimana diktum KESATU adalah Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya.

KETIGA : Kewajiban dan Hak Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati sebagai Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya adalah:

a. melindungi semua warga masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana dari dampak bencana yang merugikan;
b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, masyarakat dan lembaga usaha dalam hal teknis bagi pengurangan risiko bencana;
e. meningkatkan kerjasama antara pihak pemerintah desa, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, ormas dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengurangan risiko bencana;

f. memberikan laporan perkembangan desa kepada Pemerintah Daerah secara rutin/periodik dan/atau insidentil sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan;

g. berhak mendapatkan bantuan, pedoman, pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan, simulasi/ gladi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 DEC 2014
BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan ;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Pasuruan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pasuruan;
5. Camat Grati;
6. Kepala Desa Kedawungkulon;
7. Ketua BPD Desa Kedawungkulon.

Lampiran 2. Indikator Desa Tangguh Bencana Desa.Kelurahan Tangguh Bencana Perka No 1 Tahun 2012

INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA: PERKA 1/2012

KATEGORI	NO	INDIKATOR
LEGISLASI	1	Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
PERENCANAAN	2	Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana kontijensi
KELEMBAGAAN	3	Forum PRB
	4	Relawan Penanggulangan Bencana
	5	Kerjasama antar pelaku dan wilayah
PENDANAAN	6	Dana tanggap darurat (review)
	7	Dana untuk PRB (review)
PENGEMBANGAN KAPASITAS	8	Pelatihan untuk pemerintah desa
	9	Pelatihan untuk tim relawan
	10	Pelatihan untuk warga desa
	11	Pelibatan/partisipasi warga desa
	12	Pelibatan Perempuan dalam tim relawan
PENYELENGGA-RAAN PENANGGULANGAN BENCANA	13	Peta dan analisa risiko
	14	Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
	15	Sistem peringatan dini
	16	Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
	17	Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
	18	Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
	19	Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB
	20	Perlindungan aset produktif utama masyarakat

Lampiran 3. Sumberdaya peralatan yang digunakan

No.	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
					PMI	5	kesehatan
25	Lidokain	10	-	10	Dinkes PMI	5 5	Sarana kesehatan
26	Kapas gulung (besar)	2	-	2	Dinkes		Sarana kesehatan
27	Kasa gulung (kecil)	10	-	10	Dinkes PMI	5 5	Sarana kesehatan
28	Tabung oxygen	6	-	6	Dinkes PMI	3 3	Sarana kesehatan
29	Alat Medikasi (gunting, minset, nadpuder, klem, bak instrumen)	9 set	-	9 set	Dinkes PMI	5 4	Sarana kesehatan

3. Sektor Peringatan Dini

Sektor peringatan memiliki tugas yang penting untuk melakukan pengamatan, pemantauan lokasi dan alat peringatan dini, menyebarluaskan tanda-tanda ancaman pada masyarakat sebelum terjadi bencana, dan kemudian memberikan peringatan pada masyarakat agar mengungsi. Tim ini akan berkoordinasi dengan Kepala Desa sebagai *incident commander* dan sektor evakuasi. Sektor ini juga bertanggungjawab pada keamanan lokasi pengungsian dan pemukiman yang ditinggalkan.

3.1 Situasi

Ketika terjadi situasi kritis (hujan selama 5 jam pada sore hingga malam hari), sektor peringatan dini melakukan pengamatan tanda-tanda ancaman dan memantau alat peringatan dini. Jika tanda-tanda ancaman terdeteksi dan sirine alat peringatan dini berbunyi, maka koordinator segera melaporkan pada Kepala Desa, menyebarluaskan dan memberikan peringatan pada warga untuk segera mengungsi.

3.2 Sasaran

a. Terpantaunya tanda-tanda ancaman

b. Tersebarluaskannya informasi ancaman tanah lbanjir

e. Terkendalinya keamanan pengungsian

f. Terjaganya barang dan aset masyarakat

g. Terkoordinasinya keamanan dengan baik yang melibatkan semua unsur masyarakat dan pemerintah desa

3.3 Kegiatan

No	Kegiatan	Alat / Pelaku	Waktu
1	Pengamatan lokasi	Tim peringatan dini, Linmas dan masyarakat	Sebelum
2	Pemantauan alat	• Tim peringatan dini, Linmas dan masyarakat • Alarm, alat pengukur air	Sebelum
3	Penyebarluasan informasi dan peringatan	• Tim peringatan dini, Linmas dan masyarakat, takmir, toga dan tomas • Masjid, HT, sms center, Telpon	Sebelum
4	Pelaporan peringatan	Koordinator, posko dusun	Sesaat sebelum
5	Mengadakan ronda keliling	Linmas, warga	Setelah kejadian
6	Mengadakan giliran jaga	Linmas, warga	Setelah kejadian
7	Menyediakan alat-alat keamanan	Linmas, pemdes dan masyarakat	Setelah kejadian
8	Mendirikan tenda/pos keamanan	Linmas, pemdes, karangtaruna	Setelah kejadian

3.4 Kebutuhan

No.	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Alat peringatan dini	7	4	3	ESDM	7	Sarana kesiapsiagaan
2	Pengeras suara	• 7 Amplifier • 7 megaphone	1	- 6	Tim Aksi (hibah SC-DRR)	7	Sarana kesiapsiagaan
3	Personil	40	40	-	• TNI (Koramil Grati) • Polsek	12 19	Pengeloia dan distribusi bantuan
					• POLRI (Polsek Grati)	20	
					• Tagana	10	
					• PMI	12	
					• Forum PRB • RAPI • Perhutani • UPTD BPBD • TRC BPBD • relawan	24 3 20 2 2 40	
5	Senter	56	19	37	BPBD TNI POLRI Linmas	13 12 12 19	Sarana kesiapsiagaan
6	Pos Keamanan	26	Dusun 2 (4 unit) Dusun 1 (7 unit) Dusun 3 (1 unit) Total=12 unit	Dusun 2 (3 unit) Dusun 1 (5 unit) Dusun 3 (6 unit) Total=14 unit	BPBD Pemerintahan Desa LPPMD	2 6 6	Sarana kesiapsiagaan
7	HT/HP	6	-	6	Forum PRB (hibah SC-DRR) BPBD TNI/ POLRI	3 2 1	Alat komunikasi
			Dusun 1	Dusun 1			

No.	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
			(3 buah) Total=9 buah	(4 buah) Dusun 3 (7 buah) Total=17 buah			
9	Pos Pemantauan	1	1	-	Forum PRB (hibah SC-DRR)	1 unit	Pemantauan keadaan (keamanan dan ketertiban)
10	Pentungan	56	19	37	Swadaya Masyarakat	37 buah	Perlengkapan tim keamanan dan ketertiban

4. Sektor SAR- Evakuasi

Bencana tanah lbanjir yang terjadi diperkirakan warga menuju ke pengungsian yang aman, namun diperkirakan juga dan ada korban yang terluka serta terjebak oleh lbanjir. Selain itu, ada aset masyarakat yang tertimbun dan terjebak lbanjir, akses transportasi terputus, akses air bersih terhambat, penerangan mati dan telekomunikasi. Oleh karena itu, sektor ini bertugas untuk mengevakuasi para korban dan menyelematkan aset masyarakat untuk dibawa ketempat yang lebih aman. Sektor ini juga bertugas melakukan pemulihan sementara akses transportasi, air bersih, penerangan, dan telekomunikasi.

4.1 Situasi

Pada saat terjadi banjir, warga mengalami kepanikan ada yang terluka karena terkena benda yang menimpahnya. Situasi saat itu sangat kacau, panik dan masyarakat berhamburan menyelamatkan diri, akses transportasi terhambat, pasokan air bersih tidak ada, sarana penerangan rusak.

4.2 Sasaran

a. Terevakuasinya warga yang terjebak banjir

b. Terselamatkannya warga yang terjebak banjir

c. Terselamatkannya kelompok rentan

d. Terselamatkannya aset warga yang terkena bencana

g. Berfungsinya pasokan air bersih di wilayah yang terdampak

4.3 Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Koordinasi dengan sektor Posko	Karangtaruna,SAR, PMI, Forum PRB, Tagana	Saat kejadian
2	Menyiapkan peralatan evakuasi	Karangtaruna, Pemdes,SAR, PMI, Forum PRB, Tagana	Sebelum kejadian
3	Mengevakuasi warga	Karangtaruna, Pemdes,SAR, PMI, Forum PRB, Tagana	Sebelum kejadian
4	Mengevakuasi aset	Karangtaruna, ormas, Pemdes,SAR, PMI, Forum PRB, Tagana	Sebelum kejadian
5	Menyelamatkan korban	Forum PRB, Tagana, SAR dan relawan	Setelah kejadian
5	Membuka jalan yang tertimbun	Pemdes dan warga, Forum PRB, Tagana dan relawan	Setelah kejadian
6	Perbaikan instalasi air dan listrik	Pemdes, warga, PLN dan PDAM	Setelah kejadian
7	Membangun kembali rumah warga	Pemerintah desa dan warga	Setelah kejadian
8	Pelaporan	Koordinator	Setelah kejadian

4.4 Proyeksi Kebutuhan

	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
	2	3			6	7	8
	Personil	50	8	42	Forum PRB Koramil Polsek Grati SARDA	20 10 10 10	evakuasi

No.	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
3	Sopir	9	9	-	Forum PRB Masyarakat dengan keahlian terkait	3 6	evakuasi
4	Mobil bak terbuka	6	6	-	Forum PRB (Tasiro, Nandar, Nur) Masyarakat (Sarno, Tanto, Suyono)	3 3	Alat evakuasi
5	Truk	3	3	-	Forum PRB (Puji Darmono) Masyarakat (Sohib)	2 1	evakuasi
6	Pompa air	3	-3	-	swadaya	3	penyaluran air
7	Tandu	6	5	6	Forum PRB TNI POLRI Puskesmas Grati Puskesmas Buntalan BPBD	5 4 4 4 4 25	evakuasi
	Perahu karet	2	1	1	BPBD PG.. Kedawung	2 -	Evakuasi Penyaluran bantuan
8	Chainsaw	6	6	-	Dusun 1 Dusun 2	4 2	evakuasi
9	Peta Desa	1 gerumbul 9	10	-	Forum PRB	10	penunjuk lokasi
10	Jas Hujan	200	-	200	Dinas Sosial Perhutani TNI POLRI PMI BPBD	50 50 20 20 10 50	Perlengkapan personil
11	Tali tambang	900 m	-	900 m	Dinas Sosial Perhutani BPBD	300 m 300 m 300 m	evakuasi
12	Helm	100	-	100	Pertamina Holcim PU Perhutani	30 30 20 20	Perlengkapan personil

No.	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
14	Sarung tangan	100	-	100	Dinas Kesehatan PMI	50 50	Perlengkapan personil
15	Sepatu boat	200	50	150	Forum PRB Perhutani Pertamina Holcim PU	50 20 50 20 10	Perlengkapan personil
16	compressor air	3	-	3	BPBD Masyarakat PDAM	1 1 1	Pembersih lumpur
17	Alat-alat tukang	10 set	-	10 set	Holcim Pertamina PU	4 4 2	pemulihan darurat
18	Senter 6 baterai	10	5	5	Forum PRB PLN	5 5	Alat penerangan
19	Ekskavator	1	-	-	PU	1	pemulihan darurat
20	Bulldozer	1	-	-	PU	1	pemulihan darurat
21	Motor	10	-	10	Magma	10	Sarana evakuasi

5. Sektor Penanganan Pengungsi

Sektor penanganan pengungsi bertugas untuk membuat penampungan pengungsian dan mengelola pengungsian, termasuk didalamnya memenuhi kebutuhan dasar, logistik pengungsi, kebutuhan non-pangan, dan memberikan penyembuhan trauma (*trauma healing*). Diperkirakan pengungsi yang terdampak berjumlah 1500 jiwa. Sektor ini juga bertanggungjawab pada penanganan kelompok rentan baik ibu hamil, balita, orang cacat dan lansia.

5.1 Situasi

Diperkirakan pada saat terjadi banjir, banyak tempat tinggal yang terkena Ibanjir sehingga harus diungsikan dan diberi penampungan sementara yang layak. Sebanyak 1500 jiwa termasuk kelompok rentan mengungsi ke tempat yang aman.

5.2 Sasaran

a. Tersedianya pengungsian yang layak bagi pengungsi
b. Tersediannya kebutuhan dasar pengungsi di penampungan, antara lain; air bersih, makanan, makanan bayi, pakaian, tikar, selimut, penerangan, kebutuhhan khusus perempuan, alat alat mandi dan lainnya
c. Tersedianya alat transportasi dipengungsian
d. Tersediannya MCK yang layak bagi pengungsi
e. Tersediannya dapur umum yang mengelola kebutuhan pengungsi
f. Mengembalikan kondisi mental anak-anak dan memulihkan kondisi fisik
g. Melakukan kegiatan trauma healing pada anak sehingga anak tidak memiliki rasa trauma yang berlebihan
h. Mengembangkan proses belajar mengajar yang menyegarkan pada anak

5.3 Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Berkoordinasi dengan sektor posko	Pemdes, karangtaruna, linmas,LPMD dan relawan	Setelah kejadian
2	Membuat/mendirikan tempat pengungsian	Pemdes, karangtaruna, linmas,LPMD dan relawan	Setelah kejadian
3	Mendirikan dapur umum	Pemdes, karangtaruna, linmas,LPMD dan relawan	Setelah kejadian
4	Membuat WC umum	Pemdes, karangtaruna, linmas,LPMD dan relawan	Setelah kejadian
5	Membuat data informasi mengenai pengungsi di setiap tempat pengungsian	Pemdes, karangtaruna, linmas,LPMD dan relawan	Setelah kejadian
6	Membuat peta lokasi pengungsian	Pemdes, karangtaruna, linmas,LPMD dan relawan	Setelah kejadian
7	Menyiapkan kebutuhan dasar	Pemdes, karangtaruna, linmas,LPMD dan relawan dan PKK	Setelah kejadian
		Pemdes, karangtaruna,	Setelah

			kejadian
10	Motivasi	Relawan, psikiater dan tokoh agama	Setelah kejaadian
11	Memberikan hiburan	Relawan	Setelah kejadian
12	Menyediakan alat-alat sekolah	Pemerintah desa, dinas pendidikan	Setelah kejadian
13	Pelaporan	Pemdes, karangtaruna, linmas,LPMD dan relawan dan PKK	Setelah kejadian

5.4Proyeksi Kebutuhan

No.	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
1	2		4	5	6	7	8
1	Personil	53	18	35	TNI (Batalyon 405)	5	Pengelola dan distribusi bantuan
					POLRES Pasuruan	5	
					TAGANA	5	
					Dinas Sosial	5	
					BPBD Pasuruan	5	
					Forum PRB Desa Kedawungkulon	18	
2	Tempat/lokasi	3	3	-	Lapangan desa Kedawungkulon	1	Penampungan sementara warga pengungsi
					Lapangan PG. Kedawung	1	
					Lapangan SMP. Grati	1	
4	Alat tulis	500 paket	-	500 paket	Dinas Sosial	100	Sarana pendidikan
					Disdikpora	100	
					Holcim	150	
					Pertamina	150	
5	Papan tulis	4	-	4	SD Kedawungkulon 01	1	Sarana pendidikan
					SD Kedawungkulon 02	1	
					SD Kedawungkulon 03	1	
					SD Kedawungkulon 04	1	
6	Buku Pelajaran	500	500		UPTD Disdikpora	300	Sarana
					SD Kedawungkulon 01	50	
					SD Kedawungkulon 02	50	

No.	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
1	2		4	5	6	7	8
7	Dapur umum	3 paket	-	3 paket	Inventaris RT/lingkungan	3	penyediaan konsumsi
8	Perlengkapan tidur (tikar, matras, kasur, selimut)	215	-	215	Pemerintah Daerah Kabupaten	65	sarana istirahat
					Pertamina	75	
					Holcim	75	
9	Tenda pleton	10	1	9	Forum PRB Desa Kedawungkulon	1	Sarana pengungisan
					BPBD Kabupaten	6	
					Kesbanglinmas	2	
11	Tangki air	3	-	3	PDAM	2	Sarana air bersih
					Pertamina	1	
					BPBD	1	
12	Genset	5	3	2	Forum PRB Desa Kedawungkulon	2	Alat penerangan
					PLN Pasuruan	1	
					BPBD PG. Kedawung	1	
13	MCK	30	-	30	BPBD Kabupaten	10	Sanitasi
					Swadaya	20	
14	Meja	18	-	18	SD Kedawungkulon 01	4	sarana pengungsi
					SD Kedawungkulon 02	6	
					SD Kedawungkulon 03	2	
					SD Kedawungkulon 04	6	
15	Kursi	32	-	32	SD Kedawungkulon 01	10	Sarana pengungsi
					SD Kedawungkulon 02	12	
					SD Kedawungkulon 03	10	
16	alat transportasi	4	-	4	BPBD Kabupaten	1	Alat transportasi
					BPBD Provinsi	1	
					Pertamina	2	
17	Motor	7	-	7	Forum PRB Desa Kedawungkulon	2	Alat transportasi
					Pemerintah Desa	3	
					BPBD Kabupaten	2	
19	Papan Informasi	3	-	3	Forum PRB Desa Kedawungkulon		persebaran informasi
					Pemerintah Desa		

No.	Jenis Kebutuhan	Jml yg dibutuhkan	Persediaan	Kekurangan	Sumber Daya	Kesediaan	Fungsi
1	2		4	5	6	7	8
21	tandon air	60	-	60	BPBD Kabupaten BPBD Provinsi PDAM	30 20 10	tempat air
22	jerigen air	20	-	20	Pemda Kabupaten Pasuruan	20	penampungan air
23	gayung mandi	60	-	60	PKK Kabupaten Pasuruan Dharma wanita Pasuruan	30 30	peralatan mandi
24	tempat sampah	9	-	9	Dinas Kebersihan Kabupaten	9	Pembuangan limbah padat
	Pangan						
25	Beras	4788 kg	-	4788 kg	BULOG BPBD	2000 kg 5 KW/HARI	Konsumsi
26	makanan tambahan bayi	204 paket	-	204 paket	Dinas Kesehatan Holcim Pertamina	104 100 100	kebutuhan bayi
27	Tempat makan	532	-	532	Swadaya	532	Perlengkapan
28	Sendok	532	-	532	Swadaya	532	Perlengkapan
29	Gelas	532	-	532	Swadaya	532	Perlengkapan
	Non Pangan						
30	Sabun bayi	102	-	102	Dinas Kesehatan PMI PKK Kabupaten	40 40 22	Perlengkapan bayi
31	Minyak bayi	102	-	102	Dinas Kesehatan PMI PKK Kabupaten	40 40 22	Perlengkapan bayi
					Dinas Kesehatan	40	Perlengkapa

Lampiran 4. Surat Keterangan Bangkesbangpol Kabupaten Pasuruan

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. PanglimaSudirman No. 54 Telp. (0343) 424162 Fax. (0343) 411553
Email :bakesbangpol@pasuruankab.go.id
PASURUAN

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY
No.072/ 383 /424.075/SUR/RES/2016

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2011.

Menimbang : Surat dari Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi, tanggal 14 Oktober 2016 Nomor : 15099/UN10.3/PG/2016 Perihal Permohonan Ijin Pra Riset/Survey atas Nama DANYATI TRIBUNDA NAIBAHO

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama	:	**DANYATI TRIBUNDA NAIBAHO**
NIM	:	135030100111098
Alamat	:	Jl. Kertoasri No.126B Kota Malang
Pekerjaan / Jabatan	:	Mahasiswa
Instansi / Organisasi	:	Universitas Brawijaya Malang
Kebangsaan	:	Indonesia

Untuk Melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :

Judul Proposal	:	***" MANAJEMEN DESA TANGGUH BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR (STUDI PADADESA KEDAWUNG KULON, KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN)"***
Tujuan	:	Survay
Bidang Penelitian	:	Manajemen Bencana
Penanggung Jawab	:	**DANYATI TRIBUNDA NAIBAHO**
Anggota / Peserta	:	==========
Waktu Penelitian	:	1 (satu) Bulan TMT Surat dikeluarkan
Lokasi Penelitian	:	Desa Kedawung Kulon Kec. Grati Kabupaten Pasuruan
Dengan Ketentuan		1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan; 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat; 3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pasuruan, 17 Oktober 2016
An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan
Kabid Hubinarga,

RACHMAD YUDI HARIYANTO, SH
Pembina
NIP. 19651204 198503 1 002

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan ;
2. Sdr. Camat Grati Kabupaten Pasuruan ;
3. Sdr. Kades Kedawung Kulon Kec. Grati Kab. Pasuruan ;
4. Arsip

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

1. Bagaiamana dinamika Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Daerah Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ? Seperti Awal mula terbentuknya desa kedawung menjadi desa tangguh bencana
2. Bagaimana proses penanggulangan bencana banjir dari prabencana, tanggap bencana, pascabencana (kegiatannya atau simulasinya sudah dilakukan sejak kapan ? Jelaskan
3. Siapa saja yang berperan dalam pengesahan tujuan kebijakan program dan Sasaran Strategi desa tangguh bencana (Kepala Desa) ?
4. Apakah Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) itu yang dimaksud tim relawan dan bagaimana terbentuknya ?
5. Tujuan apa yang ingin dicapai dari desa tangguh bencana ?
6. Dimana saja kegiatan desa tangguh bencana dilakukan ?
7. Kegiatan apa saja yang diberikan kepada Pengorganisasian dalam menyelenggarakan kegiatan desa tangguh bencana ?
8. Desa tangguhkan merupakan berbasis masyarakat, organisasi yang terlibat di dalam masyarakat apakah cuman KMPB ?
9. Sumber Daya Manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aktor-aktor yang terlibat khusus dari pemerintahan bisa di jelaskan pak fungsi dan tugasnya di desa tangguh bencana mungkin dari pembuatan desa tangguh, pelaksanaanya

10. Sumber dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung pekerjaan dalam penyelenggaraan desa tangguh. siapa-siapa aja yang berperan dan alat apa saja yang digunakan ?
11. Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang, peraturan-peraturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara formal. Bagaimana mana proses pembuatan hingga terjalankannya peraturan (Kepala Desa) ?
12. Pelaksanaan/Penerapan merupakan segala keputusan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan dari program (indikator pencapaian). Apakah program desa tangguh bencana terleasasikan dalam memberikan penanggulangan bencana ?
13. Apa saja tantangan yang dihadapai Program Desa Tangguh Bencana dalam penanggulangan banjir di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ?
14. Apa saja upaya alternatif yang perlu diambil Program Desa Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Banjir di Daerah Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ?

Lampiran 6. Dokumentasi Peneliti Selama Penelitian

Wawancara dengan Koordinator Lapangan Bencana (Trantip) Ketentraman Keamanan dan Ketertiban Desa Kedawungkulon

Wawancara dengan Kepala Desa Kedawungkulon

Pusat Koordinasi Lapangan (PUSKOLAP) Penanggulamgan Bencana Kabupaten Pasuruan di Desa Kedawungkulon

Makan bersama dengan masyarakat Desa Kedawungkulon

Sungai Oranye Desa Kedawungkulon

Mobil truk fasilitas dari BNPB

Mobil Fasilitas dari BPBD

Perahu dari Perusahaan Pabrik Gula

Diskusi Pemerintah Desa, BPB Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Desa Kedawungkulon

CURRICULLUM VITAE

DANYATI TRIBUNDA NAIBAHO

HP & WA 0981265315981

danyati.naibaho@yahoo.com

IG & LINE: danytnaibaho

PIN : 5217C8A7

DATA PRIBADI

- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Juni 1995
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Kristen Protestan
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tinggi / Berat Badan : 164 cm / 63 Kg
- Golongan darah : B
- Universitas / Jurusan : Universitas Brawijaya / Administrasi Publik
- Alamat : Jl. Kejaksaan No. 33
  Pangururan Kabupaten Samosir - Sumatera Utara
- Hobi : Basket dan Menyanyi
- Telephone : 081265315981
- Email : danyati.naibaho@yahoo.com

A. Data Pendidikan :

1. SD Swasta Angkasa 1 Medan (2001-2007)
2. SMP Swasta Immanuel Medan (2007-2010)
3. SMA Swasta Immanuel Medan (2010-2013)

4. Universitas Brawijaya Malang (2013-Sekarang)

B. Data Organisasi :

1. BEM FIA (2013-2014)
2. RSC FIA (2013-2014)
3. HUMANISTIK FIA (2014-2015)
4. LKP3 (2015-2016)

C. Data Kepanitiaan :

1. Staff Konsumsi HEO (2013)
2. Panlok Pilpres Universitas Brawijaya (2013)
3. Staff Pdd Natal Pmk Immanuel (2013)
4. Co. Konsumsi HEO (2014)
5. Mentor Panglima FIA (2014)
6. SC Konsumsi HEO (2015)
7. Staff Sponsorship FIA Night Run (2015)
8. Staff Perlengkapan Camp Makris Pmk Immanuel (2015)
9. Staff Acara Workshop GIS LKP3 FIA (2015)

Malang, Mei 2017

Hormat saya,

Danyati Tribunda Naibaho